PEMERINTAH KOTA CIREBON

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Monumen No. 1, Brigdjen Dharsono, Cirebon 45132 Telepon (0231) 203588
Email bapelitbangda@cirebonkota.go.id Website bappeda.cirebonkota.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 000.9/1/BAPPELITBANGDA/2025

Dasar :
1. Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 050/Kep.94-BAPPELITBANGDA/2024 Tentang Pembentukan Tim Kelitbangan Kota Cirebon.
2. DPA Tahun Anggaran 2025 Nomor: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : Dr. Kartono, SE., M.Si
   Jabatan : Ketua Tim Kelitbangan
2. Nama : Toni Ari Wibowo, SST, M.Par
   Jabatan : Anggota Tim Kelitbangan
3. Nama : Dr. Budi Manfaat,. M.Si.
   Jabatan : Anggota Tim Kelitbangan
4. Nama : Inggrid Multi Rejeki, ST, MT
   Jabatan : Anggota Tim Kelitbangan
5. Nama : Nurhidayah, ST, MT
   Jabatan : Anggota Tim Kelitbangan
6. Nama : Hj. Ani Junaeni, SKM. M.M.
   Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
7. Nama : Dwi Hermin Susanti, S.P
   Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Nama : Novid Gumelar, St, M.Eng.
   Jabatan : Peneliti Ahli Pertama

9. Nama : Indah Gilang Pusparani, S.Sos., M.Sc.
   Jabatan : Peneliti Ahli Pertama

10. Nama : Kurnia Tri Hermawan, S.Sos., M.A.P.
    Jabatan : Peneliti Ahli Pertama

11. Nama : Iis Taulida, S.H.I
    Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama

. 12. Nama : Yuliana Herawati, S.Kom
    Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama

Untuk :

1. Melaksanakan Kegiatan Kajian Analisis Situasi dan Evaluasi RIPPARDA Kota Cirebon Tahun 2019-2025 dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Cirebon Tahun 2025, dengan waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender, terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perintah Tugas ini.
2. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon

Cirebon, 15 Januari 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Kota Cirebon

Drs. AGUS HERDHYANA, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196808231988031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

GEMAH RIPAH LOH JINAWI

Laporan Akhir

Kajian Analisis Situasi dan Evaluasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon Tahun 2019-2025

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah S.W.T yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia pada seluruh alam raya. Berkat izin-Nya, Laporan Akhir Kegiatan "Kajian Analisis Situasi dan Evaluasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon Tahun 2019-2025" dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam tertuju pada pemimpin terhebat hingga akhir zaman, suri tauladan untuk semua umat manusia, Nabi Muhammad S.A.W.

Secara umum kegiatan evaluasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan daerah, terutama dalam pembangunan kepariwisataan Kota Cirebon. Di masa mendatang pembangunan kepariwisataan di Kota Cirebon perlu dilanjutkan program dan kegiatan yang telah berjalan dan dianggap memiliki dampak dan manfaat dalam kepariwisataan saat ini, mengingat kegiatan yang telah berjalan dalam RIPPARDA Tahun 2019-2025 tentunya sudah tersinkronisasi dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang sedang sedang berjalan.

Kegiatan laporan akhir ini merupakan salah satu proses dalam rangkaian kegiatan penyusunan Kajian Analisis Situasi dan Evaluasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon Tahun 2019-2025. Kegiatan ini disusun oleh Tim Kelitbangan dan dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon dengan menggunakan Tahun Anggaran 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukan konstruktif sehingga dapat tersusun dokumen Laporan Akhir Kajian Analisis Situasi dan Evaluasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon Tahun 2019-2025

Cirebon, Maret 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Sasaran 7

1.3 Ruang Lingkup Kajian 7

1.4 Sistematika Laporan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

2.1 Pembangunan Daerah 10

2.2 Kepariwisataan 11

2.3 Evaluasi Kebijakan Publik 12

2.4 Analisis Situasi 14

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA CIREBON **17**

3.1 Kondisi Geografis Kota Cirebon 17

3.2 Kondisi Demografis Kota Cirebon 18

3.3 Kondisi Perekonomian Kota Cirebon 18

3.4 Kondisi Pariwisata Kota Cirebon 26

3.5 Kebijakan Kepariwisataan Kota Cirebon 29

BAB IV METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN **37**

4.1 Desain Penelitian 37

4.2 Unit Analisis dan Subjek Penelitian 38

4.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 38

4.4. Teknik Analisis Data 40

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 44

5.1 Evaluasi Capaian Pembangunan Pariwisata Tahun 2019-2024 44

5.2 Analisis Situasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Pariwisata Kota Cirebon 57

5.3 Evaluasi Kesesuaian Rencana Pengembangan Perwilayahan Kepariwisataan 71

5.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan 72

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 145

6.1 Kesimpulan 145

6.2 Rekomendasi 146

DAFTAR PUSTAKA 151

DOKUMENTASI KEGIATAN 155

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Wilayah Administrasi Kota Cirebon 17
Tabel 3.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), ... 19
Tabel 3.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Kota Cirebon Tahun 2019-2023 23
Tabel 3.4 Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Tingkat Inflasi Kota Cirebon Menurut Kelompok Pengeluaran 24
Tabel 3.5 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon Tahun 2019-2025..... 32
Tabel 5.1 Capaian Sasaran/Program Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon Tahun 2019-2025..... 45
Tabel 5.2 Perbandingan APBD Kota Cirebon dengan Pagu Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon Tahun 2019-2024 53
Tabel 5.3 Tema Ruang Lingkup Pembangunan Destinasi Pariwisata..... 66
Tabel 5.4 Tema Ruang Lingkup Pembangunan Industri Pariwisata 68
Tabel 5.5 Tema Ruang Lingkup Pembangunan Pemasaran Pariwisata 69
Tabel 5.6 Tema Ruang Lingkup Pembangunan Pemasaran Pariwisata 70
Tabel 5.7 Identifikasi Pengelolaan Kawasan Wisata di Kota Cirebon..... 71
Tabel 5.8 Capaian Kegiatan Pembangunan Destinasi Pariwisata RIPPARDA Tahun 2019-2025..... 73
Tabel 6.1 Matrik Analisis Rekomendasi dan Strategi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan di Kota Cirebon 148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (%) 22
Gambar 4.1 Model Analisis *Multiple Streams* (Kingdon, 2014) 42
Gambar 5.1 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Kota Cirebon Tahun 2017-2024 47
Gambar 5.2 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kota Cirebon Tahun 2017-2024 48
Gambar 5.3 Perkembangan Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%) Kota Cirebon Tahun 2017-2024 50
Gambar 5.4 Perkembangan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (%) Kota Cirebon Tahun 2017-2024 52
Gambar 5.5 Perbandingan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Cirebon dengan Persentase Pagu Anggaran DISBUDPAR terhadap APBD Kota Cirebon Tahun 2019-2025 54
Gambar 5.6 Grafik Hirarki Tema Destinasi Pariwisata 67
Gambar 5.7 Grafik Hirarki Tema Industri Pariwisata 68
Gambar 5.8 Grafik Hirarki Tema Pemasaran Pariwisata 69
Gambar 5.9 Grafik Hirarki Tema Kelembagaan Pariwisata 70
Gambar 5.10 Realisasi kegiatan ruang lingkup Desinasi Pariwisata 142
Gambar 5.11 Realisasi kegiatan ruang lingkup Industri Pariwisata 142
Gambar 5.12 Realisasi kegiatan ruang lingkup Pemasaran Pariwisata 143
Gambar 5.13 Realisasi kegiatan ruang lingkup Kelembagaan Pariwisata 143

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang dilakukannya kajian analisis situasi dan evaluasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Cirebon Tahun 2019-2025 didasarkan pada beberapa faktor. Faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut, di bawah ini.

A. Perkembangan Kepariwisataan

Kepariwisataan di Kota Cirebon terus mengalami perubahan, baik dari segi potensi, daya tarik wisata, pola kunjungan, maupun kebutuhan pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data dan evaluasi untuk memastikan arah pengembangan kepariwisataan sejalan dengan perkembangan terkini.

- Potensi

  Potensi Kawasan Pusaka Kota (Pasal 12 Perda 7/2019)

  a. Kawasan Pusaka Keraton-keraton Cirebon yang terletak di Kecamatan Lemahwungkuk dan Kecamatan Pekalipan meliputi Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan dan Keraton Kaprabonan;
  b. Kawasan Pusaka Taman Air Gua Sunyaragi di Kecamatan Kesambi;
  c. Kawasan Pusaka dengan karakteristik Arsitektur kolonial di Kecamatan Lemahwungkuk (sekitar Pelabuhan dan Jl. Yos Sudarso) dan Kecamatan Kejaksan (Jl. Siliwangi dan sekitarnya);
  d. Kawasan Pusaka dengan karakteristik Pecinan di Kelurahan Lemahwungkuk (Jl. Lemahwungkuk, Jl. Kanoman, Jl. Winaon, Jl. Pasuketan, dan Jl. Pekiringan);
  e. Kawasan Pusaka dengan karakteristik etnis Arab di Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk (sekitar Masjid Merah Panjunan);
  f. Kawasan Pusaka dengan karakteristik masyarakat pesisir di sepanjang garis pantai Kota Cirebon (Kampung Nelayan Kejawanan, Cangkol, Samadikun, dan pesisir);
  g. Kawasan Pusaka dengan karakteristik lingkungan pesantren tradisional Benda Kerep di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti; dan
  h. Kawasan Pusaka Cagar Budaya Petilasan Kalijaga di Kecamatan Harjamukti dengan lingkungan sekitarnya berupa pepohonan dengan habitat kera didalamnya

- Daya Tarik wisata

Kota Cirebon adalah kota dengan latar belakang sejarah yang beragam sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis. Hal ini tentu memiliki nilai tambah bagi perkembangan pariwisata di Kota Cirebon. Menurut Sukamandi dkk (2021), Kota Cirebon memiliki *branding:*

1. Sejarah dan pusat perkembangan Islam, seperti Keraton Kasepuhan, makam Sunan Gunung Jati, dan Goa Sunyaragi.
2. Kesenian Cirebon, seperti Tari Topeng, Sintren, Tarling Gembyung, Teater Cirebonan, dan lukisan kaca.
3. Kaya akan kuliner, seperti Tahu Gejrot, Nasi Jamblang, Nasi Lengko, Empal Gentong, kerupuk besar, dan Kerupuk Melarat.
4. Pasar dan Batik Trusmi yang terkenal dengan motif khasnya, yakni batik mega mendung.

Branding Kota Cirebon sangat berpengaruh terhadap pola kunjungan wisatawan. Maka dari itu, penting untuk memperkuat *branding* Kota Cirebon sebagai kota budaya.

- Pola kunjungan

Pola kunjungan wisatawan pada tempat-tempat wisata di Kota Cirebon dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti aksesibilitas dan kualitas pengalaman. Menurut Dhamayanty dkk (2022), estimasi wisatawan dalam menghabiskan waktu di tempat wisata di Kota Cirebon sebagai berikut

Estimasi Waktu Yang Dihabiskan di Atraksi Wisata

Nama Atraksi	Waktu yang dihabiskan (minimal)	Waktu yang dihabiskan (maksimal)
Keraton Kasepuhan	30 menit	120 menit
Keraton Kacirebonan	30 menit	180 menit
Kawasan Cirebon Heritage	30 menit	180 menit
Gua Sunyaragi	30 menit	120 menit
Makam Sunan Gunung Djati	30 menit	60 menit
Kawasan Batik Trusmi	60 menit	180 menit

Sumber: Dhamayanty dkk (2022)

B. Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional dan Daerah

RIPPARDA harus sesuai dengan kebijakan kepariwisataan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta kebijakan strategis daerah. Kajian ini bertujuan menyesuaikan dokumen perencanaan dengan regulasi yang berlaku dan memastikan konsistensinya. Selain itu, dokumen RIPPARDA harus seusai dengan dokumen

RIPPARPROV Jawa Barat. Pada saat ini dokumen tersebut sudah masuk masa akhir berlakunya, yaitu Tahun 2025. Sehingga RIPPARDA Kota Cirebon harus disesuaikan.

C. Maksimalisasi Potensi Wisata

Kota Cirebon memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan kuliner yang menjadi daya tarik wisata utama. Kajian ini diperlukan untuk menganalisis situasi terkini, seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT) dari sektor pariwisata di kota tersebut.

- Kekayaan budaya Kota Cirebon

  Kekayaan budaya yang terdapat di kota cirebon cenderung bersifat religius dan berbaur dengan budaya keraton yang bercorak kerajaan. Kekayaan budaya tersebut, antara lain, Bubur Syura, Apeman, Siraman Panjang, Tradisi Mauludan, Upacara Panjang Jimat, Sekatenan, dan Grebeg Syawal. Selain kekayaan budaya yang merupakan percampuran dari corak religius masyarakat dan corak kerajaan, terdapat pula kekayaan budaya tarian dan musik yang khas kota cirebon seperti Tarian Panji yang menggunakan topeng putih, Tarian Tumenggung dengan topeng warna violet, Tarian Samba dengan topeng warna kuning, Tari Kelana dengan topeng warna merah, Tari Tayub, Tari Jaran Lumping, Debus, dan juga Tarling.

- Kekayaan Sejarah

  Cirebon berasal dari kata caruban yang berarti percampuran. Sejak zaman dahulu, Kota Cirebon berlokasi sebagai salah satu pusat pelabuhan internasional, Kota Cirebon menjadi tempat persinggahan masyarakat dari berbagai budaya seperti Eropa, Timur Tengah, Cina, dan Afrika. Di mana pada pelabuhan tersebut, aktivitas penyebaran Islam semakin mengalami perkembangan. Hal tersebut menjadi latar belakang terdapatnya akulturasi di Kota Cirebon yang kemudian di buktikan dengan terdapat banyaknya peninggalan yang menunjukkan adanya akulturasi.

  Berdasarkan sejarah perkembangan dari kota cirebon, salah satu jenis pariwisata yang terkenal dari Kota Cirebon adalah wisata budaya yang memiliki hubungan yang erat dengan aspek religi. Objek Wisata tersebut diantaranya adalah Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Peguron Keprabon, Situs Kalijaga, dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa.

- Kekayaan Kuliner

  Selain kekayaan budaya dan sejarah, kekayaan kuliner merupakan bagian dari kebudayaan sehingga keberadaannya harus dijaga serta dilestarikan. Selain untuk melestarikan kebudayaan yang sudah ada, dengan adanya wisata kuliner, hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian di daerah sekitar wisata kuliner. Kekhasan dari kuliner yang ada di Kota Cirebon banyak yang sudah terkenal sampai ke luar kota. Kekayaan Kuliner yang ada di Kota Cirebon yaitu Docang, Empal Gentong, Nasi Jamblang, Tahu Gejrot, Bubur Sop Ayam, Lotek, Gado-gado, dan Mie Koclok. Selain wisata kuliner yang dapat dikunjungi ketika datang ke Kota Cirebon, terdapat juga berbagai macam makanan yang dapat juga makanan khas Kota Cirebon yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh, seperti Manisan, Sumpia Udang, Rangginang, Sirup Tjampolay, Teh Upet, Tape, Kerupuk Melarat, Terasi Udang, serta berbagai macam jenis oleh-oleh lainnya.

D. Peningkatan Daya Saing Wisata

Evaluasi RIPPARDA berfungsi memastikan bahwa pengembangan kepariwisataan mampu meningkatkan daya saing Kota Cirebon dibandingkan daerah lain, baik di tingkat regional maupun nasional.

- Indeks Daya Saing Kota Cirebon

  Indeks Daya Saing Daerah Cirebon memiliki skor IDSD pada angka 3,64 (BRIN, 2023). IDSD Kota Cirebon memiliki angka yang paling unggul dibandingkan daerah di sekitarnya. Dari 12 indikator IDSD, Kota Cirebon memiliki keunggulan dalam indikator SDM Pilar 7 (pasar produk) yang memiliki skor 5,00. Hal ini menandakan bahwa Kota Cirebon memiliki daya saing yang intens pada sektor domestik yang tinggi serta proses produksi yang efisien. Sementara itu, Kota Cirebon memiliki skor IDSD terendah pada pilar 11 (dinamisme bisnis) yang memiliki skor 3,22. Hal ini menandakan bahwa entitas bisnis baru untuk penyerapan tenaga kerja masih mengalami kesulitan secara administratif.

- Posisi pariwisata dalam kontribusi pada IDSD Kota Cirebon

  Pariwisata berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan IDSD. Dalam sektor pasar produk, pariwisata berkontribusi dalam peningkatan dominasi pasar dan persaingan sektor jasa. Sementara itu, dalam sektor dinamisme bisnis, pariwisata berkontribusi

dalam meningkatkan angka indikator biaya untuk memulai usaha dan waktu untuk memulai usaha.

E. Pemanfaatan Teknologi dan Tren Global

Kepariwisataan saat ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi (misalnya, digital tourism) dan tren global. RIPPARDA perlu dievaluasi agar mampu mengakomodasi perubahan ini dalam perencanaan strategis.

Pemanfaatan teknologi yang telah diimplementasikan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan kota cirebon, salah satunya adalah dengan diresmikannya wistakon. Wistakon merupakan sistem informasi berbasis daring berupa *website* dan aplikasi yang komprehensif untuk berwisata di Kota Cirebon karena pada *website* dan aplikasi tersebut terdapat berbagai macam pilihan destinasi wisata baik wisata sejarah, budaya, kuliner, serta rekomendasi pilihan akomodasi dan transportasi sehingga wisatawan yang berkunjung ke Kota Cirebon akan merasakan kemudahan dalam perjalanan wisatanya. Akan tetapi, pada saat ini *website* dan aplikasi Wistakon sudah tidak dapat lagi akses dan digunakan.

Sistem informasi yang sudah diimplementasikan selain Wistakon adalah *website* cirebonkota.go.id yang memberikan informasi terkait rekomendasi berbagai macam wisata kuliner, budaya, penginapan, dan transportasi.

Objek Wisata yang ada Kota Cirebon masih belum dikenal oleh wisatawan domestik maupun internasional, hal ini dilatarbelakangi karena Kurangnya promosi kepariwisataan yang melibatkan sistem informasi seperti *website* yang meyediakan informasi yang lengkap mengenai pariwisata di Kota Cirebon serta minimnya pengetahuan sumber daya manusia terkait bahasa asing sehingga komunikasi dua arah antara masyarakat sekitar dan wisatawan asing (Hoerudin dkk, 2018). Pada tahun 2018, jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 9.790, hal tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 11.558 wisatawan mancanegara di Kota Cirebon.

Penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerjasama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pembangunan kepariwisataan nasional tercermin pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, dan terdiri atas:

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS);
2. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV); dan
3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA).

RIPPAR-KAB/KOTA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

Pemerintah Kota Cirebon telah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon untuk masa pelaksanaan Tahun 2019 sampai dengan 2025. RIPPAR Kota Cirebon Tahun 2019 – 2025 sudah menjadi produk hukum, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Cirebon Tahun 2019-2025.

Jangka waktu RIPPARDA dimulai sejak pengundangan Peraturan Daerah ini hingga Tahun 2025 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Sehingga pada tahun ini adalah masa akhir tahun berlaku RIPPARDA.

Untuk menyusun kembali RIPPARDA periode selanjutnya maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPPARDA periode terdahulu untuk mengidentifikasi kebutuhan sehingga pembangunan dan pengembangan pariwisata Kota Cirebon dapat terus meningkat melalui peningkatan kualitas pariwisata. Selain itu, untuk penyusunan RIPPARDA periode selanjutnya dibutuhkan Analisis situasi terkini untuk memahami dan mengevaluasi kondisi

atau keadaan tertentu dalam suatu lingkungan atau konteks. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi tersebut sehingga dapat diambil tindakan yang sesuai atau strategi yang efektif.

Dengan melakukan kajian ini, diharapkan Kota Cirebon dapat merancang strategi pengembangan pariwisata yang lebih relevan, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bagaimana capaian pembangunan pariwisata Kota Cirebon dibandingkan dengan target-target yang telah ditetapkan dalam RIPPARDA 2019-2025?
2. Bagaimana pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Pariwisata Kota Cirebon berdasarkan RIPPARDA 2019-2025?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kebijakan pariwisata di Kota Cirebon selama masa berlaku RIPPARDA 2019-2025?
4. Strategi apa yang dapat diusulkan untuk meningkatkan pembangunan pariwisata Kota Cirebon sebagai dasar penyusunan RIPPARDA 2026-2045?

1.2 Sasaran

Sasaran dalam kegiatan kajian ini antara lain:

1. Mengevaluasi capaian pembangunan pariwisata berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RIPPARDA 2019-2025
2. Mengevaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Pariwisata Kota Cirebon berdasarkan RIPPARDA 2019-2025
3. Mengindentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program dan kebijakan pariwisata
4. Menyusun rekomendasi strategis sebagai dasar penyusunan RIPPARDA 2026-204

1.3 Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini adalah produk hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2025.

1. Evaluasi capaian pembangunan pariwisata berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RIPPARDA Tahun 2019-2025.
   a. Sasaran: Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
   b. Sasaran: Meningkatnya lama kunjungan wisata
   c. Sasaran: Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
   d. Sasaran: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata
   e. Sasaran: Meningkatnya pendapatan daerah sektor pariwisata
2. Evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Pariwisata Kota Cirebon, meliputi:
   a. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan, meliputi lingkup Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; dan Kelembagaan Pariwisata
   b. Evaluasi kesesuaian Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata meliputi Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata dan Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) dan Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata (KSPP).
   c. Evaluasi pelaksanaan program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan.
3. Kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata dalam:
   a. Pembangunan pariwisata berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RIPPARDA Tahun 2019-2025.
   b. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pariwisata Kota Cirebon
4. Kesimpulan dan rekomendasi strategis berdasarkan hasil penelitian.

1.4 Sistematika Laporan

BAB I Pendahuluan

BAB II Literature Review/ Tinjauan Pusaka

1. Pembangunan Daerah
2. Pariwisata
3. Evaluasi Kebijakan Publik
4. Analisis Situasi

BAB III Gambaran Umum Wilayah

1. Kondisi Geografis Kota Cirebon
2. Kondisi Demografis Kota Cirebon
3. Kondisi Perekonomian Kota Cirebon
4. Kondisi Pariwisata Kota Cirebon
5. Kebijakan Kepariwisataan Kota Cirebon

BAB IV Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

BAB V Hasil dan Pembahasan

Review Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon

1. Evaluasi capaian pembangunan pariwisata berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RIPPARDA Tahun 2019-2025 diserta kendala dan tantangan pembangunan kepariwisataan.
    1. Sasaran: Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
    2. Sasaran: Meningkatnya lama kunjungan wisata
    3. Sasaran: Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
    4. Sasaran: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata
    5. Sasaran: Meningkatnya pendapatan daerah sektor pariwisata
2. Analisis situasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Pariwisata Kota Cirebon, meliputi:
    a. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan, meliputi lingkup Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; dan Kelembagaan Pariwisata
    b. Evaluasi kesesuaian Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata meliputi Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata dan Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) dan Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata (KSPP).
    c. Evaluasi pelaksanaan program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan.

BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Daerah

A. Konsep Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan suatu proses peningkatan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah melalui kebijakan, program, dan strategi yang terarah dan berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020). Konsep ini mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan dalam suatu wilayah tertentu (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024)

Menurut Rondinelli (1983), pembangunan daerah adalah strategi pembangunan yang menitikberatkan pada desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, pembangunan daerah menegaskan pentingnya otonomi daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan pembangunan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan demikian, pembangunan daerah merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah melalui kebijakan, program, dan strategi yang berkelanjutan. Konsep ini mencakup berbagai aspek: ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan (Todaro & Smith, 2020). Di Indonesia, pembangunan daerah menekankan otonomi daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan (UU No. 23/2014).

B. Model Pembangunan Daerah

Dalam praktiknya, pembangunan daerah dapat dikategorikan ke dalam beberapa model, seperti:

1) Model Top-Down vs. Bottom-Up
   - Model Top-Down menekankan pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan sedikit keterlibatan aktor lokal (Rodríguez-Pose & Krøijer, 2009)
   - Model Bottom-Up berfokus pada partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Healey, 1997; Pissourios, 2014).
2) Model Klaster Ekonomi (Economic Clusters)

- Dikembangkan oleh Porter (1990), model ini berorientasi pada pengembangan sektor industri tertentu yang dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas daerah (Swords, 2013).

3) Model Pembangunan Berkelanjutan
   - Berbasis pada konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Sachs, 2015).

Pembangunan daerah memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta strategi yang terencana dengan baik. Dengan memahami teori-teori dasar serta tantangan yang ada, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Kepariwisataan

a. Pembangunan Destinasi Pariwisata

Destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih, wilayah administrative, yang didalamnya terdapat daya tarik wisata. Terdapat fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. (Undang-undang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009)

b. Pembangunan Industri Pariwisata

Pembangunan industri pariwisata merupakan konsep yang memiliki banyak sisi yang melibatkan peningkatan dan inovasi berkelanjutan atas produk, layanan, dan pengalaman yang ditawarkan kepada wisatawan. Hal ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang.

c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pembangunan pemasaran pariwisata melibatkan strategi terkoordinasi oleh sektor swasta dan publik untuk secara optimal memenuhi kebutuhan kelompok wisatawan yang dapat diidentifikasi sambil mencapai keuntungan yang sesuai. Ini adalah proses sistematis yang difokuskan pada segmen pasar tertentu dan berdasarkan pada keuntungan investasi yang substansial

d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

Pembangunan kelembagaan pariwisata melibatkan pembentukan dan peningkatan kerangka kerja yang mengatur pasar pariwisata, termasuk peraturan, organisasi, dan norma. Ini mencakup unsur-unsur formal seperti undang-undang, kebijakan, dan badan administratif, di samping aspek informal seperti norma sosial, budaya bisnis, dan standar etika.

2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

A. Konsep dan Definisi Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2017). Evaluasi ini penting untuk memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan guna perbaikan kebijakan di masa depan.

Evaluasi kebijakan mencakup analisis hasil, dampak, dan implementasi kebijakan dalam berbagai konteks (Patton et al., 2015). Di Indonesia, evaluasi kebijakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang menggarisbawahi pentingnya data yang akurat dan terintegrasi dalam evaluasi kebijakan, khususnya dalam penerapan Satu Data Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia).

Terdapat empat karakteristik pokok dari kegiatan evaluasi (Rantung, 2024), yaitu:

1) Berfokus pada nilai. Kegiatan evaluasi kebijakan difokuskan pada keterpenuhan kepentingan atau manfaat dari suatu kebijakan. Kegiatan evaluasi tidak sekedar mengumpulkan infomrasi tentang apakah seluruh tindakan telah dilaksanakan dan hasil dari suatu kebijakan, tetapi juga mencakup ketercapaian sasaran dan tujuan kebijakan;
2) Interdependensi antara fakta dan nilai. Untuk menyatakan bahwa sebuah kebijakan telah mencapai tujuan optimal, kegiatan evaluasi membutuhkan fakta-fakta yang memadai yang menjelaskan bahwa hasil-hasil yang telah dicapai benar-benar merupakan akibat dari dilakukannya Tindakan kebijakan.
3) Berorientasi pada masa kini dan lampau. Berbeda halnya dengan rekomendasi kebiajkan, evaluasi kebijakan diarahkan pada tuntutan-tuntutan masa kini dan masa lalu.
4) Bernilai ganda. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan evaluasi kebijakan mempunyai kualitas ganda, di satu sisi dipandang sebagai tujuan, dan di sisi yang lain dapat dipandang sebagai cara.

B. Jenis-jenis Evaluasi Kebijakan Publik

Beberapa jenis evaluasi kebijakan publik yang umum meliputi:

1) Evaluasi Formatif
   - Evaluasi formatif atau juga disebut evaluasi *on-going* bertujuan untuk memberikan umpan balik selama berlangsungnya implementasi kebijakan guna melakukan perbaikan jika diperlukan. Evaluasi ini fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan. Contohnya, evaluasi proses dapat melibatkan analisis aliran kerja, koordinasi antaragen, dan resiko yang dihadapi selama implementasi (Stufflebeam & Coryn, 2014).
2) Evaluasi Sumatif
   - Evaluasi sumatif atau disebut juga sebagai evaluasi dampak atau *Ex Post Evaluation* atau *Impact Evaluation* dilakukan setelah kebijakan diimplementasikan untuk mengukur dampak dan keberhasilannya Fokus pada hasil akhir suatu kebijakan. Misalnya, evaluasi impak melibatkan penilaian dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan (Stufflebeam & Coryn, 2014).
3) *Cost-Benefit Analysis* (CBA) dan *Cost-Effectiveness Analysis* (CEA)
   - CBA adalah evaluasi yang sistematis untuk menilai semua biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak ekonomi dari suatu keputusan dengan mengonversi semua efek menjadi nilai moneter. CBA sangat berguna bagi pengambil keputusan karena memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif yang dapat membantu dalam perbandingan antar opsi kebijakan. Jika hasil CBA menunjukkan bahwa manfaat melebihi biaya, maka kebijakan tersebut dianggap efisien dan layak untuk diterapkan (Boardman et al., 2018). Di sisi lain, CEA adalah metode evaluasi yang digunakan untuk membandingkan biaya relatif dari berbagai intervensi atau program dalam mencapai hasil tertentu, tanpa mengonversi hasil tersebut menjadi nilai moneter. CEA lebih fokus pada efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu (Jetha, 2017).

C. Cakupan Evaluasi Kebijakan

Cakupan evaluasi mencakup beberapa aspek penting (Patton et al., 2015), yaitu:

1) Evaluasi Perumusan Kebijakan: Menilai apakah formulasi kebijakan telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan.
2) Evaluasi Implementasi Kebijakan: Mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.
3) Evaluasi Kinerja Kebijakan: Menilai sejauh mana tujuan dari kebijakan tersebut tercapai.
4) Evaluasi Lingkungan Kebijakan: Menganalisis faktor eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi dan hasil dari kebijakan.

D. Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- Ketersediaan Data dan Informasi: Data yang valid dan reliabel sangat penting dalam menghasilkan evaluasi yang akurat (Bardach & Patashnik, 2019).
- Komitmen Politik: Keberhasilan evaluasi bergantung pada dukungan dari aktor politik dan birokrasi (Howlett et al., 2020).
- Kapasitas Kelembagaan: Organisasi yang memiliki sumber daya dan kapasitas teknis yang memadai lebih mampu melakukan evaluasi kebijakan secara efektif (Peters, 2015a, 2015b).
- Partisipasi Publik: Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi meningkatkan legitimasi dan efektivitas hasil evaluasi (Fung, 2006).

2.4 Analisis Situasi

A. Konsep dan Definisi Analisis Situasi

Analisis situasi adalah proses sistematis dalam menilai kondisi, tantangan, dan peluang suatu lingkungan atau konteks tertentu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (Bryson, 2018). Analisis ini sering digunakan dalam kebijakan publik, perencanaan strategis, dan riset sosial untuk memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu fenomena.

Menurut Bryson (2018), analisis situasi mencakup identifikasi pemangku kepentingan, penilaian lingkungan internal dan eksternal, serta perumusan strategi berbasis data yang tersedia. Analisis situasi melibatkan pengumpulan dan studi data untuk memahami

masalah yang ada, orang-orang yang terpengaruh, serta konteks sosial, ekonomi, dan politik di mana masalah tersebut muncul.

Analisis situasi menciptakan peta analitik dari proses sosial dan hubungan yang diidentifikasi melalui teori dasar, memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas situasi dengan lebih baik (Clarke et al., 2022). Di Indonesia, analisis situasi banyak diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kekuatan dari analisis situasi terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi hubungan kompleks antara berbagai elemen yang mempengaruhi suatu fenomena. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, seperti waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun analisis situasi memberikan wawasan berharga, proses map-making dan pengkodean data bisa menjadi tantangan dalam studi berskala besar (Martin et al., 2016).

B. Teori dan Pendekatan dalam Analisis Situasi

Beberapa teori yang mendasari analisis situasi meliputi:

- Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu kebijakan atau organisasi (Gürel & Tat, 2017).
- Pendekatan Sistemik yang menyoroti hubungan kompleks antarvariabel dalam suatu sistem untuk memahami dinamika kebijakan dan lingkungan strategis (Meadows, 2008).
- Multiple Stream Framework yang menganalisis proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam konteks penetapan agenda. Kerangka kerja ini menekankan kompleksitas dan ketidakpastian dalam pengembangan kebijakan, dengan mengidentifikasi tiga arus utama yang saling berinteraksi: arus masalah, arus kebijakan, dan arus politik (Hoefer, 2022; Kingdon, 2014).

C. Metode Analisis Situasi

Beberapa metode yang umum digunakan dalam analisis situasi meliputi:

1. Analisis Data Sekunder

- Menggunakan data dari laporan pemerintah, organisasi internasional, dan penelitian akademik untuk memahami kondisi yang ada (Yin, 2018).

2. Focus Group Discussion (FGD)
   - Digunakan untuk menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan dalam memahami masalah dan peluang suatu kebijakan (Krueger & Casey, 2014).
3. Survei dan Wawancara Mendalam
   - Digunakan untuk mendapatkan wawasan langsung dari responden terkait isu yang sedang diteliti (Dillman et al., 2014).

D. Faktor yang Mempengaruhi Analisis Situasi

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas analisis situasi antara lain :

- Ketersediaan dan Keakuratan Data: Data yang valid dan reliabel sangat penting dalam menghasilkan analisis yang akurat (Bardach & Patashnik, 2019).
- Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Partisipasi berbagai aktor dapat meningkatkan kualitas dan relevansi analisis situasi (Fung, 2006).
- Konteks Politik dan Ekonomi: Faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi hasil analisis (Howlett et al., 2020)

Kapabilitas Analitis: Kemampuan tim analisis dalam mengolah dan menafsirkan data juga menjadi faktor kunci dalam menghasilkan analisis yang berkualitas (Peters, 2015a, 2015b).

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA CIREBON

3.1 Kondisi Geografis Kota Cirebon

Secara geografis Kota Cirebon terletak pada posisi 108,33◦ Bujur Timur dan 6,41◦ Lintang Selatan pada Pantai Utara Pulau Jawa, di bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur ± 8 km, utara selatan ± 11 km. Kota Cirebon berada di jalur pantai utara Pulau Jawa. Lokasinya yang strategis menjadikannya sebagai jalur distribusi perekonomian bagi wilayah disekitarnya yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, bahkan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kota Cirebon dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- Sebelah Timur : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga
- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal

Secara administratif, Kota Cirebon memiliki luas wilayah ± 39,4403 km2 atau ± 3.944,03 hektar yang terbagi menjadi 5 kecamatan, 22 kelurahan, 248 Rukun Warga (RW), dan 1.369 Rukun Tetangga (RT), adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Wilayah Administrasi Kota Cirebon

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Nama Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Harjamukti	17,62	1. Argasunya 2. Kalijaga 3. Harjamukti 4. Kecapi 5. Larangan	76	454
2.	Lemahwungkuk	7,19	1. Pegambiran 2. Kesepuhan 3. Lemahwungkuk 4. Panjunan	42	232
3.	Pekalipan	1,59	1. Pekalipan 2. Pulasaren 3. Jagasatru 4. Pekalangan	39	186
4.	Kesambi	8,66	1. Karyamulya 2. Sunyaragi 3. Drajat	55	307

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Nama Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
			4. Kesambi 5. Pekiringan		
5.	Kejaksan	4,45	1. Kejaksan 2. Sukapura 3. Kebonbaru 4. Kesenden	35	183
Jumlah		39,48	22 Kelurahan	248 RW	1.369 RT

Sumber: Kota Cirebon dalam Angka Tahun 2024, BPS.

3.2 Kondisi Demografis Kota Cirebon

Jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2023 sebesar 341.980 jiwa. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Dari total jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 171.638 jiwa dan 170.342 jiwa untuk penduduk perempuan. Penduduk Kota Cirebon tersebar di lima kecamatan, kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pekalipan sebesar 18.689 jiwa/km², terpadat kedua adalah Kecamatan Kejaksan 10,487 jiwa/km², kemudian diikuti Kecamatan Kesambi 9.052 jiwa/km², Kecamatan Lemahwungkuk 8.158 jiwa/km², dan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Harjamukti hampir 7.308 jiwa/km². Kepadatan penduduk antar wilayah kecamatan belum merata. Kepadatan penduduk Kota Cirebon setiap km² sebesar 8.662,11 jiwa.

3.3 Kondisi Perekonomian Kota Cirebon

Kondisi perekonomian Kota Cirebon akan dijelaskan dalam beberapa aspek, yaitu aspek struktur ekonomi, aspek pertumbuhan ekonomi, aspek pengeluaran konsumsi, dan aspek laju inflasi dengan penjelasan sebagai berikut.

A. Struktur Ekonomi

Tahun 2023 mengalami berbagai tantangan ekonomi global, termasuk inflasi yang tinggi, suku bunga yang meningkat, dan ketegangan geopolitik. Faktor-faktor ini telah memberikan dampak signifikan pada aspek produksi di berbagai negara. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022. Hal ini terindikasi dari penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) global. Bahkan,

beberapa negara mengalami resesi, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Eropa.

Perlambatan perekonomian global berdampak pada melambatnya perekonomian nasional, hal itu dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang pada Tahun 2022 mampu tumbuh 5,31 persen, namun pada Tahun 2023 hanya mampu tumbuh sebesar 5,05 persen. Akibat dari perlambatan perekonomian nasional, Provinsi Jawa Barat sebagai penyumbang ketiga terbesar kue ekonomi nasional menerima efeknya sehingga laju pertumbuhan ekonominya melambat dari 5,45 persen pada Tahun 2022, namun tumbuh sebesar 5,00 persen pada Tahun 2023 ini. Perlambatan ekonomi pada tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. Fenomena ini diindikasikan memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi Kota Cirebon, sehingga laju pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 5,01 persen. Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,10 persen.

Nilai PDRB Kota Cirebon secara nominal pada tahun 2023 sebesar 28,77 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 2,15 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 26,62 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB nominal tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya volume produksi, namun juga oleh kenaikan harga-harga. Secara riil berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Cirebon juga mengalami peningkatan dari 18,03 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 18,93 triliun rupiah pada tahun 2023. Peningkatan sebesar 0,90 triliun pada nilai PDRB ini membuat perekonomian Kota Cirebon mampu tumbuh sebesar 5,01 persen. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2019-2023

Ket.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	78.421,95	80.127,54	83.115,33	89.956,39	93.062,82
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	2.367.704,52	2.389.973,95	2.555.487,68	2.760.213,28	3.004.388,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	143.703,38	137.601,36	143.147,26	155.038,00	170.673,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	69.002,00	71.476,50	78.026,57	84.221,93	85.665,46

Ket.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
	Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	2.342.529,16	2.215.655,76	2.294.720,09	2.389.387,13	2.530.795,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.387.745,60	6.967.959,03	7.268.148,68	7.659.166,53	8.135.604,66
H	Transportasi dan Pergudangan	2.717.153,05	2.691.380,16	2.809.208,18	3.519.334,49	4.152.860,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.263.071,98	1.196.115,57	1.277.319,77	1.488.479,73	1.678.458,66
J	Informasi dan Komunikasi	1.104.658,87	1.478.487,25	1.502.264,45	1.549.278,37	1.656.083,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.651.868,57	2.744.633,22	2.908.078,56	3.148.562,83	3.213.721,68
L	Real Estat	217.443,21	217.547,13	245.169,52	267.686,46	300.047,27
M,N	Jasa Perusahaan	219.134,42	196.610,98	210.543,52	225.123,17	235.087,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	923.399,23	858.282,88	859.045,65	844.102,13	871.957,77
P	Jasa Pendidikan	902.915,65	1.006.720,75	1.047.673,54	1.132.297,74	1.218.881,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	541.440,48	611.288,13	633.275,42	679.380,24	736.050,22
R,S,T,U	Jasa Lainnya	561.611,38	564.931,84	591.369,83	625.613,58	689.255,19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUT		23.491.803,45	23.428.792,05	24.506.594,05	26.617.841,99	28.772.593,53

*) Angka Sementara
*) Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon (2024)

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Struktur perekonomian Kota Cirebon selama lima tahun terakhir (2019-2023) didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Industri Pengolahan serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Cirebon. Secara bersama-sama

kelima lapangan usaha tersebut pada tahun 2023 memegang peranan sekitar 73,12 persen, sedangkan dua belas lapangan usaha yang lainnya berperan sekitar 26,88 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Cirebon pada tahun 2023 berasal dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yang mencapai 8.135.604,66 (28,28%), kemudian peran terbesar kedua ialah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 4.152.860,95 (14,43%) dan urutan ketiga adalah lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi dengan peran sebesar 3.213.721,68 (11,17%). Selain itu Industri Pengolahan dan Konstruksi masing masing berkontribusi sebesar 3.004.388,57 (10,44%) dan 2.530.795,13 (8,80%) dalam membentuk PDRB Kota Cirebon pada tahun 2023. Lapangan usaha Transportasi dan pergudangan di Tahun 2023 ini mengalami peningkatan peranan sebesar 1,21 persen dibanding Tahun 2022 yang senilai 13,22 persen. Telah diselesaikannya proyek jalan Tol Cisumdawu membuat transportasi darat semakin singkat untuk dilalui sehingga kembali menjadi pilihan masyarakat.

Posisi peringkat lima besar peranan lapangan usaha terhadap perekonomian Kota Cirebon pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun perubahan absolut peranan masing-masing lapangan usaha selama 2023 terhadap 2022 adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor turun 0,50 poin; Transportasi dan Pergudangan naik 1,21 poin; Jasa Keuangan dan Asuransi turun 0,66 poin; Industri Pengolahan turun 0,07 poin serta Konstruksi turun 0,18 poin. Pada lapangan usaha lainnya di luar lima besar tersebut kenaikan peranan tertinggi dialami oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasisebesar 0,16 poin, sedangkan penurunan peranan tertinggi dialami oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang turun 0,14 poin.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Melambatnya pekonomian nasional dan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 terindikasi berpengaruh juga terhadap kinerja ekonomi Kota Cirebon secara umum.

Pada tahun 2023 kota Cirebon mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan rincian sebagai berikut:

Sumber: BPS Kota Cirebon (2023)

Gambar 3. 1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (%)

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; Real Estate; dan Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan angka pertumbuhan berturut-turut 9,99 persen; 9,22 persen; dan 8,92 persen. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran paling dominan dalam perekonomian Kota Cirebon mengalami pertumbuhan sebesar 2,25 persen. Beberapa lapangan usaha mampu tumbuh di atas 5 persen diantaranya adalah Industri pengolahan sebesar 8,26 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,63 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 6,83 persen, Jasa Pendidkan sebesar 5,42 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,79 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 7,62 persen.

Sementara itu, Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami kontraksi masing-

masing dengan nilai pertumbuhan -1,33 persen; dan -1,34 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon Tahun 2023 dari sisi produksi yang cukup tinggi berasal dari lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,13 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 0,85 persen. Sedangkan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolan Sampah, Limbah dan Daur Ulang menghasilkan sumber pertumbuhan terendah dengan nilai negatif 0,004 persen.

C. Pengeluaran Konsumsi Akhir

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir di Kota Cirebon meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 3. 3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Kota Cirebon Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
Konsumsi Akhir (*Miliar Rp*)					
A. Rumah Tangga	13.038,96	13.072,95	13.576,99	14.900,80	16.266,31
B. LNPRT	467,10	462,07	474,77	509,87	548,83
C. Pemerintah	2.773,18	2.802,97	2.836,37	2.863,06	3.016,56
Jumlah	16.279,24	16.337,99	16.888,13	18.273,73	19.831,70
PDRB (ADHB)	23.491,80	23.428,79	24.506,59	26.617,84	28.772,59
Proporsi	69,30	69,73	68,91	68,65	68,93

*) Angka Sementara
*) Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon (2024)

Proporsi total konsumsi akhir yang dilakukan oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah sebesar 68,93 persen pada tahun 2023. Konsumsi akhir sebagian besar dilakukan oleh rumah tangga kemudian diikuti oleh konsumsi pemerintah, dan terakhir dilakukan oleh konsumsi LNPRT. Perkembangan nilai konsumsi akhir setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, namun proporsinya terhadap PDRB berfluktuasi pada kisaran nilai 68 persen hingga 69 persen. Tahun 2019 proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB sebesar 69,30 persen, meningkat menjadi 69,73 persen di tahun 2020, namun menurun menjadi

68,91 persen di tahun 2021, menurun kembali di tahun 2022 menjadi 68,65 persen, namun nilai proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB kembali meningkat menjadi 68,93 persen di tahun 2023.

D. Laju Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Oktober 2024 secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Cirebon, pada Oktober 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 0,88 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,54 pada September 2024 menjadi 104,61 pada Oktober 2024. Tingkat inflasi m-to-m dan tingkat inflasi y-to-d masing-masing sebesar 0,07 persen dan 0,49 persen. Berikut tabel IHK dan Tingkat Inflasi Oktober 2024 menurut Kelompok Pengeluaran:

Tabel 3. 4 Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Tingkat Inflasi Kota Cirebon Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Oktober 2023	IHK Desember 2023	IHK Oktober 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Oktober 2024 1) (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Oktober 2024 2) (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Oktober 2024 3) (%)	Andil Inflasi m-to-m Oktober 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Oktober 2024 (%)
Umum (Headline)	103,70	104,10	104,61	0,07	0,49	0,88	0,0700	0,8800
Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,44	105,64	105,19	0,38	-0,43	0,72	0,1200	0,2200
Pakaian dan Alas Kaki	101,29	101,74	104,41	0,01	2,62	3,08	0,0000	0,1000
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,37	103,37	103,82	0,00	0,44	0,44	0,0000	0,0800
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	100,69	100,91	102,61	-0,06	1,68	1,91	0,0000	0,0900
Kesehatan	101,42	101,45	101,68	-0,04	0,23	0,26	0,0000	0,0100
Transportasi	110,31	110,09	109,94	-0,60	-0,14	-0,34	-0,0600	-0,0400
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,18	100,17	100,13	-0,06	-0,04	-0,05	0,0000	0,0000
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,61	102,61	103,64	0,08	1,00	1,00	0,0000	0,0100
Pendidikan	102,23	102,23	103,98	0,00	1,71	1,71	0,0000	0,0900
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	101,61	101,70	102,94	0,07	1,22	1,31	0,0100	0,2000
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104,48	104,70	107,5	-0,03	2,63	2,84	0,0000	0,1200

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon (2024))

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,72 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,08 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,44 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,91 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,26 persen; kelompok transportasi sebesar -0,34 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,05 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,00 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,71 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,31 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,84 persen.

Komoditas yang dominan (15 terbesar) memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Oktober 2024, antara lain: sigaret kretek mesin (SKM), telur ayam ras, sigaret putih mesin (SPM), sewa rumah, upah asisten rumah tangga, mie, akademi/perguruan tinggi, mobil, pemeliharaan/service, roti manis, jeruk, daging ayam ras, melon, gula pasir, dan batagor, sedangkan 15 komoditas yang memberikan andil/sumbangan terbesar deflasi y-on-y, antara lain: cabai merah, bensin, tomat, udang basah, wortel, buah naga, daun bawang, pepaya, cabai rawit, tempe, labu siam/jipang, cabai hijau, pisang, jagung manis, dan pembersih lantai.

Sementara komoditas yang dominan (15 terbesar) memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Oktober 2024, antara lain: daging ayam ras, bawang merah, jeruk, beras, nasi dengan lauk, pindang asin, telur ayam ras, salak, sigaret putih mesin (spm), buncis, kacang panjang, sabun wajah, sawi putih/pecay/pitsai, kemiri, dan pakcoy/pokcoy/bokcoy, sedangkan 15 komoditas yang memberikan andil/sumbangan terbesar deflasi m-to-m, antara lain: bensin, kentang, pepaya, cabai hijau, daun bawang, cabai merah, cabai rawit, teh, daging sapi, buah naga, ikan mujair, popok bayi sekali pakai/diapers, lada/merica, ketimun, dan wortel.

Pada Oktober 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,22 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,09 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok transportasi sebesar -0,04 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan

jasa keuangan sebesar 0,00 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,09 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,20 persen serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,12 persen.

3.4 Kondisi Pariwisata Kota Cirebon

Kota Cirebon, yang dikenal dengan sejarahnya yang kaya dan budayanya yang unik, menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik di Jawa Barat. Kota ini terletak di pantai barat Jawa dan memiliki berbagai objek wisata yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Beberapa destinasi wisata di Kota Cirebon antara lain:

a. Keraton Kasepuhan: Keraton Kasepuhan berdiri sejak tahun 1529, menjadi pusat sejarah dan budaya Cirebon. Keraton ini memiliki arsitektur yang memadukan unsur-unsur Jawa, Sunda, Tiongkok, dan Eropa dan terdapat museum peninggalan kerajaan.
b. Keraton Kanoman: Keraton Kanoman yang memiliki arsitektur yang indah dengan pengaruh gaya Tiongkok dan Eropa. Keraton Kanoman juga menjadi pusat kegiatan budaya dan adat istiadat Cirebon.
c. Keraton Kacirebonan : Keraton Kacirebonan menjadi pusat budaya dan seni tradisional, dengan berbagai kegiatan seperti tari topeng dan gamelan. Arsitektur keraton ini memadukan unsur-unsur tradisional Cirebon dengan sentuhan kolonial.
d. Keraton Keprabonan: Keraton Keprabon memiliki arsitektur yang khas dengan ukiran-ukiran kayu dan ornamen tradisional Cirebon. Meskipun ukurannya lebih kecil, Keraton Keprabonan memiliki nilai historis penting dan menjadi destinasi wisata budaya.
e. Masjid Agung Sang Cipta Rasa: Masjid besar yang terkenal dengan arsitektur indah dan sejarah panjangnya.
f. Goa Sunyaragi: Destinasi wisata alam yang menarik dengan pesona alam dan misteri sejarahnya.
g. Pantai Kejawanan: Pantai yang indah dengan keindahan laut yang mempesona.
h. Wisata Belanja Pasar Kanoman: Pasar tradisional yang terkenal dengan berbagai produk khas Cirebon.

Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 4,05 juta orang, melebihi target awal sebesar 2,3 juta pengunjung. Data ini mencakup wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Kota Cirebon.

Meski menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan kebutuhan infrastruktur, Kota Cirebon memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Kota Cirebon optimis dapat terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.

Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2025, disebutkan bahwa Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cirebon adalah "Terwujudnya Kota Cirebon sebagai destinasi wisata berkelas dunia, yang terintegrasi, berkelanjutan, serta berbasis sejarah dan budaya daerah". Dalam pencapaian visi tersebut, Misi pembangunan kepariwisataan daerah yang dilakukan antara lain:

a. Membangun destinasi pariwisata berkelas dunia yang mengintegrasikan kekayaan potensi sejarah dan budaya khas Cirebon dan berdaya saing global;
b. Membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan terintegrasi, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan budaya dalam menghadapi persaingan global;
c. Meningkatkan upaya pemasaran pariwisata yang terpadu antar daerah, efektif dan efisien, serta bertanggung jawab dalam membangun citra pariwisata Kota Cirebon berkelas dunia; dan
d. Membangun kelembagaan kepariwisataan yang mampu meningkatkan integrasi pembangunan kepariwisataan di Kota Cirebon dan sekitarnya dan menciptakan sumber daya manusia yang berkompetensi internasional.

Bila melihat lebih jauh dalam Perda Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 terkait Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata di Kota Cirebon Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata; dan Rencana Kawasan Perencanaan Pariwisata (KPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Dalam Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata di Kota Cirebon terdiri dari :

a. Pusat pelayanan primer kota yang berfungsi sebagai pintu gerbang kota, pusat penyediaan fasilitas pariwisata, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah kota, meliputi kawasan Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Keraton Keprabonan, Kawasan Pecinan dan Kampung Arab;

b. Pusat pelayanan sekunder kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu meliputi kawasan Taman Gua Sunyaragi, Situs Taman Kera Kalijaga, Wisata Buatan Cirebon Water Land, Kawasan Pantai Kejawanan, Wisata Kuliner dan Belanja, Wisata Bahari Terpadu Pantai Kesenden, dan Wisata Ekowisata Kawasan Argasunya; dan
c. Seluruh jaringan jalan kota yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan dengan kawasankawasan pariwisata kota.

Kawasan Pusaka Kota Cirebon meliputi :

a. Kawasan Pusaka Keraton-keraton Cirebon yang terletak di Kecamatan Lemahwungkuk dan Kecamatan Pekalipan meliputi Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan dan Keraton Kaprabonan;
b. Kawasan Pusaka Taman Air Gua Sunyaragi di Kecamatan Kesambi;
c. Kawasan Pusaka dengan karakteristik Arsitektur kolonial di Kecamatan Lemahwungkuk (sekitar Pelabuhan dan Jl. Yos Sudarso) dan Kecamatan Kejaksan (Jl. Siliwangi dan sekitarnya);
d. Kawasan Pusaka dengan karakteristik Pecinan di Kelurahan Lemahwungkuk (Jl. Lemahwungkuk, Jl. Kanoman, Jl. Winaon, Jl. Pasuketan, dan Jl. Pekiringan);
e. Kawasan Pusaka dengan karakteristik etnis Arab di Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk (sekitar Masjid Merah Panjunan);
f. Kawasan Pusaka dengan karakteristik masyarakat pesisir di sepanjang garis pantai Kota Cirebon (Kampung Nelayan Kejawanan, Cangkol, Samadikun, dan pesisir);
g. Kawasan Pusaka dengan karakteristik lingkungan pesantren tradisional Benda Kerep di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti; dan
h. Kawasan Pusaka Cagar Budaya Petilasan Kalijaga di Kecamatan Harjamukti dengan lingkungan sekitarnya berupa pepohonan dengan habitat kera didalamnya.

Pengembangan Klaster Perwilayahan Pariwisata meliputi :

a. Klaster wisata budaya dengan daya tarik utama Keraton Kasepuhan;
b. Klaster wisata buatan dengan daya tarik utama Cirebon Water Land;
c. Klaster wisata Pesisir dengan daya tarik utama Pantai Kejawanan;
d. Klaster wisata sejarah dengan daya tarik utama Kawasan Kampung Pecinan;
e. Klaster Kuliner dengan daya tarik utama makanan khas;

f. Klaster belanja dengan daya tarik utama pasar tradisional dan mall; dan
g. Klaster ekonomi kreatif dengan daya tarik utama kerajinan topeng dan lukisan kaca.

3.5 Kebijakan Kepariwisataan Kota Cirebon

Kebijakan Pariwisata Kota Cirebon mempedomani pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Berdasarkan Undang-undang tersebut, disebutkan tujuan dan prinsip kepariwisataan yaitu dalam rangka peningkatan ekonomi dan pelestarian budaya dan lingkungan. Dengan adanya peningkatan ekonomi melalui pengembangan pariwisata, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran melalui pengembangan sektor pariwisata. Sedangkan berkaitan dengan pelestarian budaya dan lingkungan, kepariwisataan juga bertujuan untuk melestarikan alam, lingkungan, dan budaya, serta memperkuat jati diri bangsa.

Upaya pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan, memerlukan suatu rencana pembangunan yang matang. Pengembangan pariwisata harus dilakukan secara sistematis dan terencana melalui rencana induk pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Demikian pula dengan kawasan strategis, perlu penetapan kawasan strategis untuk pariwisata dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada daya tarik wisata yang unik. Secara umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 berfungsi sebagai kerangka hukum yang mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia dengan pendekatan yang berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Rencana induk pembangunan kepariwisataan tersebut terdiri dari: Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Di Kota Cirebon, sudah terdapat peraturan daerah terkait pengembangan kepariwisataan yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2025 serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Perangkat Daerah teknis pelaksana pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata di Kota Cirebon adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon. Berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Cirebon, yang mempuyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Sedangkan fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pemerintahan pelaksanaan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang kebudayaan, dan pariwisata;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perda Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2025 mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, asas visi dan misi, tugas dan sasaran, kebijakan dan strategis pembangunan kepariwisataan, rencana pengembangan perwilayahan pariwisata, program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan, pengawasan dan pengendalian , dan ketentuan penutup. Perda Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan mengatur tentang ketentuan umum, pembangunan kepariwisataan, usaha pariwisata, penyelenggaraan, usaha pariwisata, kewajiban dan larangan, peran serta masarakat, badan promosi pariwisata daerah, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana , ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Berkaitan dengan fokus kajian ini, maka penjelasan mendalam terkait Perda Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2025. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota

Cirebon yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Maksud dibentuknya RIPPARDA adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan. (2) Tujuan dibentuknya RIPPARDA adalah menjadi pedoman dalam perencanaan detail pembangunan pariwisata dan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah. RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha dan masyarakat.

Tujuan pembangunan kepariwisataan Kota Cirebon meliputi :

a. Mewujudkan pariwisata Kota Cirebon sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia berlandaskan sejarah dan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal;
b. Meningkatkan daya saing melalui pembangunan dan pengembangan pariwisatabuatan dan industri kreatif khas Cirebon;
c. Mewujudkan industri pariwisata Kota Cirebon yang berwawasan lingkungan dan mendukung aksesibilitas serta kebutuhan wisatawan;
d. Mewujudkan sinergitas kemitraan antara industri pariwisata mikro, kecil, menengah, dan besar di sekitar wilayah Kota Cirebon dalam pengembangan produksi dan distribusi berbasis lokal, serta memperkuat jejaring industri di tingkat nasional dan internasional;
e. Mewujudkan sistem pemasaran pariwisata terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kerjasama nasional dan internasional untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
f. Meningkatkan peran pemangku kepentingan terkait kepariwisataan, serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata terpadu dan berkelanjutan; dan
g. Mendorong pemberian insentif dan disinsentif kepada pemangku kepentingan yang mendukung pembangunan kepariwisataan Kota Cirebon.

Sasaran pembangunan kepariwisataan Kota Cirebon terdiri dari :

a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara;
b. Meningkatnya kontribusi sektor usaha pariwisata terhadap produk domestik regional bruto;
c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata; dan
d. Meningkatnya pendapatan daerah sektor pariwisata.

Berdasarkan Perda Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019, Pembangunan kepariwisataan di Kota Cirebon terdapat 4 (empat) ruang lingkup meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Selanjutnya kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Kota Cirebon tahun 2019-2025 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 5 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon Tahun 2019-2025

Kebijakan	Strategi
1. PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA	
1. Mewujudkan daya tarik obyek wisata di Kota Cirebon berdasarkan penguatan tata kelola karakteristik produk pariwisata dan perwilayahannya	1. Membangun destinasi pariwisata Kota Cirebon terpadu, berkualitas, dan dikenal luas
2. Mewujudkan struktur perwilayahan pariwisata Kota Cirebon diarahkan untuk menghubungkan antara satu obyek wisata dengan obyek wisata lainnya didalam Kota Cirebon serta dengan wilayah sekitar	2. Menetapkan dan mengembangkan daya tarik obyek-obyek wisata yang menunjukkan keragaman daya tarik wisata sesuai karakteristik yang ada.
3. Mewujudkan KSP dan KPP di Kota Cirebon	3. Mengembangkan investasi yang berpihak pada masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi pariwisata;
4. Meningkatkan aktivitas kesenian, kerajinan, kebudayaan Kota Cirebon yang mendukung tema produk utama kawasan di dalam klaster sebagai generator kegiatan kepariwisataan	4. Membentuk KSP Sejarah dan Budaya, serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon
5. Integrasi antara kebijakan ketataruangan baik di level makro, meso maupun mikro	5. Menguatkan peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di KSP Kota Cirebon
6. Memanfaatkan kawasan sepanjang pantai kesenden dan kejawanan sebagai tempat pengembangan wisata bahari terpadu, dan pemanfaatan bekas galian C sebagai area ekowisata	6. Meningkatkan keterhubungan destinasi dalam pengembangan perwilayahan pariwisata Kota Cirebon melalui pengembangan jalur-jalur beraksesibilitas tinggi
7. Kebijakan pengembangan produk unggulan Kota Cirebon berupa produk wisata kuliner dan belanja	7. Mengembangkan fasilitas umum sebagai tempat wisata pendukung seperti kawasan BAT, Kawasan Stadion Bima, Taman dan Alun-alun, *Main Street* dan Shopping Street, Sky Walk/Sky Bridge
	8. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu disepanjang Pantai Kesenden dan

Kebijakan	Strategi
	Kejawanan yang bernuansa sejarah dan budaya 9. Menguatkan tata kelola wisata keraton dan klaster pendukung lainnya untuk meningkatkan image tradisi dan sejarah
2. PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA	
1. Mengembangkan produk wisata Kota Cirebon diarahkan untuk memperkuat tema utama kawasan dan memberikan manfaat bagi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat 2. Mengembangkan objek dan daya tarik wisata lain di dalam kawasan untuk mendukung tema wisata yang sudah dirumuskan 3. Mengembangkan produk wisata yang khas, unik dan berdaya saing serta mendukung upaya konservasi, preservasi, dan rehabilitasi serta pemberdayaan masyaraka 4. Meningkatkan efisiensi kinerja jaringan transportasi eksisting dan skenario pengembangan transportasi di Kota Cirebon melalui pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada baik kuantitas maupun kualitasnya dalam menunjang pariwisata 5. Mendorong pembangunan infrastruktur kawasan dengan pemerintah sebagai pemain utama, serta peningkatan pelibatan dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan pariwisata Kota Cirebon 6. Penyederhanaan/pemberian kemudahan/insentif bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dibidang kepariwisataan maupun industri kerajinan berbahan baku lokal dan atau yang terkait pengembangan pariwisata Kota Cirebon 7. Meningkatkan investasi sarana dan prasarana wisata maupun industri kerajinan, khususnya di lokasi-lokasi yang menjadi daya tarik wisata	1. Memperkuat tema utama kawasan yaitu wisata budaya melalui diversifikasi dan pengembangan objek serta daya tarik wisata budaya 2. Memprioritaskan pengembangan produk wisata yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik manfaat ekonomi maupun manfaat sosial budaya 3. Meningkatkan upaya preservasi terhadap objek wisata yang sudah langka 4. Meningkatkan kualitas produk wisata dengan standar kualitas nasional dan internasional 5. Meningkatkan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan di kawasan pariwisata, baik dari faktor fisik maupun psikologis 6. Mengembangkan nilai-nilai lokal dalam pengembangan produk wisata 7. Meningkatkan kualitas ruang/spasial melalui penonjolan karakter desain arsitektural yang beciri khas lokal 8. Mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi maupun infrastruktur di kawasan, dengan penggunaan sumber daya seefisien mungkin

Kebijakan	Strategi
	9. Mengevaluasi efisiensi kinerja jaringan transportasi dan infrastruktur eksisting di kawasan dan perumusan skenario pengembangannya 10. Pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah, khususnya yang berada diobjek dan daya tarik wisata sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 11. Mengembangkan sistem, dan prosedur pengembangan investasi terpadu dengan sektor terkait 12. Mengembangkan *Business Plan* yang kuat dalam mengembangkan dan mengelola kepariwisataan 13. Membuat standarisasi dan kode etik pariwisata di berbagai usaha pariwisata 14. Standarisasi wisata kuliner dan belanja terkait industri kecil dan menengah
3. PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA	
1. Mengembangkan segmen pasar wisatawan rekreasi dan budaya sebagai segmen pasar potensial serta segmen pasar wisatawan minat Khusus sebagai segmen pasar baru 2. Mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai untuk pasar wisatawan rekreasi, budaya, dan wisatawan mancanegara dengan memanfaatkan teknologi informasi 3. Mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu dengan kawasan wisata unggulan di wilayah sekitar Kota Cirebon, secara efektif dan efisien 4. Promosi terpadu investasi pariwisata di Kawasan Jawa Barat, maupun Indonesia dan mancanegara, dengan promosi sektor-sektor lainnya, khususnya industri kerajinan	1. Mempertahankan dan memperkuat segmen pasar wisatawan utama saat ini, yaitu wisatawan nusantara lokal dan regional untuk kegiatan budaya, khususnya Bandung dan wilayah sekitar, serta wisatawan nusantara dan mancanegara yang melalui jalur Jawa Tengah/Timur menuju Lampung/DKI Jakarta (overland tourists) 2. Mengembangkan segmen baru pasar wisatawan sesuai dengan arah pengembangan produk pariwisata yang bertema utama wisata budaya, serta tema pendukung wisatalainnya 3. Memperluas segmen pasar wisatawan rekreasi dengan menangkap potensi pasar dari kota-kota besar di sekitar Kota Cirebon 4. Mengembangkan segmen pasar wisatawan minat khusus budaya, termasuk kuliner, belanja, serta wisatawan minat khusus wisata ekonomi kreatif, seperti pembelajaran dan pelatihan mengenai batik Cirebon 5. Memasarkan produk wisata kawasan dengan tema budaya dan religi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi

Kebijakan	Strategi
	6. Memasarkan produk wisata dalam kerangka konsep Tourism, Trade, and Investment, khususnya dengan industri kerajinan kecil dan menengah 7. Memasarkan produk wisata budaya secara terpadu dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 8. Mengembangkan berbagai teknik promosi (direct marketing, iklan, sale promotion, travel trade) secara tepat guna dan tepat sasaran 9. Menyelengarakan event-event internasional terkait wisata 10. Mengembangkan riset pasar kebutuhan wisatawan nasional dan internasional berbasis riset yang handal 11. Memunculkan Brand Identity kawasan wisata melalui pengembangan Brand Image yang didukung oleh seleksi dan aksentuasi produk, serta slogan dan simbolisasi 12. Meningkatkan kerjasama promosi investasi dengan sektor lain, khususnya industri kerajinan, industri makanan dan lain-lain, baik di Jawa Barat atau Nasional 13. Menerapkan kebijakan yang mendorong masuknya arus investasi pariwisata 14. Mengembangkan website atau database yang dapat memberikan informasi mengenai potensi berinvestasi di kawasan wisata bahari terpadu dan olah raga yang ditujukan bagi para investor
4. PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, baik profesional maupun tenaga terampil 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata khususnya Sumber Daya Manusia yang berhadapan langsung dengan wisatawan 3. Memberdayakan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata di daerahnya 4. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kesadaran seluruh pelaku pariwisata, termasuk masyarakat, terhadap pariwisata 5. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan antar wilayah	1. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata melalui komitmen bersama dalam membangun pariwisata Kota Cirebon 2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan 3. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas untuk pengembangan kepariwisataan 4. Mengadakan standarisasi kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan yang menghasilkan sertifikasi keahlian tertentu 5. Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat, pelaku

Kebijakan	Strategi
Kabupaten/Kota di Jawa Barat, maupun dengan provinsi lain/nasional/internasional melalui lembaga terkait pariwisata dan budaya, termasuk komitmen dari para pengambil keputusan yang terkait dengan pariwisata	pariwisata dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata
6. Mengembangkan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif	6. Meningkatkan upaya pendampingan kepada masyarakat pelaku pariwisata dari proses perencanaan, pengelolaan, sampai pemasaran produkwisata
7. Meningkatkan kemitraan antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengembangan wisata	7. Mengembangkan tourism information system dan e-government yang dapat mempermudah pengelolaan kawasan kepariwisataan
8. Mengembangkan kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi yang terkait dengan pengembangan wisata	8. Mengembangkan tugas, fungsi dan wewenang kelembagaan terkait, baik dalam skala makro, meso dan mikro secara integratif agar tidak terjadi ketumpang-tindihan dalam menyusun kebijakan
9. Mengembangkan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi wisata	9. Mengembangkan asosiasi profesi kepariwisataan serta memperkuat peran dan fungsi lembaga masyarakat yang bergerak dibidang kepariwisataan
	10. Mengembangkan sarana dan prasarana operasional sebagai penunjang kegiatan kelembagaan
	11. Menerapkan instrumen kebijakan berupa insentif dan disinsentif, seperti pajak dan regulasi yang mendukung pengembangan kepariwisataan
	12. Meningkatkan hubungan kemitraan yang bernuansa pembinaan dan saling menguntungkan antara pelaku pariwisata, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat
	13. Meningkatkan sinergitas antar lembaga terkait pengembangan wisata
	14. Mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia di bidang pariwisata serta pelajar/mahasiswa di bidang pariwisata
	15. Mengembangkan kelembagaan pengelola investasi pariwisata
	16. Mengembangkan kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan usaha pariwisata skala regional, nasional dan internasional

Sumber: Perda No. 7 Tahun 2019 tentang RIPPARDA

BAB IV METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analsis situasi dan evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon Tahun 2019-2025. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

4.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran (*mixed method*) dengan pendekatan concurrent triangulation. Pendekatan ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dalam satu kerangka penelitian. Dalam penelitian yang dijalankan, metode ini dilakukan dengan menganalisis data kuantitatif berupa target dan capaian indikator kinerja dalam rencana induk pengembangan pariwisata, yang kemudian diperkaya dan didukung oleh data kualitatif dari wawancara mendalam dan FGD.

Pendekatan *concurrent triangulation* yang diterapkan dalam mixed method ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, kemudian mengintegrasikan hasil-hasil tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Penggunaan metode dengan pendekatan *mixed method* memberikan beberapa keunggulan dalam penelitian analisis kinerja pariwisata:

1. Mampu menyediakan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian dibandingkan pendekatan kualitatif atau kuantitatif saja;
2. Memungkinkan triangulasi data dari berbagai sumber untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian;
3. Dapat mengungkap ketidakkonsistenan dan kontradiksi yang mungkin tidak terdeteksi dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif saja;
4. Memberikan landasan yang lebih kuat untuk rekomendasi kebijakan pengembangan pariwisata di masa mendatang.

Keunggulan pendekatan mixed method ini adalah kemampuannya untuk memberikan deskripsi tekstual yang kompleks dan terpusat, yang sangat sesuai dengan

tujuan untuk memberikan analisis situasi dan evaluasi kinerja program pengembangan pariwisata.

Penelitian ini berfokus pada jenis evaluasi sumatif atau evaluasi setelah kebiajkan diimplemetasikan untuk mengukur dampak serta keberhasilan.

4.2 Unit Analisis dan Subjek Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019, dengan fokus utama pada implementasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA). Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pariwisata daerah, yang termasuk perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, pihak Keraton, pelaku usaha pariwisata, asosiasi dan komunitas wisata.

4.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

1. Data Primer diperoleh melalui:

- Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci di Kota Cirebon, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Komisi 3 DPRD, Keraton Kacirebonan, Keraton Kasepuhan, dan Cirebon Waterland. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan pendekatan wawancara mendalam. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, namun tetap fleksibel untuk mengembangkan pertanyaan tambahan selama proses wawancara berlangsung. Keunggulan wawancara mendalam adalah kemampuannya untuk memperoleh data, informasi, dan kerangka keterangan yang lebih mendalam dari subjek penelitian.
- *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pariwisata, termasuk pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal. Focus Group Discussion merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang bertujuan untuk menemukan makna dari sebuah tema menurut pembahasan suatu kelompok yang diarahkan oleh seorang moderator. Dalam penelitian ini, FGD dilakukan untuk menjelaskan dan melengkapi data kuantitatif yang telah diperoleh dari analisis dokumen. FGD ini berfokus pada evaluasi pengembangan pariwisata Kota Cirebon, khususnya

terkait destinasi wisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Partisipan dihadirkan dalam dalam sesi diskusi terpisah berdasarkan kelompok *stakeholder* yang serumpun, yaitu rumpun Pemerintah Daerah Kota Cirebon, pihak Keraton, pelaku usaha pariwisata, asosiasi dan komunitas wisata. Partisipan dalam FGD ini, yaitu:

a. Bidang PPSDA (Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Dinas Perhubungan;
e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
f. Dinas Kesehatan;
g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
h. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
i. Dinas Pendidikan;
j. Satuan Polisi Pamong Praja;
k. Keraton Kanoman;
l. Pengelola Air Gua Sunyaragi;
m. Pengelola Wisata Bahari Kejawanan;
n. PHRI (Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia);
o. ASPPI (Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia).

2. Data Sekunder diperoleh melalui:

a. Dokumen RIPPARDA Kota Cirebon tahun 2019-2024
b. Laporan capaian kinerja tahunan Dinas Pariwisata
c. Publikasi dari instansi pemerintah terkait
d. Data statistik pariwisata dari Badan Pusat Statistik Kota Cirebon
e. Regulasi dan kebijakan terkait sektor pariwisata

Dokumen tersebut berisi data-data target indikator sasaran yang kemudian dibandingkan dengan data capaian indikator sasaran pada tahun 2025. Proses analisis ini menggunakan pendekatan pengukuran kinerja dengan indikator pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan yang telah direncanakan.

Kombinasi berbagai sumber data ini memungkinkan triangulasi yang memperkuat keabsahan temuan penelitian, sejalan dengan prinsip penelitian evaluatif yang komprehensif.

4.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis utama:

1. Analisis Kuantitatif

Dalam penelitian ini, aspek kuantitatif dilakukan melalui analisis dokumen rencana induk pengembangan pariwisata 2019-2025. Dokumen tersebut berisi data-data target indikator sasaran yang kemudian dibandingkan dengan data capaian indikator sasaran pada tahun 2019-2025. Proses analisis ini menggunakan pendekatan pengukuran kinerja dengan indikator pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan yang telah direncanakan. Data kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau grafik.

Pengukuran kinerja indikator dapat dihitung dengan rumus:

a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja: Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi / Rencana) x 100
b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja: Capaian Indikator Kinerja = [Rencana – (Realisasi – Rencana)] / Kinerja Rencana x 100

Hasil pengukuran capaian kinerja kemudian dapat disimpulkan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Tidak Berhasil

2. Analisis Kualitatif

Metode analisis data dalam penelitian ini mengintegrasikan teknik analisis kualitatif yang sistematis dengan pendekatan MultipleStreams guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi RIPPARDA. Secara teknis, analisis kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu:

a. Transkripsi: Semua data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan Focus Group Discussion direkam dan ditranskrip secara menyeluruh. Proses ini memastikan bahwa setiap informasi verbal terekam secara akurat dan dapat dianalisis secara detail.

b. Reduksi Data: Setelah transkripsi, data direduksi dengan cara menyaring informasi yang relevan dan mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori yang muncul. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas data mentah tanpa menghilangkan makna penting yang terkandung di dalamnya.
c. Coding: Proses coding dilakukan untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan hubungan antar data. Dengan memberikan label (kode) pada bagian-bagian data yang bermakna, peneliti dapat mengorganisasikan informasi sehingga memudahkan dalam mengaitkan temuan-temuan yang serupa atau berkaitan.
d. Penyajian Data: Data yang telah dikodifikasi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau grafik. Penyajian data ini dilakukan secara sistematis sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami hasil analisis dan melihat keterkaitan antara berbagai tema yang muncul.
e. Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan hasil penyajian data, peneliti melakukan penarikan kesimpulan secara komprehensif. Tahap ini melibatkan interpretasi mendalam atas temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, serta merumuskan rekomendasi perbaikan atau pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

Untuk melengkapi evaluasi RIPPARDA, penelitian ini juga menggunakan analisis Multiple Streams yang dikembangkan oleh Kingdon (2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami proses kebijakan melalui tiga arus utama:

a. Arus Masalah (*Problem Stream*): Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi isu-isu dan tantangan yang muncul dalam pengembangan pariwisata Kota Cirebon. Proses ini mencakup pengumpulan data mengenai persepsi masyarakat, kendala operasional, serta permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan.
b. Arus Kebijakan (*Policy Stream*): Tahapan ini berfokus pada analisis alternatif kebijakan yang tersedia dan dikembangkan. Peneliti mengevaluasi berbagai solusi yang telah diusulkan atau diterapkan, serta menilai relevansi dan efektivitasnya dalam konteks pengembangan pariwisata.
c. Arus Politik (*Political Stream*): Pada arus politik, penelitian mendalami kondisi politik dan kepentingan para aktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini meliputi analisis dinamika kekuatan politik, peran kelompok kepentingan, dan bagaimana faktor-faktor eksternal seperti pemilu atau perubahan legislatif membuka policy window.

Teori *Multiple Streams* merupakan teknik analisis kebijakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor politik di dalamnya sehingga terbuka policy windows atau momentum dikeluarkannya kebijakan. Faktor-faktor tersebut meliputi pemilu, partisan, dan kelompok pendesak. Teori ini kontra terhadap dikotomi antara politik dan pembuatan kebijakan dan menganggap bahwa proses pembuatan kebijakan perlu dipertimbangkan secara keseluruhan, termasuk faktor politiknya, bukan hanya proses eksogen (Kingdon, 2014).

Dalam mengeluarkan suatu kebijakan, perlu adanya momentum yang pas guna diterimanya kebijakan tersebut oleh berbagai pihak. Terbukanya kesempatan dalam mengeluarkan kebijakan disebut *policy window*. *Policy window* dapat dianalisis menggunakan *framework political stream* dengan menganalisis *problem stream, politic stream*, dan *policy stream* serta faktor yang mendukungnya, yakni *policy entrepreneur*.

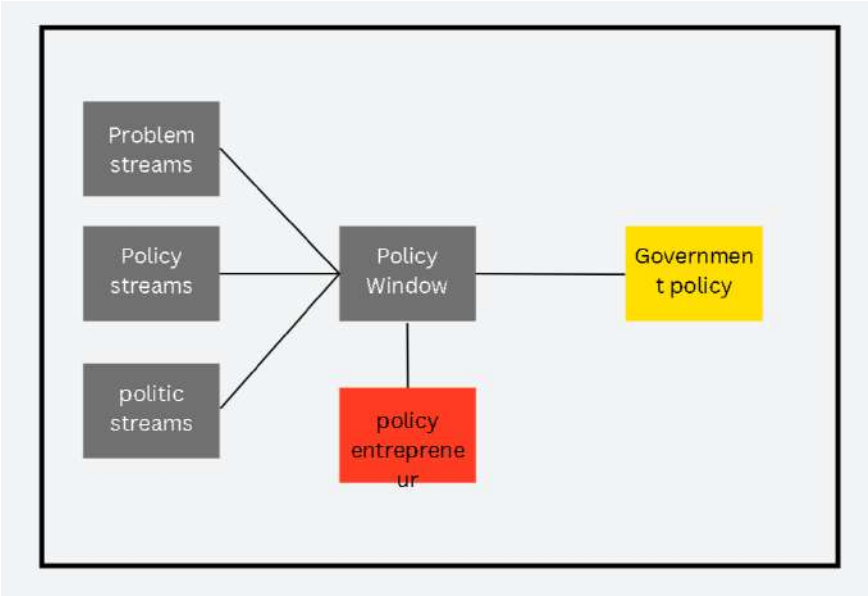

Gambar 4. 1 Model Analisis *Multiple Streams* (Kingdon, 2014)

Problem stream merupakan berbagai identifikasi permasalahan yang merupakan timbal balik masyarakat dari kebijakan yang muncul sebelumnya. Pada fase ini, berbagai interpretasi mengenai munculnya kebijakan akan bermunculan dan ada masyarakat yang memandang keluarnya kebijakan ini sebagai masalah sehingga muncul berbagai interpretasi mengenai masalah ini (Beland dan Howlett, 2016). Setelah kebijakan sebelumnya muncul, political stream dapat diidentifikasi dengan menentukan arah politik dari empat aktor utama, yakni national mood, pendapat parlemen, interest group, dan pressure group. National mood

adalah orang-orang yang berada di dalam dan di sekitar lingkungan pemerintah yang biasa mendiskusikan substansi dari kebijakan dan percaya bahwa mereka mengetahui kapan keadaan nasional dapat berubah (Kingdon, 2014).

Pendapat legislatif merupakan arah keberpihakan legislatif terhadap respon dari pengeluaran kebijakan sebelumnya. Sementara itu, interest group adalah aktor yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap dikeluarkannya kebijakan tersebut. Pressure group adalah aktor yang mendorong aktor-aktor lainnya untuk menindaklanjuti permasalahan yang muncul. Dalam proses identifikasi, biasanya kesempatan untuk mengeluarkan kebijakan dapat terpikirkan ketika masalahnya sudah diidentifikasi sehingga muncul solusi yang dapat diterima oleh semua pihak (Hoefer, 2022).

Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, evaluasi RIPPARDA tidak hanya berfokus pada capaian teknis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan dinamika politik yang turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Kombinasi metode analisis kualitatif dan *Multiple Streams* memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, memahami konteks dan dinamika implementasi kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan program pengembangan pariwisata di Kota Cirebon, serta mengidentifikasi peluang perbaikan yang strategis (Kingdon, 2014; Beland dan Howlett, 2016; Hoefer, 2022).

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Evaluasi Capaian Pembangunan Pariwisata Tahun 2019-2024

Evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2017). Evaluasi ini penting untuk memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan guna perbaikan kebijakan di masa depan. Evaluasi kebijakan mencakup analisis hasil, dampak, dan implementasi kebijakan dalam berbagai konteks (Patton et al., 2015). Di Indonesia, evaluasi kebijakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang menggarisbawahi pentingnya data yang akurat dan terintegrasi dalam evaluasi kebijakan.

Dalam konteks evaluasi kebijakan regulasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Cirebon Tahun 2019-2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap sasaran pembangunan kepariwisataan yang telah ditetapkan di awal dengan capaian sasaran-sasaran tersebut pada masa akhir periode. Dalam kajian ini, evaluasi kebijakan dilakukan secara sumatif, atau yang disebut juga sebagai evaluasi dampak. Evaluasi sumatif dilakukan setelah kebijakan diimplementasikan untuk mengukur dampak dan keberhasilannya (Stufflebeam & Coryn, 2014).

Tabel 5.1 menunjukkan capaian Sasaran/Program Pembangunan Kepariwisataan di Kota Cirebon Tahun 2019-2025, dengan data yang tersedia dari tahun 2017 sebagai data awal (baseline) ketika menyusun RIPPARDA di tahun 2019 dan data tahun 2024 sebagai data terakhir yang tersedia ketika kajian evaluasi ini dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2025, sasaran pembangunan kepariwisataan Kota Cirebon terdiri dari :

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, dengan indikator sasaran meliputi wisatawan domestik, dan wisatawan mancanegara.
2. Meningkatnya kontribusi sektor usaha pariwisata terhadap produk domestik regional bruto, dengan indikator hari.
3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, dengan indikator sasaran berupa sejauhmana kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, dengan indikator saran jumlah tenaga kerja yang terserap
5. Meningkatnya pendapatan daerah sektor pariwisata, dengan indikator sasaran kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Dareah (PAD).

Berdasarkan Perda Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019, sasaran/program pembangunan kepariwisataan di Kota Cirebon Tahun 2019-2025 antara lain:

1. Sasaran: Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan; dengan indikator Wisatawan Domestik (orang) dan Wisatawan Mancanegara (orang).
2. Sasaran: Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata; dengan indikator Hari.
3. Sasaran: Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; dengan indikator Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%).
4. Sasaran: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata; dengan indikator Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap (orang).
5. Sasaran: Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata; dengan indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (%).

Tabel 5. 1 Capaian Sasaran/Program Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon Tahun 2019-2025

No	Sasaran/ Program	Indikator	Kondisi Awal	Capaian						Target Akhir
			2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan Domestik (orang)	1.022.084	1.315.203	941.329	3.611.069	4.226.068	4.654.768	4.027.592	2.650.173
		Wisatawan Mancanegara (orang)	11.558	190.004	45.465	58.126	90.761	36.868	36.868	30.018
2.	Meningkatnya lama kunjungan wisata	Hari	1	2	1	1	1	1	1	2
3.	Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	5,31	5,38	5,11	5,21	5,59	5,83	-	6

No	Sasaran/ Program	Indikator	Kondisi Awal	Capaian						Target Akhir
			2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata	Jumlah tenaga kerja yang terserap (orang)	2.470	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	3.211
5.	Meningkatnya pendapatan daerah sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	13,04	44,92	34,80	34,16	43,14	42,43	-	17

Sumber: Disbudpar Kota Cirebon, 2024

Analisis evaluasi capaian sasaran/program Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut.

1. **Sasaran: Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara**

   Sasaran meningkatnya lama kunjungan wisatawan dapat didefinisikan secara operasional sebagai ukuran yang menggambarkan pertumbuhan atau penurunan jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi dalam periode tertentu. Dengan demikian, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara merupakan total akumulasi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang mengunjungi objek wisata dalam suatu periode tertentu (misalnya, bulanan, tahunan). Diukur dalam satuan jiwa (jumlah orang).

   Wisatawan Domestik merupakan penduduk yang melakukan perjalanan wisata di dalam negeri, yaitu ke lokasi yang berbeda dari tempat tinggalnya. Mereka biasanya melakukan perjalanan untuk tujuan rekreasi, belajar, atau bersenang-senang tanpa bermaksud untuk menetap atau bekerja di tempat yang dikunjungi. Kota Cirebon menarik wisatawan domestik dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa daerah asal wisatawan domestik yang umum meliputi Jakarta merupakan sumber utama wisatawan yang sering mengunjungi Cirebon untuk menikmati budaya dan kuliner, Bandung juga menyuplai banyak wisatawan yang mencari pengalaman baru di kota ini, Semarang dan Yogyakarta juga menjadi sumber wisatawan domestik yang tertarik dengan sejarah dan budaya Cirebon, daerah

lainnya wisatawan juga datang dari berbagai provinsi lain di Indonesia, termasuk Jawa Timur dan Bali, terutama selama liburan atau acara khusus.

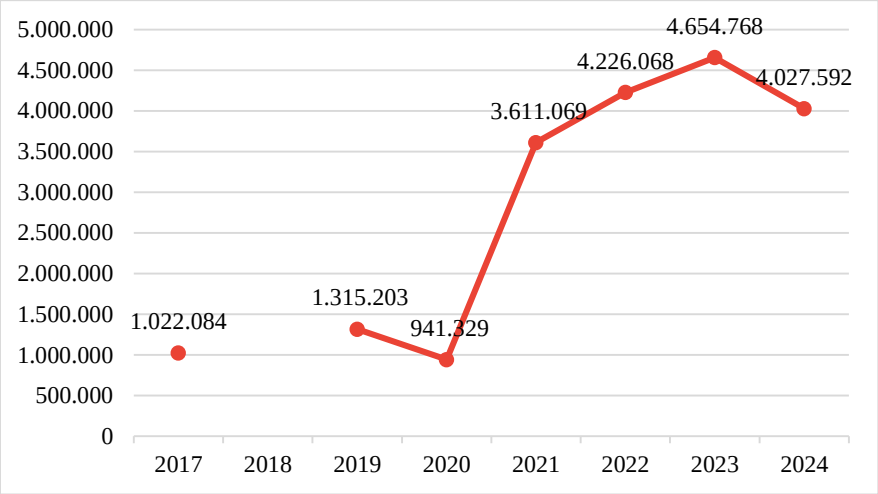

Sumber: Disbudpar Kota Cirebon, 2024 (diolah)

Gambar 5. 1 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Kota Cirebon Tahun 2017-2024

Pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19, jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Cirebon (sebesar 1,3 juta) relatif tinggi dengan data menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (kondisi awal tahun 2017 sebesar 1 juta pengunjung. Sedangkan tahun 2020-2021, Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah kunjungan sebesar 28% (tahun 2020 sebesar 941.329 wisatawan). Pada tahun 2021, meskipun masih dalam masa pandemi, Cirebon mencatat sekitar 3,6 juta wisatawan domestik (naik 284%), yang menunjukkan adanya pemulihan bertahap. Pemulihan Pasca-Pandemi (2022-2024) yaitu Pada tahun 2022, Cirebon menerima 4,2 juta wisatawan (naik 17%), 2023 4,6 juta wisatawan (naik 10%) namun sebagian besar tidak menginap, yang menunjukkan bahwa kota ini masih berfungsi sebagai daerah transit. Pada tahun 2024, tercatat jumlah kunjungan mencapai 4 juta wisatawan. Target akhir jumlah kunjungan wisatawan domestik tahun 2025 berdasarkan RIPPARDA adalah 2.650.173 wisatawan.

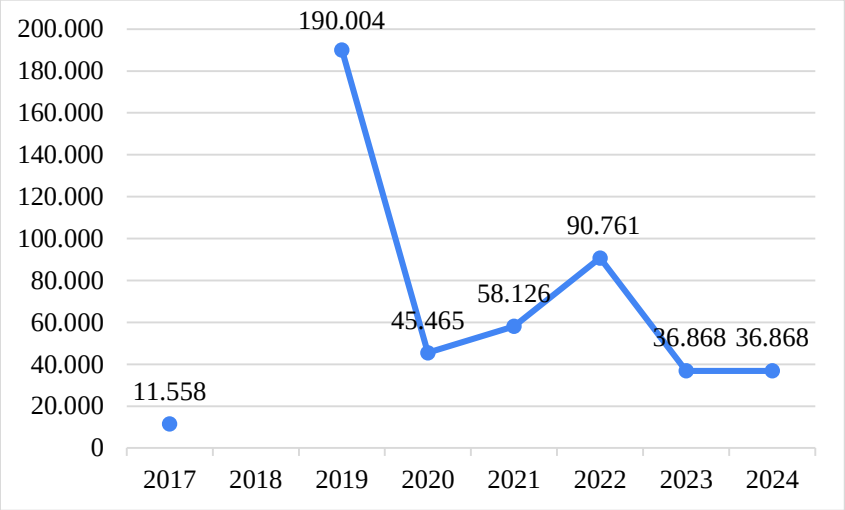

Sumber: Disbudpar Kota Cirebon, 2024 (diolah)

Gambar 5. 2 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kota Cirebon Tahun 2017-2024

Wisatawan Mancanegara merupakan pelancong dari luar negeri yang berkunjung ke suatu negara dengan tujuan wisata. Mereka tinggal di negara yang dikunjungi untuk jangka waktu tertentu, biasanya tidak lebih dari 12 bulan, tanpa bermaksud mendapatkan penghasilan di tempat tersebut. Pada tahun 2019, wisatawan mancanegara ke Kota Cirebon tercatat 190.004 wisatawan mancanegara (wisman). Namun pada Pandemi COVID-19 yaitu tahun 2020, jumlah kunjungan menurun drastis sebesar 76% menjadi 45.465 wisman akibat pembatasan perjalanan dan kekhawatiran kesehatan. Selama periode ini, banyak wisatawan asing yang membatalkan rencana perjalanan mereka, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam statistik kunjungan.

Pemulihan Pasca-Pandemi: Sejak 2021, sektor pariwisata mulai pulih atau naik 28% 58.126 wisman, tahun 2022 naik 56% (90.761 wisman), namun pemulihan ini tidak merata. Pada tahun 2024, meskipun ada penurunan jumlah kunjungan dari tahun sebelumnya dengan sekitar 36.868 wisman Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada lonjakan di beberapa periode, angka keseluruhan masih rendah dibandingkan dengan sebelum pandemi. Target akhir jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2025 berdasarkan RIPPARDA adalah 30.018 wisatawan.

Indikator-indikator ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran pariwisata, kualitas layanan, serta daya tarik objek

wisata. Peningkatan pada indikator-indikator ini menunjukkan bahwa suatu daerah berhasil menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian lokal. Dengan menggunakan Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara ini, pemangku kepentingan di sektor pariwisata dapat merancang kebijakan dan strategi untuk lebih meningkatkan jumlah kunjungan serta pengalaman wisatawan di destinasi mereka.

2. Sasaran: Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata

Sasaran Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata dapat didefinisikan secara operasional sebagai ukuran yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan di suatu destinasi wisata dalam periode tertentu, yang diukur dari saat kedatangan hingga keberangkatan. Diukur dalam satuan hari.

Lama kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon selama periode 2018 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang konsisten, di mana sebagian besar wisatawan menghabiskan waktu 1 hingga 2 hari. Hal ini mencerminkan preferensi wisatawan yang lebih memilih perjalanan singkat dan padat, terutama pada akhir pekan atau liburan panjang. Data lama kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon selama 2 hari terjadi pada tahun 2019 (sebelum pandemi).

Kecenderungan kunjungan singkat wisatawan, terutama dari daerah sekitar seperti Jakarta dan Bandung ke Cirebon seringkali untuk menikmati kuliner khas, seperti Nasi Jamblang dan Empal Gentong, serta mengunjungi objek wisata sejarah dalam waktu yang terbatas.

Indikator ini penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran pariwisata, kualitas layanan, serta daya tarik objek wisata. Peningkatan lama kunjungan dapat menunjukkan bahwa wisatawan merasa puas dan tertarik untuk menjelajahi lebih banyak hal di destinasi tersebut, yang berpotensi meningkatkan kontribusi ekonomi pariwisata bagi daerah.

Dengan menggunakan Sasaran Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata ini, pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata dapat merancang kebijakan dan program untuk meningkatkan pengalaman wisatawan dan memperpanjang lama tinggal mereka di destinasi.

3. **Sasaran: Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

Sasaran Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dapat didefinisikan secara operasional sebagai ukuran yang menunjukkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat local. Dalam hal ini kontribusi sektor pariwisata diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperbaiki infrastruktur di daerah wisata. Sasaran ini diukur melalui jumlah wisatawan yang berkunjung, pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata, dan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam industri pariwisata.

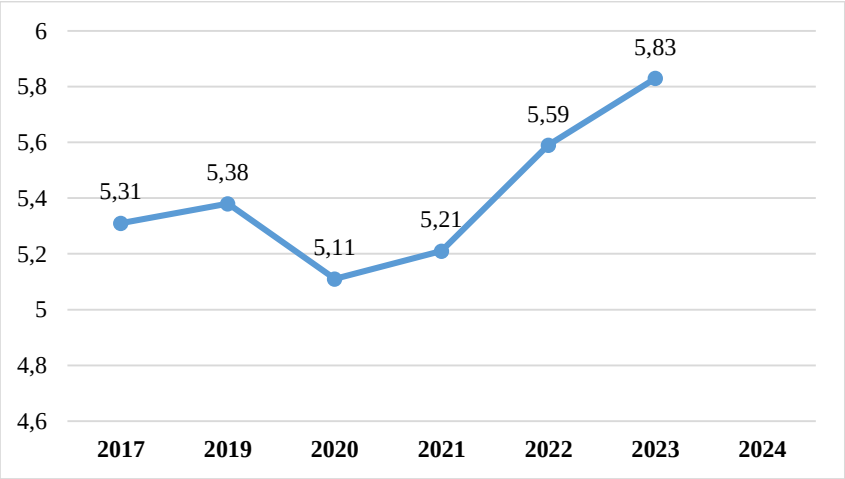

Sumber: Disbudpar Kota Cirebon, 2024 (diolah)

Gambar 5. 3 Perkembangan Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%) Kota Cirebon Tahun 2017-2024

Bila dilihat dari data perkembangan Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%) Tahun 2017-2024, menunjukkan peningkatan tren 1,32% dari kondisi awal tahun 2017 sebesar 5,31% menjadi capaian 5,38% pada tahun 2019. Hal ini terjadi pada masa sebelum pandemi COVID-19. Namun ketika tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,02% atau capaian 5,11%. Seiring berjalannya kondisi kepariwisataan, pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata tahun 2021-2023 semakin merangkat naik sebesar 2% hingga 7% atau capaian kontribusi pariwisata

terhadap PDRB tahun 2021 sebesar 5,21%,, tahun 2022 sebesar 5,59%, tahun 2023 sebesar 5,83%. Capaian tahun 2024 belum tersedia data.

Indikator Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB digunakan untuk menganalisis dampak sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan memantau perkembangan indikator tersebut, pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat serta memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui Sasaran Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, diharapkan bahwa peran pariwisata tidak hanya sebagai sumber pendapatan tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan inklusif di daerah tujuan wisata.

4. Sasaran: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata

Sasaran Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata merupakan pengukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor yang menunjukkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor pariwisata. Indikator ini dapat dijelaskan melalui variabel jumlah tenaga kerja yang diserap dimana merujuk pada total jumlah individu yang bekerja dalam sektor pariwisata, termasuk di sub-sektor seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan objek wisata. Satuan pengukurannya adalah jumlah orang.

Definisi operasional ini memungkinkan analisis kuantitatif terhadap hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata, menggunakan metode statistik seperti regresi linier atau analisis jalur untuk mengukur dampaknya secara signifikan.

Berkaitan dengan sasaran Sasaran Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata di Kota Cirebon, sejak tahun 2019-2024 belum tersedia data tersebut oleh perangkat daerah yang mengampu kepariwisataan. Hal ini dikarenakan data tenaga kerja di Kota Cirebon belum terdata secara spesifik/belum terpilah penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan objek wisata. Di masa mendatang, hal ini perlu menjadi perhatian untuk menyediakan data terkait sejauhmana penyerapan tenaga kerja di sektor

pariwisata sebagai indikator dalam mengukur sejauhmana dampak pembangunan sektor kepariwisataan terhadap sektor ketenagakerjaan.

5. **Sasaran: Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata**

Definisi operasional mengenai Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata berkaitan dengan total penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah (Pendapatan Asli Daerah) dari sumber-sumber yang berasal dari dalam daerah sendiri. Ini mencakup pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pendapatan berasal dari Sektor Pariwisata yang terdiri dari dari kegiatan pariwisata, termasuk pajak hotel, pajak restoran, retribusi tempat rekreasi, dan pajak hiburan. Pendapatan ini mencerminkan kontribusi sektor pariwisata terhadap keseluruhan pendapatan daerah.

Berdasarkan data hasil lapangan, Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon pada kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2024 menggalami perkembangan peningkatan yang fluktuatif. Komponen ini terdiri dari pendapatan dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

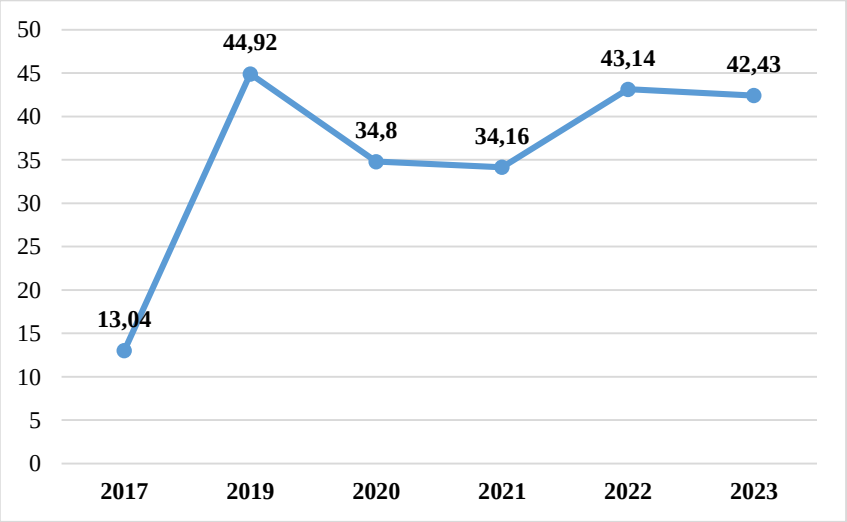

Sumber: Disbudpar, BPKPD Kota Cirebon, 2024 (diolah)

Gambar 5. 4 Perkembangan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (%) Kota Cirebon Tahun 2017-2024

Pada data kondisi awal, Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 13,04%. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi

peningkatan yang signifikan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD menjadi sebesar 44,92% (naik 244,48% datri tahun 2017). Kondisi ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara sebelum pandemi sehingga meningkatkan penerimaan retribusi dan pajak daerah, tetapi kontribusi tetap terbatas akibat pertumbuhan sektor ekonomi lain yang lebih cepat.

Selanjutnya tahun 2020 mengalami penurunan 22,53% atau kontribusi sektor pariwisata sebesar 34,8% dari PAD dan capaian tahun 2021 sebesar 34,16% (turun 1,84% dari tahun sebelumnya). Penurunan drastis ini disebabkan pada Masa Pandemi Covid-19 terjadi penurunan kunjungan wisatawan akibat pembatasan sosial menyebabkan penurunan kontribusi sektor pariwisata yang signifikan. Hal ini juga disebabkan pendapatan dari retribusi tempat wisata dan hotel anjlok, (menurunnya tingkat hunian hotel)

Secara berturut turut capaian kontribusi tahun 2022 sebesar 43,14% (naik 26,29% dari tahun sebelumnya), tahun 2023 sebesar 42,4% (turun 1,65%). Sedangkan pada tahun 2024 belum tercatat data capaiannya. Sejak tahun 2022, terjadi pemulihan dengan tingkat penghunian hotel meningkat dan target kunjungan wisatawan juga meningkat. Namun, kontribusi terhadap PAD masih terhambat oleh masih adanya dominasi wisatawan transit (hanya 1–2 hari) yang minim pengeluaran, penurunan jumlah wisatawan, dan kurang optimalnya pengelolaan destinasi wisata (daya tarik wisata Kota Cirebon), sehingga menyebabkan kontribusi pariwisata terhadap PAD pada kurun waktu 2023 hingga 2024.

Selanjutnya bila dilihat perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Cirebon dengan Pagu Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon dari tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 2 Perbandingan APBD Kota Cirebon dengan Pagu Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon Tahun 2019-2024

Tahun	APBD (Rp)	Pagu Disbudpar (Rp)	Persentase (%)
2019	1.739.629.471.092,00	13.535.855.000,00	0,78
2020	1.689.345.566.970,00	13.975.893.900,00	0,83
2021	1.655.717.079.392,00	2.991.243.200,00	0,18
2022	1.576.560.018.375,00	9.186.412.412,00	0,58

Tahun	APBD (Rp)	Pagu Disbudpar (Rp)	Persentase (%)
2023	1.583.114.687.564,00	9.631.409.900,00	0,61
2024	1.728.649.785.707,00	14.266.636.543,00	0,83

Sumber : Disbudpar, 2025

Berdasarkan tabel 5.2 di atas, terlihat bahwa pagu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun 2019-2024 kurang dari 1%. Selanjutnya bila disandingkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Cirebon dengan Persentase Pagu Anggaran DISBUDPAR terhadap APBD Kota Cirebon Tahun 2019-2024 terlihat masih dibawah kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Secara grafik perbandingan dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

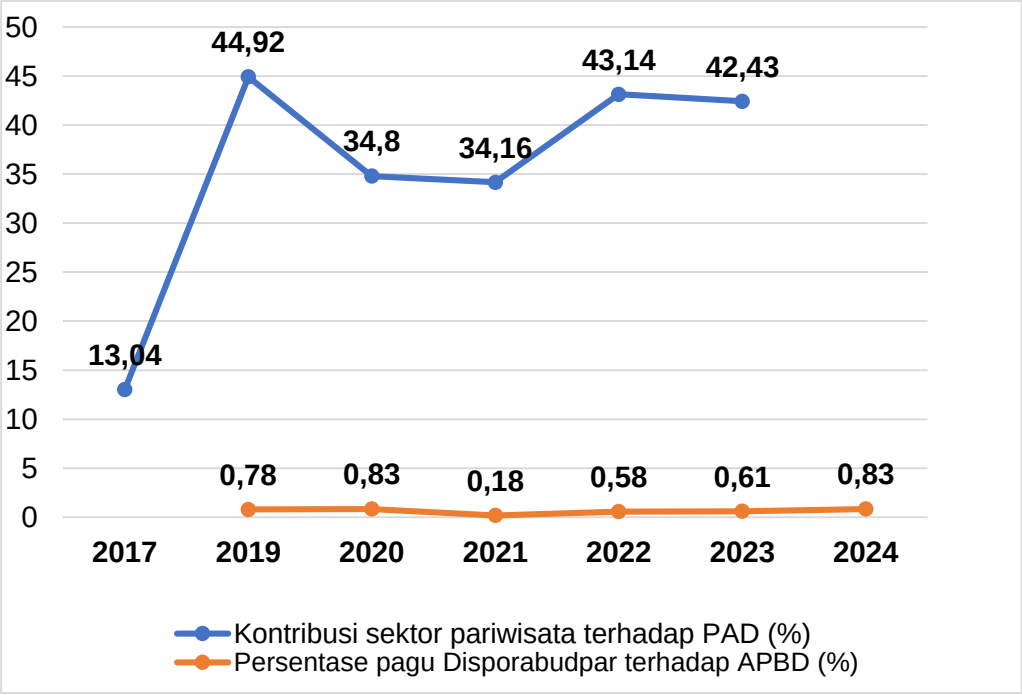

Sumber: Disbudpar, BPKPD Kota Cirebon, 2024 (diolah)

Gambar 5. 5 Perbandingan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Cirebon dengan Persentase Pagu Anggaran DISBUDPAR terhadap APBD Kota Cirebon Tahun 2019-2025

Secara keseluruhan, perkembangan capaian yang fluktuatif sasaran pembangunan kepariwisataan di Kota Cirebon disebabkan :

a. Adanya Pandemi COVID-19; menyebabkan penurunan drastis pada tahun 2020 dan awal 2021 baik itu jumlah wisatawan, pertumbuhan ekonomi hingga kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Cirebon. Pada masa pandemi Covid-19 terjadi pembatasan perjalanan dan kekhawatiran kesehatan masyarakat. Meskipun ada pemulihan setelahnya, dampak jangka panjang dari pandemi masih tetap terasa.
b. Adanya Perubahan Kondisi Ekonomi Global; Perubahan dalam kebijakan pemerintah terkait pariwisata dan kondisi ekonomi masyarakat juga mempengaruhi keputusan perjalanan. Ketidakpastian ekonomi dapat mengurangi minat wisatawan untuk melakukan perjalanan jauh. Demikian pula dengan Perubahan dalam ekonomi global dan kondisi geopolitik dapat mempengaruhi keputusan perjalanan wisatawan mancanegara. Ketidakpastian ekonomi sering kali membuat wisatawan lebih berhati-hati dalam merencanakan perjalanan.
c. Kurangnya Daya Tarik Wisata; Cirebon memiliki banyak objek wisata menarik, namun daya tarik destinasi wisata masih kurang bila dibandingkan dengan wilayah sekitar (persaingan destinasi) sehingga perlu dikelola dan dipromosikan dengan baik untuk menarik wisman. Keterbatasan dalam promosi dan pengembangan destinasi turut menghambat pertumbuhan jumlah kunjungan. Daya tarik sektor pariwisata di Kota Cirebon yang masih diandalkan adalah pada sektor pariwisata kuliner.
d. Preferensi masyarakat yang mencari pengalaman cepat namun memuaskan; sehingga tren lama kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon yang berkisar antara 1 hingga 2 hari.

Faktor lain yang turut mempengaruhi capaian sasaran pembangunan :

a. Minimnya Pembangungan Infrastruktur dan Aksesibilitas; Kualitas infrastruktur pariwisata, seperti sarana prasarana destinasi wisata, fasilitas pendukung pariwisata, transportasi, akomodasi, juga berpengaruh besar. Jika

infrastruktur tidak memadai, hal ini dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Cirebon.

b. Kurang Optimalnya Promosi yang efektif; Kota Cirebon perlu upaya meningkatkan jumlah kunjungan dan memperpanjang lama tinggal wisatawan di masa depan. Wisata kuliner masih menjadi salah satu alasan utama bagi wisatawan untuk berkunjung. Dengan banyaknya pilihan makanan khas yang dapat dinikmati dalam waktu singkat, banyak wisatawan memilih untuk datang hanya untuk menikmati kuliner tanpa perlu menginap lama.
c. Kurangnya Pelatihan untuk Masyarakat; berkaitan dengan pelatihan kepada masyarakat lokal tentang manajemen pariwisata dan pelayanan kepada pelanggan untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.
d. Pengelolaan Destinasi yang Lemah; banyak destinasi wisata di Kota Ciirebon yang masih belum dikelola dengan baik dan keseriusan dari berbagai stakeholder. Termasuk belum sepenuhnya program dan kegiatan yang tertuang dalam RIPPARDA yang diimplementasikan, sehingga menghambat pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Secara ideal, Kota Cirebon memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Kota Cirebon optimis dapat terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah destinasi wisata unggulan di Jawa Barat. Beberapa kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi capaian pembangunan kepariwisataan yang fluktuatif dapat diatasi dengan cara:

1. Meningkatkan daya tarik destinasi wisata yang telah ada (Keraton, Gua Sunyaragi, Wisata Bahari) dan mengembangkan destinasi wisata baru (wisata *urban lifestyle* Cipto, dan lain-lain);
2. Pengelolaan pengembangan wisata di kawasan yang berkualitas dan terintegrasi, seperti kawasan kota tua yang lengkap dengan objek wisata, event wisata, amenitas pendukung, dan transportasi yang terhubung;
3. Peningkatan keamanan dan kenyamanan di kawasan wisata, dengan kelibatan trantibumlinmas, sehingga wisatawan tidak “kapok” beriwsata di Kota Cirebon;

4. Meningkatkan *social media marketing*, melibatkan masyarakat dan *content creator*, dan bekerja sama dengan *travel agent* untuk menawarkan paket wisata untuk korporasi dan sekolah;
5. Menyebarluaskan *Calendar of Events* yang mudah diakses masyarakat umum, memperbanyak event yang berskala nasional dan internasional;
6. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata, kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
7. Meningkatkan pemasaran terpadu dengan para pelaku wisata di dalam kota, serta kota dan kabupaten sekitar.

5.2 Analisis Situasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Pariwisata Kota Cirebon

Analisis situasi merupkan proses sistematis dalam menilai kondisi, tantangan, dan peluang suatu lingkungan atau konteks tertentu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (Bryson, 2018). Analisis situasi mencakup identifikasi pemangku kepentingan, penilaian lingkungan internal dan eksternal, serta perumusan strategi berbasis data yang tersedia. Analisis situasi melibatkan pengumpulan dan studi data untuk memahami masalah yang ada, orang-orang yang terpengaruh, serta konteks sosial, ekonomi, dan politik di mana masalah tersebut muncul.

Dalam kajian ini, analisis situasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pariwisata kota cirebon melihat sejauhmana pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan, sejauhmana kesesuaian rencana pengembangan perwilayahan kepariwisataan dan sejauhmana pelaksanaan program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan. Selanjutnya dalam memperdalam hasil temuan di lapangan, metode pendekatan yang digunakan dalam analisis situasi menggunakan *Multiple Stream Framework* yang menganalisis proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam konteks penetapan agenda. *Multiple Stream Framework* mengidentifikasi tiga arus utama yang saling berinteraksi: arus masalah, arus kebijakan, dan arus politik.

Penjelasan analisis situasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pariwisata di Kota Cirebon sebagai berikut.

1. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan

Berdasarkan Dokumen RIPPARDA Tahun 2019 – 2025 Pemerintah Kota Cirebon berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RIPPARDA 2019 – 2025. Adapun Kebijakan dan Strategi yang tercantum dalam dokumen tersebut meliputi lingkup Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; dan Kelembagaan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata terdiri dari:

a. Mewujudkan daya tarik obyek wisata di Kota Cirebon berdasarkan penguatan tata kelola karakteristik produk pariwisata dan perwilayahannya;
b. Mewujudkan struktur perwilayahan pariwisata Kota Cirebon diarahkan untuk menghubungkan antara satu obyek wisata dengan obyek wisata lainnya didalam Kota Cirebon serta dengan wilayah sekitar;
c. Mewujudkan KSP dan KPP di Kota Cirebon;
d. Meningkatkan aktivitas kesenian, kerajinan, kebudayaan Kota Cirebon yang mendukung tema produk utama kawasan di dalam klaster sebagai generator kegiatan kepariwisataan;
e. Integrasi antara kebijakan ketataruangan baik di level makro, meso maupun mikro;
f. Memanfaatkan kawasan sepanjang pantai kesenden dan kejawanan sebagai tempat pengembangan wisata bahari terpadu, dan pemanfaatan bekas galian C sebagai area ekowisata; dan
g. Kebijakan pengembangan produk unggulan Kota Cirebon berupa produk wisata kuliner dan belanja.

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata terdiri dari:

a. Membangun destinasi pariwisata Kota Cirebon terpadu, berkualitas, dan dikenal luas;
b. Menetapkan dan mengembangkan daya tarik obyekobyek wisata yang menunjukkan keragaman daya tarik wisata sesuai karakteristik yang ada.

c. Mengembangkan investasi yang berpihak pada masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi pariwisata;
d. Membentuk KSP Sejarah dan Budaya, serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon;
e. Menguatkan peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di KSP Kota Cirebon;
f. Meningkatkan keterhubungan destinasi dalam pengembangan perwilayahan pariwisata Kota Cirebon melalui pengembangan jalur-jalur beraksesibilitas tinggi;
g. Mengembangankan fasilitas umum sebagai tempat wisata pendukung seperti kawasan BAT, Kawasan Stadion Bima, Taman dan Alun-alun, Main Street dan Shopping Street, Sky Walk/Sky Bridge;
h. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu disepanjang Pantai Kesenden dan Kejawanan yang bernuansa sejarah dan budaya; dan
i. Menguatkan tata kelola wisata keraton dan klaster pendukung lainnya untuk meningkatkan image tradisi dan sejarah.

2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata terdiri dari:

a. Mengembangkan produk wisata Kota Cirebon diarahkan untuk memperkuat tema utama kawasan dan memberikan manfaat bagi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat;
b. Mengembangkan objek dan daya tarik wisata lain di dalam kawasan untuk mendukung tema wisata yang sudah dirumuskan;
c. Mengembangkan produk wisata yang khas, unik dan berdaya saing serta mendukung upaya konservasi, preservasi, dan rehabilitasi serta pemberdayaan masyarakat;
d. Meningkatkan efisiensi kinerja jaringan transportasi eksisting dan skenario pengembangan transportasi di Kota Cirebon melalui pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada baik kuantitas maupun kualitasnya dalam menunjang pariwisata;

e. Mendorong pembangunan infrastruktur kawasan dengan pemerintah sebagai pemain utama, serta peningkatan pelibatan dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan pariwisata Kota Cirebon;
f. Penyederhanaan/pemberian kemudahan/insentif bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dibidang kepariwisataan maupun industri kerajinan berbahan baku lokal dan atau yang terkait pengembangan pariwisata Kota Cirebon; dan
g. Meningkatkan investasi sarana dan prasarana wisata maupun industri kerajinan, khususnya di lokasi-lokasiyang menjadi daya tarik wisata.

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata terdiri dari:

a. Memperkuat tema utama kawasan yaitu wisata budaya melalui diversifikasi dan pengembangan objek serta daya tarik wisata budaya;
b. Memprioritaskan pengembangan produk wisata yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik manfaat ekonomi maupun manfaat sosial budaya;
c. Meningkatkan upaya preservasi terhadap objek wisata yang sudah langka;
d. Meningkatkan kualitas produk wisata dengan standar kualitas nasional dan internasional;
e. Meningkatkan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan di kawasan pariwisata, baik dari factor fisik maupun psikologis;
f. Mengembangkan nilai-nilai lokal dalam pengembangan produk wisata;
g. Meningkatkan kualitas ruang/spasial melalui penonjolan karakter desain arsitektural yang beciri khas lokal;
h. Mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi maupun infrastruktur di kawasan, dengan penggunaan sumber daya seefisien mungkin;
i. Mengevaluasi efisiensi kinerja jaringan transportasi dan infrastruktur eksisting di kawasan dan perumusan skenario pengembangannya;

j. Pembenahan sarana dan prasarana infrastrukturwilayah, khususnya yang berada diobjek dan daya tarik wisata sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
k. Mengembangkan sistem, dan prosedur pengembangan investasi terpadu dengan sektor terkait;
l. Mengembangkan Business Plan yang kuat dalam mengembangkan dan mengelola kepariwisataan;
m. Membuat standarisasi dan kode etik pariwisata diberbagai usaha pariwisata; dan
n. Standarisasi wisata kuliner dan belanja terkait industry kecil dan menengah,

3. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata terdiri dari:

a. Mengembangkan segmen pasar wisatawan rekreasi dan budaya sebagai segmen pasar potensial serta segmen pasar wisatawan minat Khusus sebagai segmen pasar baru;
b. Mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai untuk pasar wisatawan rekreasi, budaya, dan wisatawan mancanegara dengan memanfaatkan teknologi informasi;
c. Mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu dengan kawasan wisata unggulan di wilayah sekitar Kota Cirebon, secara efektif dan efisien; dan
d. Promosi terpadu investasi pariwisata di Kawasan Jawa Barat, maupun Indonesia dan mancanegara, dengan promosi sektor-sektor lainnya, khususnya industri kerajinan.

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata terdiri dari:

a. Mempertahankan dan memperkuat segmen pasar wisatawan utama saat ini, yaitu wisatawan nusantara lokal dan regional untuk kegiatan budaya, khususnya Bandung dan wilayah sekitar, serta wisatawan nusantara dan

mancanegara yang melalui jalur Jawa Tengah/Timur menuju Lampung/DKI Jakarta (overland tourists);

b. Mengembangkan segmen baru pasar wisatawan sesuai dengan arah pengembangan produk pariwisata yang bertema utama wisata budaya, serta tema pendukung wisatalainnya;

c. Memperluas segmen pasar wisatawan rekreasi dengan menangkap potensi pasar dari kota-kota besar di sekitar Kota Cirebon;

d. Mengembangkan segmen pasar wisatawan minat khusus budaya, termasuk kuliner, belanja, serta wisatawan minat khusus wisata ekonomi kreatif, seperti pembelajaran dan pelatihan mengenai batik Cirebon;

e. Memasarkan produk wisata kawasan dengan tema budaya dan religi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;

f. Memasarkan produk wisata dalam kerangka konsep Tourism, Trade, and Investment, khususnya dengan industri kerajinan kecil dan menengah;

g. Memasarkan produk wisata budaya secara terpadu dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;

h. Mengembangkan berbagai teknik promosi (direct marketing, iklan, sale promotion, travel trade) secara tepat guna dan tepat sasaran;

i. Menyelengarakan event-event internasional terkait wisata;

j. Mengembangkan riset pasar kebutuhan wisatawan nasional dan internasional berbasis riset yang handal.

k. Memunculkan Brand Identity kawasan wisata melalui pengembangan Brand Image yang didukung oleh seleksi dan aksentuasi produk, serta slogan dan simbolisasi;

l. Meningkatkan kerjasama promosi investasi dengan sektor lain, khususnya industri kerajinan, industry makanan dan lain-lain, baik di Jawa Barat atau Nasional;

m. Menerapkan kebijakan yang mendorong masuknya arus investasi pariwisata; dan

n. Mengembangkan website atau database yang dapat memberikan informasi mengenai potensi berinvestasi di kawasan wisata bahari terpadu dan olah raga yang ditujukan bagi para investor.

4. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata terdiri dari:

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, baik profesional aupun tenaga terampil;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata khususnya Sumber Daya Manusia yang berhadapan langsung dengan wisatawan;
c. Memberdayakan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata di daerahnya;
d. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kesadaran seluruh pelaku pariwisata, termasuk masyarakat, terhadap pariwisata;
e. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan antar wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, maupun dengan provinsi lain/nasional/internasional melalui lembaga terkait pariwisata dan budaya, termasuk komitmen dari para pengambil keputusan yang terkait dengan pariwisata;
f. Mengembangkan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;
g. Meningkatkan kemitraan antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengembangan wisata;
h. Mengembangkan kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi yang terkait dengan pengembangan wisata; dan
i. Mengembangkan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi wisata.

Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata terdiri dari:

a. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata melalui komitmen bersama dalam membangun pariwisata Kota Cirebon;
b. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan;
c. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas untuk pengembangan kepariwisataan;

d. Mengadakan standarisasi kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan yang menghasilkan sertifikasi keahlian tertentu;
e. Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat, pelaku pariwisata dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata;
f. Meningkatkan upaya pendampingan kepada masyarakat pelaku pariwisata dari proses perencanaan, pengelolaan, sampai pemasaran produk wisata;
g. Mengembangkan tourism information system dan e-government yang dapat mempermudah pengelolaan kawasan kepariwisataan;
h. Mengembangkan tugas, fungsi dan wewenang kelembagaan terkait, baik dalam skala makro, meso dan mikro secara integratif agar tidak terjadi ketumpang-tindihan dalam menyusun kebijakan;
i. Mengembangkan asosiasi profesi kepariwisataan serta memperkuat peran dan fungsi lembaga masyarakat yang bergerak dibidang kepariwisataan;
j. Mengembangkan sarana dan prasarana operasional sebagai penunjang kegiatan kelembagaan;
k. Menerapkan instrumen kebijakan berupa insentif dan disinsentif, seperti pajak dan regulasi yang mendukung pengembangan kepariwisataan;
l. Meningkatkan hubungan kemitraan yang bernuansa pembinaan dan saling menguntungkan antara pelaku pariwisata, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat;
m. Meningkatkan sinergitas antar lembaga terkait pengembangan wisata;
n. Mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia di bidang pariwisata serta pelajar/mahasiswa di bidang pariwisata;
o. Mengembangkan kelembagaan pengelola investasi pariwisata; dan
p. Mengembangkan kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan usaha pariwisata skala regional, nasional dan internasional.

Secara umum, kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kota Cirebon berdasarkan hasil evaluasi studi lapangan, *Focus Group Discussion* dan wawancara mendalam kepada stakeholder dan pemangku kepentingan, terlihat sebagian kebijakan dan strategi yang dapat dilaksanakan yang tercermin dari program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan. Pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan pada periode tahun 2019-2024 dilaksanakan secara parsial mengingat masing-masing perangkat daerah memiliki rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. hal ini turut menyebabkan berbagai kebijakan dan strategi tidak sinkron dengan RIPPARDA Tahun 2019-2025.

Selanjutnya evaluasi kebijakan dan strategi dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi kepariwisataan saat ini di Kota Cirebon berdasarkan pendapat dan pandangan obyektif dari para pemangku kepentingan. Instrumen yang digunakan adalah *Focus Group Discussion* dan wawancara dengan daftar pertanyaan atau kuisioner berdasarkan progam dan kegiatan yang menjadi amanat pada RIPPARDA 2019 - 2025 untuk mencapai sasaran. Adapun daftar pertanyaa dan kuisioner sebagaimana terlampir pada laporan.

Untuk lebih memfokuskan hasil pengambilan data, dilakukan kategorisasi pertanyaa berdasakan ruang lingkup RIPPARDA 2019 – 2025, yaitu:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata
2. Pembangunan Industri Pariwisata
3. Pembangunan Promosi Pariwisata
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

Berdasarkan metode deduktif, didapatkan beberpa tema/isu yang muncul untuk setiap lingkup pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata
   a. Fasilitas Pendukung; masih adanya sarana dan prasarana destinasi wisata yang belum
   b. Pengembangan Daya Tarik
   c. Tata Kelola Obyek Wisata
   d. Destinasi Terpadu Berkualitas
2. Pembangunan Industri Pariwisata
   a. Manfaat Pariwisata kepada Masyarakat
   b. Optimalisasi dan Peningkatan Infrastruktur dan Transportasi
   c. Pendanan dan Investasi Terpadu

d. Pengembangan Nilai Lokal
e. Pengembangan Wisata Budaya
f. Preservasi Obyek Wisata
g. Rencana Bisnis

3. Pembangunan Pemasaran Pariwisata
   a. Brand Image
   b. Event Wisata
   c. Pemasaan Produk Wisata
   d. Pemasaran Terpadu Kota dan Kabupaten Sekitar
   e. Pengembangan Promosi
   f. Riset Pemasaran Wisata
   g. Segmen Pasar Regional
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata
   a. Insentif dan Disinsentif
   b. Kemitraan antar Stakeholder
   c. Komitmen Masayarakat
   d. Kualitas Lembaga Pendidikan
   e. Pembinaan Masyarakat
   f. Pendampingan Pemerintah
   g. Sumber Daya Manusia (SDM) Kepariwisataan
   h. Sinergitas Lembaga

Dari hasil analisis diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata

   Pada ruang lingkup ini tema yang paling dominan adalah Pengembangan Daya Tari, tema tersebut menjadi perhatian seluruh responden ketika terkait dengan kondisi destinasi pariwisata di Kota Cirebon. Berikut adalah hasil penyaringan tema pada ruang lingkup ini:

Tabel 5. 3 Tema Ruang Lingkup Pembangunan Destinasi Pariwisata

No.	Tema	Jumlah Instrumen	Jumlah Kemunculan
1.	Fasilitas Pendukung	7	16

No.	Tema	Jumlah Instrumen	Jumlah Kemunculan
2.	Pengembangan Daya Tarik	8	28
3.	Tata Kelola Obyek Wisata	7	18
4.	Destinasi Terpadu Berkualitas	5	9

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

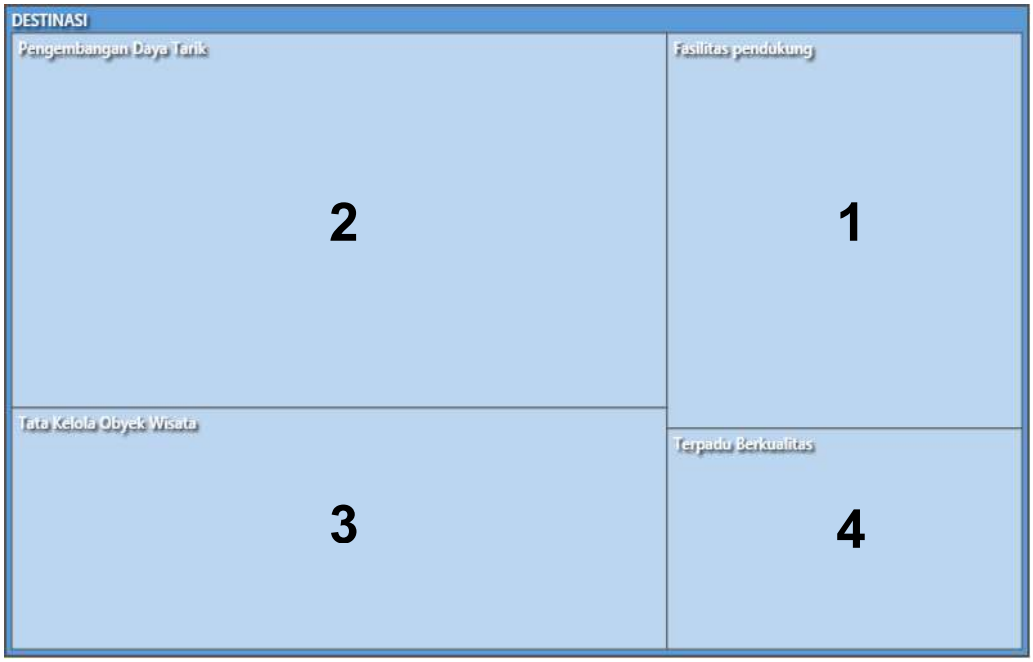

Sumber: Analisis Hasil Penelitian, 2025

Gambar 5. 6 Grafik Hirarki Tema Destinasi Pariwisata

2. Pembangunan Industri Pariwisata

   Pada ruang lingkup ini tema yang paling dominan adalah Pendanaan dan Investasi Terpadu, tema tersebut menjadi perhatian seluruh responden ketika terkait dengan kondisi industri pariwisata di Kota Cirebon. Berikut adalah hasil penyaringan tema pada ruang lingkup ini:

Tabel 5. 4 Tema Ruang Lingkup Pembangunan Industri Pariwisata

No.	Tema	Jumlah Instrumen	Jumlah Kemunculan
1.	Manfaat Pariwisata kepada Masyarakat	3	4
2.	Optimalisasi dan Peningkatan Infrastruktur dan Transportasi	7	12
3.	Pendanaan dan Investasi Terpadu	7	15
4.	Pengembangan Nilai Lokal	3	3
5.	Pengembangan Wisata Budaya	2	2
6.	Preservasi Obyek Wisata	3	9
7.	Rencana Bisnis	1	1

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

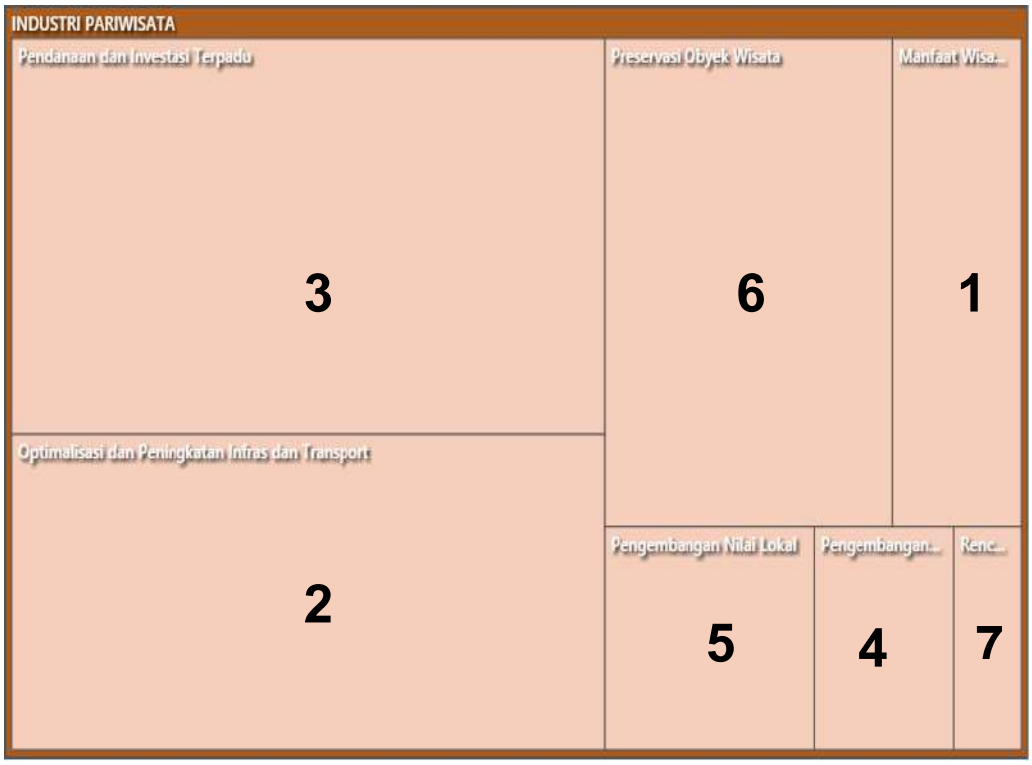

Sumber: Analisis Hasil Penelitian, 2025

Gambar 5. 7 Grafik Hirarki Tema Industri Pariwisata

3. Pembangunan Pemasarana Pariwisata

   Pada ruang lingkup ini tema yang paling dominan adalah Pengembangan Promosi, tema tersebut menjadi perhatian seluruh responden ketika terkait dengan kondisi pemasaran pariwisata di Kota Cirebon. Berikut adalah hasil penyaringan tema pada ruang lingkup ini:

Tabel 5. 5 Tema Ruang Lingkup Pembangunan Pemasaran Pariwisata

No.	Tema	Jumlah Instrumen	Jumlah Kemunculan
1.	Brand Image	5	8
2.	Event Wisata	4	8
3.	Pemasaan Produk Wisata	5	15
4.	Pemasaran Terpadu Kota dan Kabupaten Sekitar	4	6
5.	Pengembangan Promosi	6	18
6.	Riset Pemasaran Wisata	2	2
7.	Segmen Pasar Regional	4	6

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

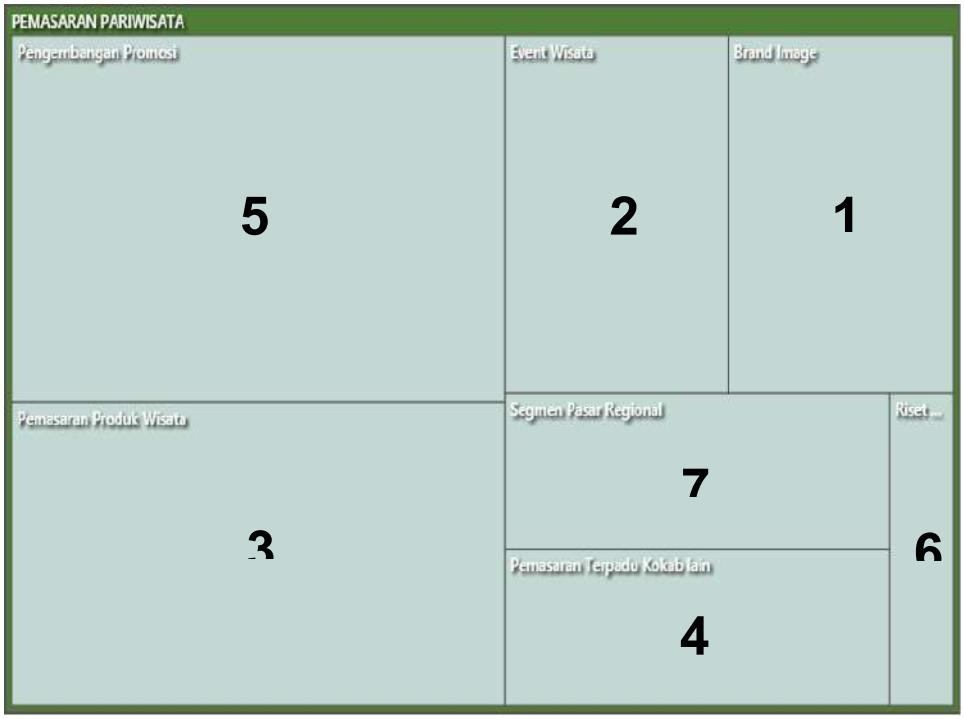

Sumber: Analisis Hasil Penelitian, 2025

Gambar 5. 8 Grafik Hirarki Tema Pemasaran Pariwisata

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

   Pada ruang lingkup ini tema yang paling dominan adalah Sinergitas Lembaga, tema tersebut menjadi perhatian seluruh responden ketika terkait dengan kondisi kelembagaan pariwisata di Kota Cirebon. Berikut adalah hasil penyaringan tema pada ruang lingkup ini:

Tabel 5. 6 Tema Ruang Lingkup Pembangunan Pemasaran Pariwisata

No.	Tema	Jumlah Instrumen	Jumlah Kemunculan
1.	Insentif dan Disinsentif	2	2
2.	Kemitraan antar Stakeholder	4	10
3.	Komitmen Masayarakat	7	11
4.	Kualitas Lembaga Pendidikan	1	1
5.	Pembinaan Masyarakat	4	4
6.	Pendampingan Pemerintah	4	8
7.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kepariwisataan	7	11
8.	Sinergitas Lembaga	6	19

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

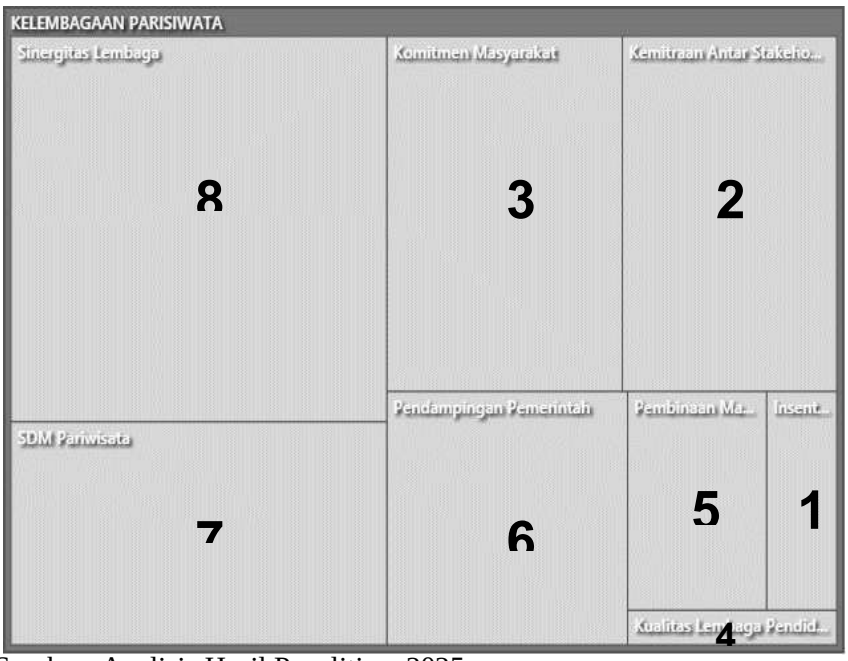

Sumber: Analisis Hasil Penelitian, 2025

Gambar 5. 9 Grafik Hirarki Tema Kelembagaan Pariwisata

5.3 Evaluasi Kesesuaian Rencana Pengembangan Perwilayahan Kepariwisataan

Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata yang meliputi Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata dan Rencanan Kawasana Pengembangan Pariwisata dan Kasawan Strategis Pengembangan Pariwisata di Kota Cirebon, berdasarkan hasil analisa data masih sesuai dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Hal ini diidentifikasikan dengan kesesuaian Rencana Kerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon terhadap rencana pengembangan perwilayahan pariwisata. Namun, belum semua lokasi terpapar kegiatan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Kota Cirebon, beberapa lokasi dikembangkan oleh pihak swasta maupun mandiri oleh pengelola obyek wisata seperti keraton.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon telah membuat Grand Desain Kepariwisataan yang mengatur rencana pengembangan pariwisata pada lokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata Kota Cirebon. Berikut Identifikasi Pengelolaan Kawasan Wisata yang termasuk dalam Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata Kota Cirebon.

Tabel 5. 7 Identifikasi Pengelolaan Kawasan Wisata di Kota Cirebon

Klaster	Daya Tarik Wisata	Pengelolaan
Wisata Budaya	Keraton Kasepuhan Keraton Kacerbonan Peguron Keprabon Masjid Agung Sang Cipta Rasa Situs Kalijaga Taman Guha Sunyaragi	Swakelola oleh lembaga internal
Wisata Buatan	Taman Ade Irma Suryani	Cirebon Wateraland
Wisata Pesisir	Kejawanan	Swakelolaoleh lembaga internal
Wisata Sejarah	Pecinan Kampung Arab	Pemerintah
Wisata Kuliner	Pusat Kota Cirebon	Pemerintah dan Swasta

Wisata Belanja	Pusat Kota Cirebon	Swasta

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

5.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan

Evaluasi pelaksanaan program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan yang diimplementasikan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai penanggung jawab utama maupun pendukung, didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2025. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan berdasarkan data lapangan dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5. 8 Capaian Kegiatan Pembangunan Destinasi Pariwisata RIPPARDA Tahun 2019-2025

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
1	**Ruang Lingkup Pembangunan Destinasi Pariwisata**														
	1	Mewujudkan daya tarik obyek wisata di Kota Cirebon berdasarkan penguatan tata kelola karakteristik produk pariwisata dan perwilayahannya	1	Membangun destinasi pariwisata Kota Cirebon terpadu, berkualitas, dan dikenal luas	1	Pembangunan Perwilayahan dan Pariwisata	1	Penyelenggaraan kegiatan sinkronisasi dan integrasi pembangunan antar destinasi wisata yang ada di Kota Cirebon	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon	Ada		Forum OPD	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
	2	Mewujudkan struktur perwilayahan pariwisata Kota Cirebon diarahkan untuk menghubungkan antara satu obyek wisata dengan obyek wisata lainnya didalam Kota Cirebon serta dengan	2	Menetapkan dan mengembangkan daya tarik obyekobyek wisata yang menunjukkan keragaman daya tarik wisata sesuai karakteristik yang ada.			2	Penyelenggaraan Kegiatan sinkronisasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan antar kota Cirebon dengan kabupaten/kota sekitar.	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon, SKPD Kota Cirebon bidang kebudayaan SKPD Kota Cirebon bidang tata ruang, SKPD Kota Cirebon bidang perhubungan	Ada	2019	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Forum Perangkat Daerah DKOKP)	Rp 21.690.500	Rp 20.890.500

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
		wilayah sekitar													
	3	Mewujudkan KSP dan KPP di Kota Cirebon	3	Mengembangkan investasi yang berpihak pada masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi pariwisata;	1	Pembangunan Daya Tarik Wisata	1	Penyusunan dan penetapan standar pembangunan dan pengelolaan untuk daya tarik wisata Kota Cirebon.	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Ada		Perda/Pewal		
	4	Meningkatkan aktivitas kesenian, kerajinan, kebudayaan Kota Cirebon yang mendukung tema produk utama kawasan di dalam klaster sebagai generator kegiatan kepariwisataan	4	Membentuk KSP Sejarah dan Budaya, serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon			2	Penyusunan road map pengembangan dan mekanisme insentif /disinsentif bagi daya tarik wisata Kota Cirebon.	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang pekerjaan umum Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Ada		Perwal		
	5	Integrasi antara kebijakan ketataruangan baik di level makro, meso	5	Menguatkan peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di			3	Penataan dan pengelolaan PKL di sekitar Kawasan keraton, dan	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Perindustrian	Tidak ada				

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
		maupun mikro		KSP Kota Cirebon				destinasi lainnya.							
	6	Memanfaatkan kawasan sepanjang pantai kesenden dan kejawanan sebagai tempat pengembangan wisata bahari terpadu, dan pemanfaatan bekas galian C sebagai area ekowisata	6	Meningkatkan keterhubungan destinasi dalam pengembangan perwilayahan pariwisata Kota Cirebon melalui pengembangan jalur-jalur beraksesibilitas tinggi			4	Dukungan pembangunan dan pembenahan infrastruktur yang ada dalam obyek wisata khususnya keraton Kota Cirebon.	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	SKPD kab/kota bidang Lingkungan hidup; SKPD Kota Cirebon bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pihak Keraton	Ada		Hibah Bantuan Keuangan		
	7	Kebijakan pengembangan produk unggulan Kota Cirebon berupa produk wisata kuliner dan belanja	7	Mengembangkan fasilitas umum sebagai tempat wisata pendukung seperti kawasan BAT, Kawasan Stadion Bima, Taman dan Alun-alun, *Main Street* dan Shopping Street, Sky Walk/Sky Bridge			5	Pemantauan dan evaluasi penerapan standar pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata Kota Cirebon.	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon, SKPD Kota Cirebon bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang; Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Ada		Monev CHSE		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
			8	Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu disepanjang Pantai Kesenden dan Kejawanan yang bernuansa sejarah dan budaya			6	Pemberian insentif/ disinsentif bagi daya tarik wisata Kota Cirebon.	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Ada	2020	CHSE (APBN)	Rp 18.000.000.000	Rp 16.000.000.000
			9	Menguatkan tata kelola wisata keraton dan klaster pendukung lainnya untuk meningkatkan image tradisi dan sejarah	1	Pengembangan Investasi Pariwisata	1	Penyusunan naskah akademik dan penetapan kebijakan investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat.	Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata, Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Ada	Tahun 2022	Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp. 45.424.524;	Rp. 45.321.833;
												Tahun 2023	Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penanaman Modal	Rp. 51.764.967;	Rp. 51.655.167;
							2	Penyusunan feasibility study terhadap pengembangan kawasan pantai kesenden dan pantai kejawanan,	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang penanaman modal, SKPD Kota Cirebon Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada		FS Kampung Benda Kerep	Rp 499.745.000	Rp 489.029.880

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
								serta wisata Alam di Argasunya.							
							3	Sosialisasi kebijakan investasi yang berpihak pada masyarakat kepada investor dan masyarakat.	Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata, SKPD Kota Cirebon bidang komunikasi dan Informatika	Ada	Tahun 2022	Bimtek Implementasi Pengawasan OSS RBA	Rp. 133.533.050; (Dana DAK Non Fisik : Rp. 99. 823.750; dan Dana APBD : Rp. 34.709.300;)	Rp. 125.533.050; (Dana DAK Non Fisik : Rp. 94. 823.750; dan Dana APBD : Rp. 30.709.300;)
												Tahun 2023	Bimtek Pengisian LKPM Online	Rp. 41.932.000	Rp. 41.732.000
							4	Penyusunan dan penerapan mekanisme insentif bagi investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat.	Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata, BPPPPD Kota Cirebon	Tidak Ada				
					1	Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	1	Penyusunan rencana Kawasan Keraton sebagai kawasan Strategis Pariwisata Kota Cirebon yang	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon; SKPD Kota Cirebon bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SKPD kota bidang lingkungan	Ada	2019	DED Kampung Wisata Benda Kerep, dan DED Kampung Wisata Kanoman Utara	Rp 499.745.000	Rp 489.029.880

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
								diarahkan untuk dapat menjalankan fungsi strategisnya.		hidup, Pihak Keraton					
							2	Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kepariwisataan keraton sebagai kawasan strategis.	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon, SKPD Kota Cirebon bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada		Monev		
					1	Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	1	Penyusunan rencana pembangunan kawasan pengembangan pariwisata kota cirebon	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon, SKPD Kota Cirebon bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada	2019	DED Kampung Wisata Benda Kerep, dan DED Kampung Wisata Kanoman Utara	Rp 499.745.000	Rp 489.029.880
											Ada	2023	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kab/Kota (Kampung Arab)	Rp 75.000.000	Rp 74.844.000

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
							2	Penyusunan bersama rencana Kota Cirebon sebagai Pusat kawasan sejarah dan keraton Cirebon dan sekitarnya.	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon, SKPD Bidang Komunikasi dan Informatika; SKPD terkait Pariwisata di Kab/Kota Sekitar	Ada		FKN (Festival Keraton Nusantara)		
							3	Penyepakatan pembagian peran dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata Kota Cirebon.	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon, SKPD Kota Cirebon bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pihak-Pihak terkait	Tidak ada				
							4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kepariwisataan Kota cirebon.	Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon, SKPD Kota Cirebon Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada		Monev		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
					1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	1	Penyelenggaraan kegiatan gerakan peningkatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pariwisata di lingkungan-nya.	Perangkat Daerah bidang Pariwisata	SKPD kota bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perguruan tinggi bidang kepariwisataan, Organisasi masyarakat sekitar obyek wisata	Ada	2018	Pembinaan Pokdarwis (Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata)	Rp 109.140.000	Rp 108.218.000
							2	Pembentukan kelompok kerja lokal pariwisata dalam rangka meningkatkan keindahan dan kenyamanan lingkungan sekitar keraton.	Perangkat Daerah bidang Pariwisata	Pihak Keraton/pengelola obyek wisata; SKPD Bidang Lingkungan Hidup; SKPD Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ada		Pembentukan Pokdarwis		
							3	Pemantauan dan evaluasi peran serta masyarakat sekitar tempat wisata.	Perangkat Daerah bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon, Organisasi Masyarakat, SKPD Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Ada		Monev		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
					1	Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata	1	Peningkatan kualitas keamanan dan keselamatan jalur kereta api	Perangkat Daerah bidang Perhubungan	SKPD Kota Cirebon bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang, BUMN di bidang perkeretaapian.	Tidak Ada		Sosialisasi di Perlintasan Sebidang		
							2	Peningkatan kualitas armada bis umum sebagai angkutan massal yang menghubungkan kota utama di Kota Cirebon dengan Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah, Jawa Timur	Perangkat Daerah bidang Perhubungan	BUMN di bidang angkutan umum, Organisasi angkutan umum, Asosiasi/pengusaha travel	Ada	2025	Kajian Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Rp80.000.000	

Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
				Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
			3 Pengembangan kerja sama dengan PT. Pelni dalam membuat jalur wisata laut yang menghubungkan Kota Cirebon dengan destinasi utama pariwisata bahari di Indonesia	Perangkat Daerah bidang Perhubungan	Kementerian bidang kelautan, SKPD Kota Cirebon Kota Cirebon Bidang pariwisata, SKPD Kota Cirebon bidang kelautan, BUMN di bidang angkutan umum laut, Organisasi angkutan umum laut	Tidak ada				
			4 Pembentukkan kerjasama dengan PT. Dirgantara Kertajati untuk meningkatkan kunjungan wisnus dan wisman	Perangkat Daerah bidang Perhubungan	Kementerian bidang perhubungan, SKPD Kota Cirebon bidang kepariwisataan, BUMN di bidang perhubungan udara, Organisasi perhubungan udara	Tidak Ada				
			5 Peningkatan kualitas jalan menuju daya tarik wisata Kota Cirebon di Kawasan	Perangkat Daerah bidang Perhubungan	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata, SKPD kota bidang pekerjaan	Tidak ada				

Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
					Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
				Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan		umum dan Penataan Ruang					
			6	Penyediaan rute, dan armada angkutan umum, dan Angkutan wisata	Perangkat Daerah bidang Perhubungan	KPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Ada	2022	Penyelenggaraan Bus TransCirebon	Rp2.000.000.000	Rp1.850.000.000
			7	Pembuatan gapura pintu masuk dari arah barat dan petunjuk arah menuju destinasi wisata	Perangkat Daerah bidang Perhubungan	KPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Tidak Ada				
			8	Penyusunan rute wisata antar kabupaten/Kota sekitar Kota Cirebon dalam kerangka MCR	BPPPPD	BPPPPD Kabupaten/Kota Sekitar Cirebon, SKPD pariwisata	Tidak ada				

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
					1	Pembangunan Objek Wisata Baru	1	Penyusunan rencana pemanfaatan fasilitas umum (lingkungan BAT, GOR Bima, gedung Korpri) sebagai pendukung wisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon, BPMPP, SKPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada		Kajian/Studi Teknis BAT		
							2	Penataan lingkungan BAT, GOR Bima, gedung Korpri sebagai daya dukung wisata Kota Cirebon	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum	BPPPPD Kota Cirebon, BPMPP, SKPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada				
					1	Pembangunan Objek Wisata Baru	1	Penyusunan rencana wisata bahari terpadu	Perangkat Daerah bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon, BPMPP, SKPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada		DED Kejawanan		
							2	Sosialisasi dan negosiasi bagi calon investor	DPMPTSP	BPPPPD Kota Cirebon, BPMPP, SKPD pekerjaan umum	Ada	2019	Pameran nasional harmony fair hari jadi kota kediri ke 1140	Rp 81.168.000	Rp 79.768.000

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
											Ada	2022	Pameran Blitar Djadoel Festival 2022 dalam Rangka memperingati Bulan Bung karno	Rp 55.839.000	Rp 45.868.350
											Ada	2023	Pameran Jogya Trade plus Jogjakarta	Rp 63.995.150	Rp 63.510.150
											Ada	2024	Pameran APEKSI Indonesia City Expo ke 20 Balikpapan Kalimantan Timur	Rp 85.493.280	Rp 75.940.000
													Pameran Malang ITT Expo 2024	Rp 113.416.840	Rp 103.966.100
							3	Penataan kawasan kesenden sebagai wisata bahari terpadu	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum	SKPD parwiisata dan kebudayaan, BPMPP	Tidak ada				

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
					1	Peningkatan dan Pengelolaan Infrastruktur Pendukung Pariwisata	1	Sosialisasi pengelolaan jaringan air buangan, limbah, & sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata, SKPD Kota Cirebon Bidang lingkungan hidup	Tidak ada				
							2	Penataan lingkungan keraton untuk meningkatkan keindahan dan kenyamanan menuju dan di tempat lokasi wisata	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata, SKPD Kota Cirebon Bidang lingkungan hidup	Tidak ada				
							3	Pelatihan dan pendampingan penerapan sistem jaringan air buangan dan limbah serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan bagi usaha pariwisata dan desa wisata	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata, SKPD Kota Cirebon Bidang lingkungan hidup	Tidak ada				

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
							4	Penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan kepada usaha pariwisata, desa wisata, dan kelompok masyarakat yang telah konsisten dan inovatif dalam menerapkan pengelolaan air buangan, limbah, dan sampah yang ramah lingkungan	Perangkat Daerah bidang Pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata, SKPD Kota Cirebon Bidang lingkungan hidup	Ada		CHSE		
					2	Peningkatan Kualitas Fasilitas Pariwisata	1	Penyusunan dan penetapan pedoman penerapan nilai kearifan lokal pada pengelolaan dan pelayanan fasilitas pariwisata.	Perangkat Daerah bidang Pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Kebudayaan, SKPD Kota Cirebon bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Tidak ada				

Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
					Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
			2	Sosialisasi dan pendampingan pedoman penerapan nilai kearifan lokal pada pengelolaan dan pelayanan fasilitas pariwisata	Perangkat Daerah bidang Kebudayaan	SKPD Kota Cirebon bidang kepariwisataan, SKPD Kota Cirebon bidang Kepemudaan dan Olah Raga, Perguruan tinggi bidang Kepariwisataan	Tidak ada				
			3	Pemantauan dan evaluasi penerapan standar pengelolaan pelayanan yang memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.	Perangkat Daerah bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon	Ada	2024	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
			4	Pemberian insentif kepada pengelola fasilitas pariwisata yang menerapkan standar pengelolaan pelayanan yang	Perangkat Daerah bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon, SKPD bidang kebudayaan, Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Pariwisata, Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Ada		CHSE		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
								memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal							
					3	Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum	1	Sosialisasi standar untuk fasilitas kesehatan di kota cirebon	Perangkat Daerah bidang Kesehatan	SKPD Kota Cirebon bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang, SKPD bidang lingkungan hidup	Tidak ada				
							2	Sosialisasi standar untuk fasilitas peribadatan	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Tidak ada				
							3	Sosialisasi standar pelayanan untuk fasilitas keuangan di kota cirebon	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Tidak ada				
							4	Sosialisasi standar pelayanan untuk fasilitas keamanan dan keselamatan	Perangkat Daerah bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	SKPD Bidang Komunikasi dan Informatika	Tidak ada				

Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
					Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
				di kota cirebon.	Serta Perlindungan Masyarakat						
			5	Sosialisasi standar untuk fasilitas komunikasi di kota cirebon	Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika	Pengusaha komunikasi	Tidak ada				
			6	Pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan untuk fasilitas-fasilitas yang ada	Perangkat Daerah bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon, Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Ada	2022	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaen/kota (dokumen hasil pembinaan usaha kepariwisataan)	Rp 103.220.540	Rp 98.580.540
			6					2023	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaen/kota (dokumen hasil pembinaan usaha kepariwisataan)	Rp 73.367.600	Rp 73.367.600

Tabel 5.1.
Capaian Kegiatan Pembangunan Industri Pariwisata RIPPARDA Tahun 2019-2025

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
2	**Runag Lingkup Pembangunan Industri Pariwisata**														
	1	Mengembangkan produk wisata Kota Cirebon diarahkan untuk memperkuat tema utama kawasan dan memberikan manfaat bagi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat	1	Memperkuat tema utama kawasan yaitu wisata budaya melalui diversifikasi dan pengembangan objek serta daya tarik wisata budaya	1	Peningkatan Daya Saing Pariwisata	1	Meningkatkan peran usaha mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah untuk dan usaha informal dalam mendukung daya saing pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Perindustrian	BPPPPD Kota Cirebon SKPD kota bidang pariwisata	Tidak ada				
	2	Mengembangkan objek dan daya tarik wisata lain di dalam kawasan untuk mendukung tema wisata yang sudah dirumuskan	2	Memprioritaskan pengembangan produk wisata yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik manfaat ekonomi maupun manfaat sosial budaya			2	Mengembangkan produk wisata eks galian sebagai wisata alam buatan berupa ekowisata dan agrowisata sebagai salah satu upaya pelestraian lingkungan di Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon SKPD Kota Cirebon bidang Kebudayaan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Tidak ada		-		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
	3	Mengembangkan produk wisata yang khas, unik dan berdaya saing serta mendukung upaya konservasi, preservasi, dan rehabilitasi serta pemberdayaan masyaraka	3	Meningkatkan upaya preservasi terhadap objek wisata yang sudah langka			3	Menigkatkan Kualitas ruang/spasal melalui penonjolan karakter desain arsitektural yang berciri khas lokal	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon SKPD Kota Cirebon bidang Kebudayaan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Ada	2019	DED Kampung Wisata Benda Kerep, dan DED Kampung Wisata Kanoman Utara	Rp 499.745.000	Rp 489.029.880
	4	Meningkatkan efisiensi kinerja jaringan transportasi eksisting dan skenario pengembangan transportasi di Kota Cirebon melalui pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada baik kuantitas maupun kualitasnya dalam menunjang pariwisata	4	Meningkatkan kualitas produk wisata dengan standar kualitas nasional dan internasional	1	Peningkatan Daya Saing Produk Industri Pariwisata	1	Sosialisasi produk dan pengelolaan usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat, beretika dan bertanggung jawab	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi bidang kepariwisata an SKPD bidang lingkungan hidup	Tidak ada		-		
	5	Mendorong pembangunan infrastruktur kawasan dengan pemerintah sebagai pemain utama, serta peningkatan pelibatan dunia usaha dan masyarakat dalam	5	Meningkatkan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata dalam rangka memberikan kenyamanan			2	Pelatihan dan pendampngan pengembangan produk dan pengelolaan usaha pariwisata yang berwawasan	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi bidang kepariwisata an SKPD bidang	Ada	2019	Bimtek Ekraf (pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata) Pemilihan Jaka Rara	Rp 570.105.000	Rp 559.451.800

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
		pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan pariwisata Kota Cirebon		dan keamanan di kawasan pariwisata, baik dari faktor fisik maupun psikologis				lingkungan, berbasis masyarakat, beretika dan bertanggung jawab		lingkungan hidup					
	6	Penyederhanaan/pemberian kemudahan/insentif bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dibidang kepariwisataan maupun industri kerajinan berbahan baku lokal dan atau yang terkait pengembangan pariwisata Kota Cirebon	6	Mengembangkan nilai-nilai lokal dalam pengembangan produk wisata			3	Pemantauan dan Evaluasi penerapan prinsip berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat, beretika dan bertanggung jawab dalam pengembangan produk dan pengelolaan usaha pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi bidang kepariwisataan SKPD bidang lingkungan hidup	Tidak ada		-		
	7	Meningkatkan investasi sarana dan prasarana wisata maupun industri kerajinan, khususnya di lokasi-lokasi yang menjadi daya tarik wisata	7	Meningkatkan kualitas ruang/spasial melalui penonjolan karakter desain arsitektural yang beciri khas lokal	1	Pengembangan Kemitraan Industri Pariwisata	1	Penyelenggaraan Kesepahaman Bersama antara industri pariwisata Kota Cirebon dengan industri pariwisata lain dalam Pengembangan SDM	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	- SKPD kab/kota bidang perindustrian - SKPD Kota Cirebon bidang Sosial dan tenaga kerja	Ada		Bimtek Ekraf (pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata) Pemilihan Jaka Rara	Rp 570.105.000	Rp 559.451.800

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
								melalui pelatihan dan program magang yang konsisten dan berkesinambungan							
											Ada	2023	Bimtek SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Dasar	Rp 361.947.748	Rp 359.024.648
			8	Mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi maupun infrastruktur di kawasan, dengan penggunaan sumber daya seefisien mungkin			2	Penyelenggaraan Kesepahaman Bersama antara industri pariwisata Kota Cirebon dengan industri pariwisata dalam rangka sertifikasi standar pelayanan dan berwawasan lingkungan	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	- SKPD Kota Cirebon bidang perindustrian - ASPPI SKPD bidang Lingkungan Hidup	Ada		MoU		
			9	Mengevaluasi efisiensi kinerja jaringan transportasi dan			3	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Industri Pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Perguruan tinggi bidang kepariwisataan ASPPI Media	Ada		FGD apakah ada?		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
				infrastruktur eksisting di kawasan dan perumusan skenario pengembangannya				Kota Cirebon secara reguler		SKPD bidang informasi dan komunikasi					
			10	Pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah, khususnya yang berada diobjek dan daya tarik wisata sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan			4	Penyelenggaraan Forum Kemitraan antara industri pariwisat Kota Cirebon dengan industri pariwisata skala nasional di Indonesia secara berkelanjutan	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	SKPD bidang Perindustrian ASPPI Media SKPD bidang informasi dan komunikasi	Tidak ada		-		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
			11	Mengembangkan sistem, dan prosedur pengembangan investasi terpadu dengan sektor terkait	1	Pengembangan Kemitraan Industri Pariwisata	1	Perumusan dan penetapan model kmutraan antara usaha pariwisata skala besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	- SKPD Kota Cirebon bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Asosiasi usaha pariwisata - SKPD Bidang perdagangan	Tidak ada		-		
			12	Mengembangkan *Business Plan* yang kuat dalam mengembangkan dan mengelola kepariwisataan			2	Penerapan model kemitraan antara usaha pariwisata skala besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di lokasi terpilih	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	- SKPD Kota Cirebon bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Asosiasi usaha pariwisata - SKPD Bidang perdagangan	Tidak ada		-		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
			13	Membuat standarisasi dan kode etik pariwisata di berbagai usaha pariwisata			3	Pemantauan dan evaluasi penerapan model kemitraan antara usaha pariwisata skala besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di lokasi terpilih	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	- BPPPPD Kota Cirebon SKPD Kota Cirebon bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Asosiasi usaha pariwisata - SKPD Bidang perdagangan	Tidak ada		-		
			14	Standarisasi wisata kuliner dan belanja terkait industri kecil dan menengah	1	Pengembangan Produk Usaha Pariwisata	1	Penyelenggaraan Pertemuan bisnis antara usaha pariwisata dengan industri kreatif skala mikro, kecil, dan menengah	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	- BPPPPD Kota Cirebon SKPD Kota Cirebon bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Asosiasi usaha pariwisata - SKPD Bidang perdagangan	Tidak ada		-		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
							2	Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk industri kreatif agar sesuai kebutuhan usaha pariwisata.	SKPD Kota Cirebon bidang Perindustrian	SKPD Kota Cirebon bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Asosiasi usaha Pariwisata	Tidak ada				
					1	Pengembangan Produk Usaha Pariwisata	1	Penyusunan dan penetapan sistem pembinaan berkesinambungan oleh industri pariwisata skala besar kepada industri skala mikro, kecil, dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai indutri pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Perindustrian	SKPD Kota Cirebon bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Asosiasi usaha Pariwisata	Tidak ada				
							2	Sosialisasi sistem pembinaan berkesinambungan oleh industri pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Perindustrian	SKPD Kota Cirebon bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tidak ada				

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
										Asosiasi usaha Pariwisata					
							3	Pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pembinaan berkesinambungan oleh industri pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Perindustrian	- SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Tidak ada				
					1	Peningkatan kredibilitas Bisnis Industri Pariwisata	1	Penyusunan, Penetapan, dan sosialisasi mekanisme insentif bagi usaha pariwisata yang telah menjalankan kemitraan berjangka panjang dengan industri pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Kepariwisataan	BPPPPD Kota Cirebon Sekretariat Daerah SKPD perindustrian	Tidak ada		-		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
							2	Pemberian Insentif bagi usaha pariwisata yang telah menjalankan kemitraan berjangka panjang dengan industri pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Asosiasi pengusaha pariwisata	Tidak ada		-		
							3	Penyelenggaraan Pelatihan, Pendampingan dan fasilitasi bagi pengajuan industri pariwisata sebagai bagian dari jejaring industri	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Asosiasi pengusaha pariwisata SKPD bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan	Tidak ada		-		
					2	Peningkatan Tanggungjawab Industri Pariwisata terhadap Lingkungannya	1	Penyelenggaraan Kajian Pengembangan mekanisme insentif bagi industri pariwisata yang berwawasan lingkungan dan mendukung	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang perindustrian BPPPPD Kota Cirebon SKPD Bidang Lingkungan Hidup	Tidak ada		-		

Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
				Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
			pelestarian budaya melalui dukungan investasi dan pemasarn pariwisata.							
			2 Penyelenggaraan koordinasi antara SKPD Kota Cirebon bidang investasi dan kepariwisataan dalam rangka pengembangan bentuk insentif bagi industri pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	- SKPD Kota Cirebon bidang Penanaman modal - SKPD Kota Cirebon bidang perindustrian - Sekretariat Daerah	Tidak ada		-		
			3 Penyusunan regulasi dan penetapan serta sosialisasi insentif bagi industri pariwisata yang berwawasan lingkungan dan mendukung pelestarian	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Penanaman modal SKPD Kota Cirebon bidang perindustrian Sekretariat Daerah SKPD Bidang Kebudayaan	Tidak ada		-		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
								budaya melalui dukungan investasi dan pemasaran pariwisata							
							4	Pemberian insentif bagi usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan dan mendukung pelestarian budaya.	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Lingkunga Hidup Sekretariat Daerah	Tidak ada		-		
					1	Peningkatan Daya Saing Usaha Pariwisata	1	sosialisasi standar usaha pariwisata dan kode etik pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Asosiasi usaha Pariwisata	Ada		Bimtek Ekraf (pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata) Pemilihan Jaka Rara	Rp 570.105.000	Rp 559.451.800
							2	Pelatihan dan Pendampingan Penerapan standar usaha pariwisata dan kode etik pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	- Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Tidak ada		-		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
							3	Sertifikasi usaha Pariwisata dan Penyelenggaraan pendampingan pengajuan sertifikasi Nasional	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Kementerian bidang kepariwisataan Lembaga sertifikasi usaha pariwisata	Ada	2020	CHSE (APBN)	Rp 18.000.000.000	Rp 16.000.000.000
							4	Sertifikasi usaha Pariwisata dan Penyelenggaraan Pendampingan pengajuan srtifikasi internasional	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Kementerian bidang kepariwisataan Lembaga sertifikasi usaha pariwisata	Ada	2020	CHSE (APBN)	Rp 18.000.000.000	Rp 16.000.000.000
							1	Mekanisme seleksi *brand identify* dan aksentuasi produk	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPD Kota Cirebon SKPD bidang Perindustrian Perguruan tinggi bidang kepariwisataan Asosiasi Pengusaha Pariwisata	Tidak ada		-		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
							2	Penyelenggaraan event-event seni kreatif, budaya secara rutin	SKPD Pariwisata	Asosiasi Pariwisata SKPD bidang Komunikasi dan Informatika	Ada	2019	Launching Calendar of Event Tahun 2019 dengan rangkaian acara Travel Dialog/Travel Mart, dan Promosi Pariwisata	Rp 651.440.000	Rp 628.550.700
											Ada	2018	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara (Promosi Pariwisata pada event pameran luar daerah dan terlaksanany a Festival Kopi)	Rp 321.040.000	Rp 312.040.000
											Ada	2022	Penyelenggaraan Event berbasis ekonomi kreatif	Rp 861.712.600	Rp 624.425.500
							3	Sosialisasi dan simbolisasi *brand identify* kepada pelaku usaha dan industri pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPD Kota Cirebon SKPD bidang Perindustrian Asosiasi Pengusaha Pariwisata	Ada	2019	Launching Calendar of Event Tahun 2019 dengan rangkaian acara Travel Dialog/Travel Mart, dan	Rp 651.440.000	Rp 628.550.700

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
													Promosi Pariwisata		
							4	Sosialisasi *brand identify* pariwisata Kota Cirebon dalam skala nasional dan internasional	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Asosiasi Pariwisata SKPD bidang Komunikasi dan Informatika	Ada	2019	Launching Calendar of Event Tahun 2019 dengan rangkaian acara Travel Dialog/Travel Mart, dan Promosi Pariwisata	Rp 651.440.000	Rp 628.550.700
					1	Peningkatan daya tarik usaha pariwisata	1	Penataan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas dalam obyek wisata dengan penyediaan tempat-tempat photo dan lainnya	Pelaku Usaha dan Industri Pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang pekerjaan umum dan penataan runag SKPD bidang lingkungan hidup	Ada	2024	Pengembangan amenitas Wisata Kampung Arab Panjunan	Rp 3.500.000.000	Rp 1.800.000.000
							2	Penataan alur jalan atau sirkulasi pengunjung di dalam obyek wisata	SKPD Kota Cirebon bidang perhubungan	BUMN di bidang angkutan umum Organisasi angkutan umum SKPD bidang Pariwisata	Ada		Penataan Sirkulasi Lalu Lintas dalam Kawasan Wisata		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
							3	Pemeliharaan dan penambahan interior bernilai budaya lokal untuk menambah keindahan obyek-obyek wisata	Pengelola Obyek Wisata	SKPD Kota Cirebon Bidang Pariwisata	Ada	2024	Penyediaan Prasaran (Zona Kreatif /Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi , berpromosi dan berinteraksi	Rp 350.000.000	Rp 340.000.000
							4	Penggunaan metal detector pada pintu masuk obyek pariwisata	SKPD Cirebon bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	SKPD Kota Cirebon Bidang kepariwisataan	Tidak ada				
					1	Penerapan tanggung jawab industri pariwisata terhadap alam dan budaya	1	Penyelenggaraan Kajian pengembangan kompensasi bagi industri pariwisata yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dan pelayanan berwawasan	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon SKPD Bidang Lingkungan Hidup Perguruan tinggi bidang Kepariwisataan	Tidak ada		-		

Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
					Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
				lingkungan serta norma-norma sosial budaya Kota Cirebon,							
			2	Pengembangan Indikator dan tolak ukur yang seragam bagi upaya pemantauan dan evaluasi terhadap industri pariwisata di Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon SKPD Bidang Lingkungan Hidup Perguruan tinggi bidang Kepariwisataan	Tidak ada		-		
			3	Penandatanganan Kesepahaman bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dan Pengelola industri pariwisata dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi industri pariwisata berwawasan lingkungan dan berbasis norma sosial	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon SKPD Bidang Lingkungan Hidup Perguruan tinggi bidang Kepariwisataan	Ada	2020	CHSE (APBN)	Rp 18.000.000.000	Rp 16.000.000.000

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
								budaya Kota Cirebon							
							4	Pembentukan tim pemantauan dan evaluasi bersama di Tingkat Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon SKPD Bidang Lingkungan Hidup Perguruan tinggi bidang Kepariwisataan	Ada	2022	Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 103.220.540	Rp 98.580.540
					1	Peningkatan daya saing investasi industri pariwisata	1	Evaluasi prosedur investasi dan perizinan usaha pariwisata di Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang Penanaman Modal	SKPD Kota Cirebon bidang Kepariwisataan, bidang perindustrian	Ada	Tahun 2022	Sosialisasi OSS RBA Ke SKPD (DPUTR, DLH, DPRKP, DISBUDPAR, DISDIK, DKP3) Kota Cirebon	Rp23.908.350	Rp23.908.350
							2	Sosialisasi hasil evaluasi dan rekomendasi prosedur investasi dan perizinan yang lebih efektif	SKPD Kota Cirebon bidang Penanaman Modal	SKPD Kota Cirebon bidang Kepariwisataan, bidang perindustrian	Ada	Tahun 2022	Sosialisasi OSS RBA Pada Pelaku Usaha di Kota Cirebon	Rp40.667.850	Rp40.667.850

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
							3	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan rekomendai prosedur investasi dan perizinan usaha pariwisata yang lebih efektif	SKPD Kota Cirebon bidang Penanaman Modal	SKPD Kota Cirebon bidang Kepariwisataan, bidang perindustrian - Asosiasi usaha pariwisata Kota Cirebon	Tidak Ada				
					1	Penguatan struktur industri pariwisata	1	Penyusunan basis data industri pariwisata kota cirebon berbasis teknoligi informasi	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	SKPD kota cirebon bidang komunikasi dan informatika - SKPD Kota Cirebon Bidang penanaman modal - Perguruan tinggi bidang Kepariwisataan dan teknologi informasi	Ada	2022	Wistakon (penguatan promosi pariwisata melalui publikasi media)	Rp 98.828.894	Rp 93.668.122

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
							2	Pelatihan dan Pendampingan penyusunan basis data industri pariwisata Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	KPD kota Cirebon bidang komunikasi dan informatika - SKPD kota Cirebon bidang penanaman modal - Perguruan tinggi bidang kepariwisata an - Perguruan tinggi bidang teknologi informasi	Ada		-		
							3	Pemutakhiran basis data industri kepariwisataan	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	SKPD kota cirebon bidang komunikasi dan informatika , bidang penanaman modal - Perguruan tinggi bidang Kepariwisat aan dan	Ada	2018	Pengembang an dan penguatan informasi database	Rp 125.000.00 0	Rp 123.500.00 0

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
										teknologi informasi					

Tabel 5.2.
Capaian Kegiatan Pembangunan Pemasaran Pariwisata RIPPARDA Tahun 2019-2025

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
3	**Ruang Lingknp Pembangunan Pemasaran Pariwisata**														
	1	Mengembangkan segmen pasar wisatawan rekreasi dan budaya sebagai segmen pasar potensial serta segmen pasar wisatawan minat Khusus sebagai segmen pasar baru	1	Mempertahankan dan memperkuat segmen pasar wisatawan utama saat ini, yaitu wisatawan nusantara lokal dan regional untuk kegiatan budaya, khususnya Bandung dan wilayah sekitar, serta wisatawan nusantara dan mancanegara yang melalui jalur Jawa Tengah/Timur	1	Pengembangan Pasar Wisatawan	1	Mempertahankan dan memperkuat segmen pasar wisatawan utama saat ini, yaitu wisatawan nusantara lokal dan regional untuk kegiatan budaya, khususnya Bandung dan wilayah sekitar, serta wisatawan nusantara dan mancanegara yang melalui jalur Jawa	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon	Ada	2019	Promosi Pariwisata pada Event Kepariwisataan di dalam dan Luar Daerah	Rp 651.440.000	Rp 628.550.700

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
				menuju Lampung/DKI Jakarta (overland tourists)				Tengah/Timur menuju lampung/DKI Jakarta (overland tourists).							
	2	Mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai untuk pasar wisatawan rekreasi, budaya, dan wisatawan mancanegara dengan memanfaatkan teknologi informasi	2	Mengembangkan segmen baru pasar wisatawan sesuai dengan arah pengembangan produk pariwisata yang bertema utama wisata budaya, serta tema pendukung wisatalainnya			2	Sosialisasi pasar utama wisnus kota cirebon dan usaha pariwisata.	BPPD Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang kepariwisataan Asosiasi usaha pariwisata	Tidak ada				
	3	Mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu dengan kawasan wisata unggulan di wilayah sekitar Kota Cirebon, secara efektif dan efisien	3	Memperluas segmen pasar wisatawan rekreasi dengan menangkap potensi pasar dari kota-kota besar di sekitar Kota Cirebon			3	Penelitian preferensi dan kebutuhan pasar utama wisnus terhadap produk pariwisata Kota Cirebon.	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPD Kota Cirebon, Perguruan tinggi bidang Kepariwisataan dan Perguruan Tinggi bidang pemasaran	Tidak ada		-		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
	4	Promosi terpadu investasi pariwisata di Kawasan Jawa Barat, maupun Indonesia dan mancanegara, dengan promosi sektor-sektor lainnya, khususnya industri kerajinan	4	Mengembangkan segmen pasar wisatawan minat khusus budaya, termasuk kuliner, belanja, serta wisatawan minat khusus wisata ekonomi kreatif, seperti pembelajaran dan pelatihan mengenai batik Cirebon	1	Pengembangan Pasar Wisatawan	1	Sosialisasi pasar utama wisman Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	Asosiasi dan Pelaku Usaha Pariwisata	Ada	2024	Promosi Luar Negeri/Batam/Bali (Hibah PHRI-Sales Mission dan Table Top)	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
											Ada	2023	Promosi Luar Daerah (Hibah PHRI-Sales Mission dan Table Top)	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
			5	Memasarkan produk wisata kawasan dengan tema budaya dan religi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi			2	Penelitian Preferensi dan Kebutuhan Pasar	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Perguruan tinggi bidang kepariwisataan perguruan tinggi bidang pemasaran	Tidak ada		-		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
			6	Memasarkan produk wisata dalam kerangka konsep Tourism, Trade, and Investment, khususnya dengan industri kerajinan kecil dan menengah	1	Pengembangan Pasar Wisatawan	1	Penandatanganan kesepakatan dalam pemenuhan segmen pasar wisatawan rekreasi dengan menangkap potensi pasar dari kota-kota besar di sekitar kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi bidang pariwisata	Ada	2020	MoU dengan Daerah Lain (Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana dengan Kab. Sumedang, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, dan Kota Cirebon)		
			7	Memasarkan produk wisata budaya secara terpadu dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat			2	Penandatanganan kesepakatan dalam pemenuhan segmen pasar wisatawan minat khusus budaya, termasuk kuliner, belanja, serta wisatawan minat khusus wisata ekonomi kreatif, seperti pembelajaran dan pelatihan mengenai batik Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi bidang pariwisata	Ada	2019	Launching Calendar of Event Tahun 2019 dengan rangkaian acara Travel Dialog/Travel Mart, dan Promosi Pariwisata	Rp 651.440.000	Rp 628.550.700

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
			8	Mengembangkan berbagai teknik promosi (direct marketing, iklan, sale promotion, travel trade) secara tepat guna dan tepat sasaran			3	Penandatangan kesepakatan dalam pemenuhan segmen pasar wisata budaya, khususnya kawarasan perkotaan dan pendidikan Bandung, Kawasan minat khususnya budaya pesisir Kota Cirebon dan destinasi pariwisata budaya lainnya di Indonesi	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi bidang pariwisata	Ada		MoU dengan Bandung		
			9	Menyelengarakan event-event internasional terkait wisata	1	Promosi Pariwisata	1	Koordinasi pemanfaatam infrastruktur teknologi informasi dan komuikasi serta analisis data yang dibangun.	SKPD Kota Cirebon bidang komunikasi dan informatika	SKPD Kota Cirebon bidang kepariwisataan BPPPPD Kota Cirebon	Tidak ada				
			10	Mengembangkan riset pasar kebutuhan wisatawan nasional dan internasional			2	Pelaksanaan pemanfaatan infrastrutur teknologi informasi dan komunikasi	SKPD Kota Cirebon bidang komunikasi dan	SKPD Kota Cirebon bidang kepariwisataan, BPPPPD Kota Cirebon	Tidak ada				

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
				berbasis riset yang handal				serta analisis data yang dibangun	informatika						
			11	Memunculkan Brand Identity kawasan wisata melalui pengembangan Brand Image yang didukung oleh seleksi dan aksentuasi produk, serta slogan dan simbolisasi			3	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta analisis data yang dibangun	SKPD Kota Cirebon bidang komunikasi dan informatika	SKPD Kota Cirebon bidang kepariwisataan, BPPPPD Kota Cirebon	Tidak ada				
			12	Meningkatkan kerjasama promosi investasi dengan sektor lain, khususnya industri kerajinan, industri makanan dan lain-lain, baik di Jawa Barat atau Nasional	1	Pemantauan dan Evaluasi Pemasaran Pariwisata	1	Penyusunan dan sosialisasi kajian akademis pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja pemasaran pariwisata Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Perguruan tinggi bidang kepariwisataan Perguruan tinggi bidang pemasaran	Tidak ada		-		
			13	Menerapkan kebijakan yang mendorong masuknya arus investasi pariwisata			2	Pembentukan tim pemantauan dan evaluasi kinerja pemasaran	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Perguruan tinggi bidang kepariwisataan Perguruan	Tidak ada		-		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
								pariwisata Kota Cirebon.		tinggi bidang pemasaran					
			14	Mengembangkan website atau database yang dapat memberikan informasi mengenai potensi berinvestasi di kawasan wisata bahari terpadu dan olah raga yang ditujukan bagi para investor			3	Pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja pemasaran pariwisata Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Perguruan tinggi bidang kepariwisataan Perguruan tinggi bidang pemasaran	Tidak ada		-		
					1	Pengembangan Promosi Pariwisata	1	Kajian pengembangan saluran pemasaran yang efektif dalam menjaring target pasar wisatawan Kota Cirebon.	BPPD Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang kepariwisataan Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi bidang manajemen pemasaran	Tidak ada				
							2	Pengembangan kerja sama dalam pemanfaatan saluran pemasaran yang efektif dalam promosi	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi bidang manajemen pemasaran	Ada	2018	Publikasi pariwisata Cirebon di TV dan tersedianya sarana informasi dan materi promosi berupa leaflet	Rp 125.000.000	Rp 123.500.000

Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
				Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
			pariwisata Kota Cirebon		BPPPPD Kota Cirebon					
						Ada	2022	Promosi Media Sosial (Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri)	Rp 98.828.894	93.668.122.00
						Ada	2023	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya	Rp 193.883.812	Rp 190.416.612
						Ada	2024	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	Rp 389.420.892	Rp 388.595.892
			3 Pemantauan dan evaluasi saluran pemasaran yang digunakan dalam promosi pariwisata Kota Cirebon.	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi bidang manajemen pemasaran	Tidak ada		-		
			4 Pemuatan program Wiskaton (wisata kota cirebon) yang	SKPD informasi dan Komunikasi	SKPD Pariwisata	ada	2018-2022	Belanja Layanan Aplikasi Wistakon	100.000.000	100.000.000

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
								berbasis android.							
					1	Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	1	Sinkronisasi peran SKPD Kota Cirebon dalam pemasaran pariwisata dengan peran SKPD informasi dan komunikasi Cirebon.	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	SKPD Kota Cirebon Bidang Komunikasi dan informatika	Ada		Forum Perangkat Daerah		
							2	Penandatanganan kesepakatan pembagian peran dalam pelaksanaan program bersama pemasaran pariwisata Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	SKPD Kota Cirebon terkait	Tidak ada				
							3	Evaluasi kinerja promosi Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon	Tidak ada		-		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
					1	Pembangunan Citra Pariwisata	1	Perumusan branding kepariwisataan Kota Cirebon.	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi bidang manaj. pemasaran	Ada	2019	Launching Calendar of Event Tahun 2019 dengan rangkaian acara Travel Dialog/Travel Mart, dan Promosi Pariwisata, di dalamnya ada launching branding pariwisata Kota Cirebon "The Gate of Secret"	Rp 651.440.000	Rp 628.550.700
							2	Penyusunan roadmap pembangunan branding kepariwisataan Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi bidang manaj. pemasaran	Tidak ada		-		
							3	Sosialisasi branding dan roadmap pariwisata Kota Cirebon.	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi bidang manaj. Pemasaran	Ada	2018	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara (Promosi Pariwisata pada event pameran luar daerah dan terlaksananya Festival Kopi)	Rp 321.040.000	Rp 312.040.000

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
							4	Pemantauan dan evaluasi efektivitas branding pariwisata Kota Cirebon.	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi bidang manaj. pemasaran	Ada	2018	Evaluasi Branding - Keikutsertaan pada Bimtek Smart City Branding		
					1	Pengembangan Pasar Wisatawan	1	Penyelenggaraan market intelligence terhadap pasar potensial pariwisata Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	SKPD bidang Komunikasi dan Informatika BPPD Kota Cirebon Perguruan tinggi bidang kepariwisataan Perguruan tinggi bidang pemasaran	Tidak ada		-		
							2	Penyelenggaraan survei dan riset pasar tahunan terhadap pasar wisnus dan wisman utama maupun potensial Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	SKPD Bidang Statistik BPPD Kota Cirebon Perguruan tinggi bidang kepariwisataan dan pemasaran	Ada	2024	Pendataan Kunjungan	22.008.000	22.008.000
											Ada	2018	Pengembangan dan penguatan informasi database (update informasi	Rp 125.000.000	Rp 123.500.000

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
													pariwisata Kota Cirebon)		
											Ada	2022	Pendataan kunjungan dari hasil kegiatan Monitoring pelaku usaha pariwisata di Kota Cirebon	Rp 103.220.540	Rp 98.580.540
							3	Sosialisasi hasil market intelligence serta survei dan riset pasar setiap tahun dan usaha pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	SKPD Bidang Komunikasi dan Informatika BPPD Kota Cirebon Perguruan tinggi bidang kepariwisataan dan bidang pemasaran	Tidak ada		-		
					1	Pengembangan Keterpaduan dalam Pemasaran Wisata	1	Sinkronisasi Program pemasaran pariwisata yang menjadi Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Asosiasi Pengusaha dan pengelola pariwisata	Ada		Forum perangkat daerah		

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
							2	Penyusunan rencana pemasaran terpadu Kawasan Straegis dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon.	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Asosiasi Pengusaha dan pengelola pariwisata, Perguruan tinggi	Ada		Rencana aksi pengembangan pariwisata		
							3	Penyelenggaraan program promosi bersama untuk membangun Kota Cirebon sebagai pusat Kawasan wisata sejarah dan keraton di Cirebon dan sekitarnya	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	SKPD Bidang pariwisata Kabupaten/Kota sekitar Kota Cirebon	Ada	2018	Event Promosi Bersama di Kota Cirebon (Festival Kopi) di Gedung Negara	Rp 321.040.000	Rp 312.333.700
					1	Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	1	Penyelenggaraan forum komunikasi dengan destinasi unggulan nasional dalam memadukan program pemasaran pariwisata.	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon SKPD terkait bidang kepariwisataan	Ada	2024	Benchmarking/Studi banding ke Bandung dan Solo	Rp 219.413.936	Rp 208.887.418

Kebijakan			Strategi		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
							2	Penyelenggaraan forum kemitraan yang berkesinambung an dengan negara sumber pasar utama Kota Cirebon.	SKPD Kota Cirebon bidang pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon BPPPPD terkai	Tidak ada		-		

Tabel 5.3.

Capaian Kegiatan Pembangunan Pemasaran Pariwisata RIPPARDA Tahun 2019-2025

Kebijakan			Strategi (Batang Tubuh Perda)		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
4	**Ruang Lingkup Pembangunan Kelembagaan Pariwisata**														
	1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, baik profesional maupun tenaga terampil	1	Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata melalui komitmen bersama dalam membangun pariwisata Kota Cirebon	1	Penguatan Tata Kelola Pariwisata	1	Membangun kesadaran maysarakat akan pentingnya pariwisata melalui komitment bersama dalam membangun pariwisata Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Asosiasi Pelaku usaha pariwisata, SKPD Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Tidak ada				

Kebijakan			Strategi (Batang Tubuh Perda)		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
	2	Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata khususnya Sumber Daya Manusia yang berhadapan langsung dengan wisatawan	2	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan			2	Pembentukan lembaga pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembanga n Pariwisata Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Pelaku usaha pariwisata, Perguruan tinggi bidang kepariwisata an BPPPPD Kota Cirebon	Tidak ada				
	3	Memberdayakan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata di daerahnya	3	Meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas untuk pengembangan kepariwisataan			3	Penyusunan dan penyepakatan sistem pengelolaan destinasi pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembanga n Pariwisata kota cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Asosiasi Pengusaha Pariwisata Pengelola destinasi wisata SKPD Bidang Lingkungan Hidup	Tidak ada				
	4	Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kesadaran seluruh pelaku pariwisata, termasuk masyarakat, terhadap pariwisata	4	Mengadakan standarisasi kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan yang menghasilkan sertifikasi keahlian tertentu			4	Penyepakatan kolaborasi program.	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Pelaku usaha pariwisata, SKPD Kota Cirebon terkait Perguruan tinggi bidang kepariwisata an	Tidak ada				

Kebijakan			Strategi (Batang Tubuh Perda)		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
	5	Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan antar wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, maupun dengan provinsi lain/nasional/internasional melalui lembaga terkait pariwisata dan budaya, termasuk komitmen dari para pengambil keputusan yang terkait dengan pariwisata	5	Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat, pelaku pariwisata dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata	1	Peningkatan Kelembagaan Pendidikan Kepariwisataan	1	Pengembangan kerja sama dengan SKPD Bidang Pendidikan untuk mengembangkan kurikulum kepariwisataan.	SKPD Kota Cirebon bidang pendidikan	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata Asosiasi pengusaha pariwisata Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Tidak ada				
	6	Mengembangkan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif	6	Meningkatkan upaya pendampingan kepada masyarakat pelaku pariwisata dari proses perencanaan, pengelolaan, sampai pemasaran produkwisata			2	Penyelenggaraan program pendidikan dan sertifikasi internasional bagi pengajar kepariwisataan di lembaga pendidikan menengah maupun tinggi.	SKPD Kota Cirebon bidang pendidikan	SKPD Kota Cirebon bidang kepariwisataan Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Tidak ada				
	7	Meningkatkan kemitraan antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengembangan wisata	7	Mengembangkan tourism information system dan e-government yang dapat			3	Pengembangan Sistem pemantauan Evaluasi penyelenggaraan Program	SKPD Kota Cirebon bidang pendidikan	SKPD Kota Cirebon bidang kepariwisataan Perguruan tinggi bidang	Tidak ada				

Kebijakan			Strategi (Batang Tubuh Perda)		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
				mempermudah pengelolaan kawasan kepariwisataan				pendidikan Kepariwisataan		kepariwisataan					
	8	Mengembangkan kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi yang terkait dengan pengembangan wisata	8	Mengembangkan tugas, fungsi dan wewenang kelembagaan terkait, baik dalam skala makro, meso dan mikro secara integratif agar tidak terjadi ketumpang-tindihan dalam menyusun kebijakan	1	Peningkatan Integrasi Pembangunan	1	Penyepakatan programprogram prioritas bersama dalam pembangunan kepariwisataan Kota Cirebon.	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	SKPD kota Yang terkait - BPPPPD Kota Cirebon	Tidak ada				
	9	Mengembangkan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi wisata	9	Mengembangkan asosiasi profesi kepariwisataan serta memperkuat peran dan fungsi lembaga masyarakat yang bergerak dibidang kepariwisataan			2	Penyepakatan pembagian peran antar Pemerintah, Pemerintah Kota Cirebon, dalam Pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon	Tidak ada				

Kebijakan			Strategi (Batang Tubuh Perda)		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
			10	Mengembangkan sarana dan prasarana operasional sebagai penunjang kegiatan kelembagaan			3	Penyepakatan Pembagian peran antara Pemerintah Kota Cirebon dalam pengawasan pariwisata di Kota Cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan BPPPPD Kota Cirebon	Tidak ada				
			11	Menerapkan instrumen kebijakan berupa insentif dan disinsentif, seperti pajak dan regulasi yang mendukung pengembangan kepariwisataan	1	Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia dan Usaha Pariwisata	1	Pengembangan kerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi dan usaha pariwisata untuk penyelenggaraan program sertifikasi berkesinambungan.	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Asosiasi profesi Pariwisata Lembaga Sertifikasi terkait	Ada	2020	CHSE (APBN)	Rp 18.000.000.000	Rp 16.000.000.000
			12	Meningkatkan hubungan kemitraan yang bernuansa pembinaan dan saling menguntungkan antara pelaku pariwisata, baik pemerintah, dunia usaha			2	Penyelenggaraan program sertifikasi profesi dan usaha pariwisata secara berkesinambungan	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Asosiasi profesi Pariwisata Lembaga Sertifikasi terkait	Ada	2020	CHSE (APBN)	Rp 18.000.000.000	Rp 16.000.000.000

Kebijakan			Strategi (Batang Tubuh Perda)		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
				maupun masyarakat											
			13	Meningkatkan sinergitas antar lembaga terkait pengembangan wisata			3	Penetapan kebijakan Pemberian insentif bagi SDM dan usaha pariwisata yang bersertifikasi	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Asosiasi profesi Pariwisata Lembaga Sertifikasi terkait	Ada	2020	CHSE (APBN)	Rp 18.000.000.000	Rp 16.000.000.000
			14	Mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia di bidang pariwisata serta pelajar/mahasiswa di bidang pariwisata	1	Peningkatan fungsi dan Peran Kelembagaan	1	Pembentukan posisi struktural khusus Kepariwisataan pada struktur organisasi lembaga koordinasi wilayah pemerintahan dan pembangunan Kota Cirebon dan Penetapannya	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Tidak ada		-		
			15	Mengembangkan kelembagaan pengelola investasi pariwisata			2	Penyepakatan pembagian peran antara SKPD Kota Cirebon, lembaga wilayah pemerintahanan dan pembagunan, dan pemerintah pembangunan	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Tidak ada		-		

Kebijakan			Strategi (Batang Tubuh Perda)		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
								kepariwisataan di Kota Cirebon							
			16	Mengembangkan kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan usaha pariwisata skala regional, nasional dan internasional			3	Meningkatan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat pelaku pariwisata dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPD Kota Cirebon Sekretariat Daerah Kota Cirebon Organisasi kemasyarakatan sekitar lokasi	Ada	2018	Pembinaan Pokdarwis (Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata)	Rp 109.140.000	Rp 108.218.000
											Ada	2023	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kementrian pariwisata	Rp 37.758.000	Rp 37.758.000

Kebijakan			Strategi (Batang Tubuh Perda)		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
					1	Peningkatan fungsi dan peran kelembagaan	1	Sinkronisasi fungsi dan peran asosiasi industri pariwisata dan asosiasi profesi pariwisata dalam mendorong pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah yang berkualitas dan berkredibilitas tinggi	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Asosasi usaha Pariwisata Pengelola destinasi wisata Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Ada		Forum OPD		
							2	Pelatihan penguatan kelembagaan asosiasi industri dan profesi pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Asosasi usaha Pariwisata Pengelola destinasi wisata Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Ada	2020	CHSE (APBN)	Rp 18.000.000.000	Rp 16.000.000.000
							3	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan fungsi dan peran asosiasi industri pariwisata dan asosiasi profesi pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPPD Kota Cirebon Asosasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi bidang	Ada	2020	CHSE (APBN)	Rp 18.000.000.000	Rp 16.000.000.000

Kebijakan			Strategi (Batang Tubuh Perda)		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
								dalam mendorong pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkredibilitas tinggi		kepariwisataan					
					1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	1	Penyusunan Kajian akademis mekanisme insentif bgi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Provinsi Kota Cirebon dan usaha pariwisata, serta bagi pelajar/mahasiswa di bidang kepariwisataan berupa program pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPPD Kota Cirebon Asosasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Ada	2020	CHSE (APBN)	Rp 18.000.000.000	Rp 16.000.000.000

Kebijakan			Strategi (Batang Tubuh Perda)		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
							2	Penetapan mekanisme insentif bagi sumber daya mnusia di lingkungan pemerintah Kota Cirebond an usaha pariwsata, serta bag pelajar/mahasis wa di bidang kepariwisataan berupa program pendidikan kepariwisataan	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPPD Kota Cirebon Asosasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi bidang kepariwisata an	Tidak ada		-		
							3	Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pendidikan kepariwisataan dalam rangka Pemberian insentif	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	SKPD Kota Cirebon bidang pendidikan - Perguruan tinggi bidang kepariwisata an	Ada		MOU		
							4	Sosialisasi mekanisme insentif kepada SDM pariwisata di Pemerintah Kota Cirebon dan usaha Pariwisata, serta bagi	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	BPPPPPD Kota Cirebon Asosasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi bidang kepariwisata an	Tidak ada		-		

Kebijakan			Strategi (Batang Tubuh Perda)		Program Kegiatan		Indikasi Kegiatan		Penanggungjawab		Ada/ Tidak Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Anggaran	
									Utama	Pendukung				Rencana	Realisasi
								pelajar/mahasiswa dibidang kepariwisataan							
					1	Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan	1	Penandatanganan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka penelitian dan pengembangan kepariwisataan, termasuk SDM pariwisata.	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	SKPD bidang Pendidikan Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Ada		MOU		
							2	Koordinasi kebutuhan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan kepariwisataan kota cirebon	SKPD Kota Cirebon bidang Pariwisata	Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	Ada		MOU		

Berdasarkan tabel evaluasi di atas, diketahui bahwa peran serta stakeholder dalam implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Tahun 2019-2025 terlihat dalam peran sebagai penanggung jawab utama sebagai berikut:

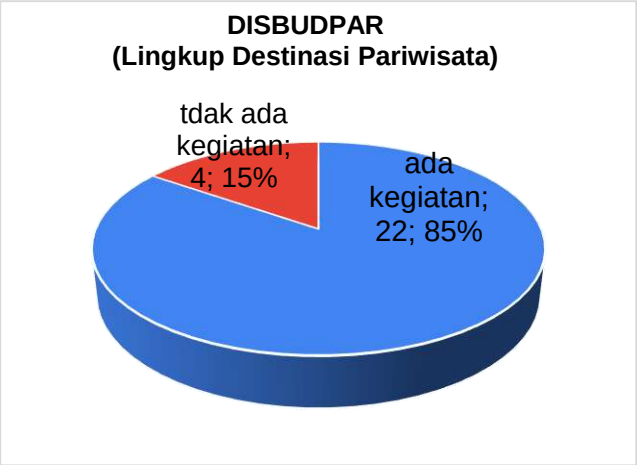

- Peran serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon pada ruang lingkup Destinasi Pariwisata, terlihat dari pelaksanaan program/kegiatan yang teridentifikasi sebesar 22 kegiatan (85%) dan tidak terlaksana sebanyak 4 kegiatan (15%).

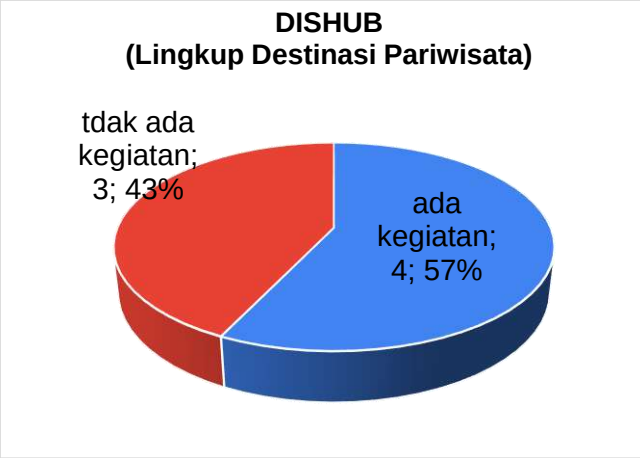

- Dinas Perhubungan turut mendukung pelaksanaan implementasi RIPPARDA dengan 4 program/kegiatan (57%), program/kegiatan yang tidak terlaksana sebanyak 3 kegiatan (43%).

- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitstika tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan atas indikator program/kegiatan yang tercantum pada ruang lingkup Destinasi Pariwisata

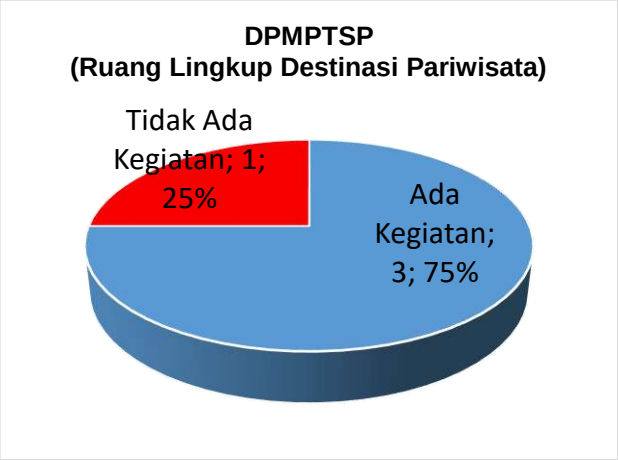

- Peran serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon pada ruang lingkup Destinasi Pariwisata, terlihat dari pelaksanaan program/kegiatan yang teridentifikasi sebanyak 3 kegiatan (75%) dan tidak terlaksana sebanyak 1 kegiatan (25%).

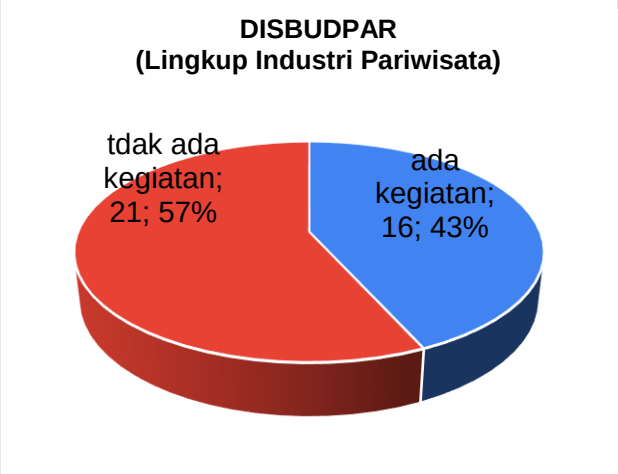

- Peran serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon pada ruang lingkup Industri Pariwisata, terlihat dari pelaksanaan program/ kegiatan yang teridentifikasi sebanyak 16 kegiatan (43%) dan tidak terlaksana sebanyak 21 kegiatan (57%).

- Dinas Perhubungan turut mendukung pelaksanaan implementasi RIPPARDA dengan 1 program/kegiatan (100%).

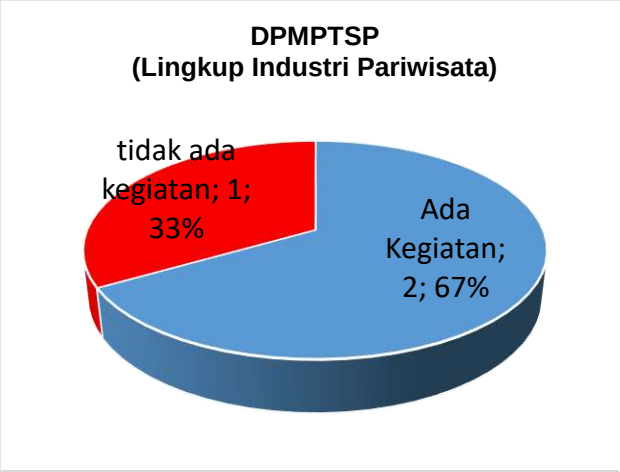

- Peran serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon pada ruang lingkup Industri Pariwisata, terlihat dari pelaksanaan program/kegiatan yang teridentifikasi sebanyak 2 kegiatan (67%) dan tidak terlaksana sebesar 1 kegiatan (33%).

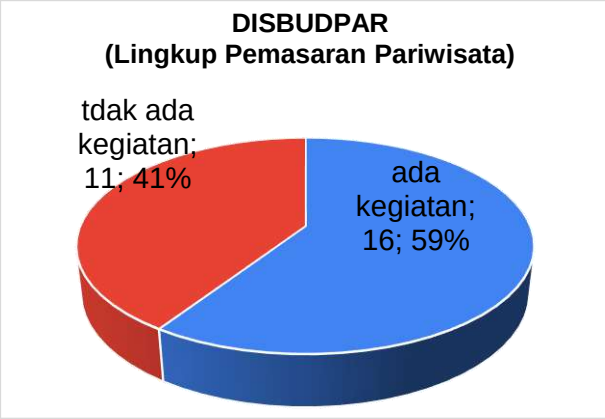

- Peran serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon pada ruang lingkup Pemasaran Pariwisata, terlihat dari pelaksanaan program/kegiatan yang teridentifikasi sebanyak 16 kegiatan (59%) dan tidak terlaksana sebanyak 11 kegiatan (41%).

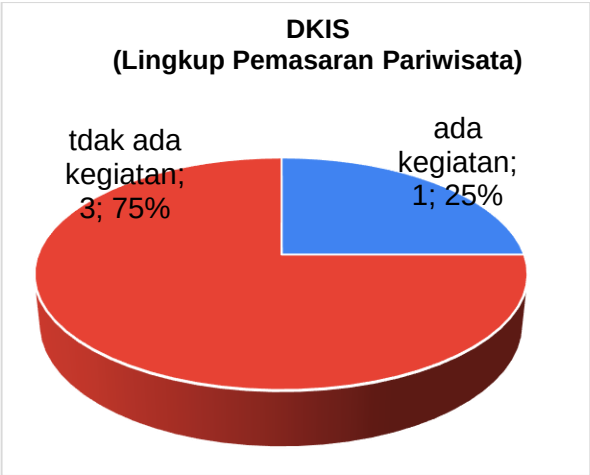

- Peran serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitstika Kota Cirebon pada ruang lingkup Pemasaran Pariwisata, terlihat dari pelaksanaan program/ kegiatan yang teridentifikasi sebanyak 1 kegiatan (25%) dan tidak terlaksana sebanyak 3 kegiatan (75%).

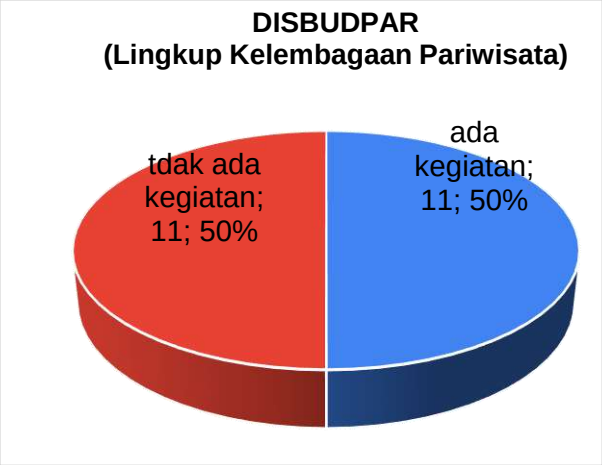

- Peran serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon pada ruang lingkup Kelembagaan riwisata, terlihat dari pelaksanaan program/ kegiatan yang teridentifikasi sebanyak 11 kegiatan (50%) dan tidak terlaksana sebanyak 11 kegiatan (50%).

Berikut data pelaksanaan peran serta perangkat daerah dalam program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwsataan (RIPPARDA) Kota Cirebon dalam kurun waktu kegiatan Tahun 2019-2024 sebagai berikuit:

Tabel 5.4.
Pelaksanaan Progam/Kegiatana yang tertuang dalam RIPPARDA Kota Cirebon Tahun 2019-2025

Ruang Lingkup	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Utama	Kegiatan		Jumlah Kegiatan
		Terlaksana	Tidak Terlaksana	
Destinasi Pariwisata	Budpar	22	4	26
	DPMPTSP	3	1	4
	Dishub	4	3	7
	BPPPPD	0	1	1
	DPUTR	0	7	7
	Dinkes	0	1	1
	SatpolPP	0	1	1
	DKIS	0	1	1
	Jumlah	29	19	48
Industri Pariwisata	Disbudpar	16	21	37
	DKUKMPP	0	5	5
	Dishub	0	1	1
	SatpolPP	0	1	1
	DPMPTSP	2	1	3
	Jumlah	18	29	47
Pemasaran Pariwisata	Disbudpar	16	11	27

Ruang Lingkup	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Utama	Kegiatan		Jumlah Kegiatan
		Terlaksana	Tidak Terlaksana	
	BPPPPD	0	2	2
	DKIS	1	3	4
	Jumlah	17	16	33
Kelembagaan Pariwisata`	Disbudpar	11	11	22
	Disdik	0	3	3
	Jumlah	11	14	58
	Total Kegiatan RIPPARDA	**75**	**78**	**186**

Sumber: Hasil Penelitian, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel data pelaksanan program/kegiatan RIPPARDA oleh perangkat daerah, dapat dilihat bahwa jumlah kegiatan yang terlaksana sebesar 75 kegiatan atau realisasi kegiatan 49% dan kegiatan yang tidak terlaksana sebesar 78 kegiatan atau realisasi kegiatan 51%. Hal ini mengindikasikan bahwa program/kegiatan yang tertuang dalam RIPPARDA Tahun 2019-2025 realisasi sebesar 49%. Apabila menggunakan interval penilaian indikator ketercapaian, maka termasuk kategori Tidak Berhasil. Hal ini dapat menyebabkan pembangunan kepariwisataan Kota Cirebon terganggu.

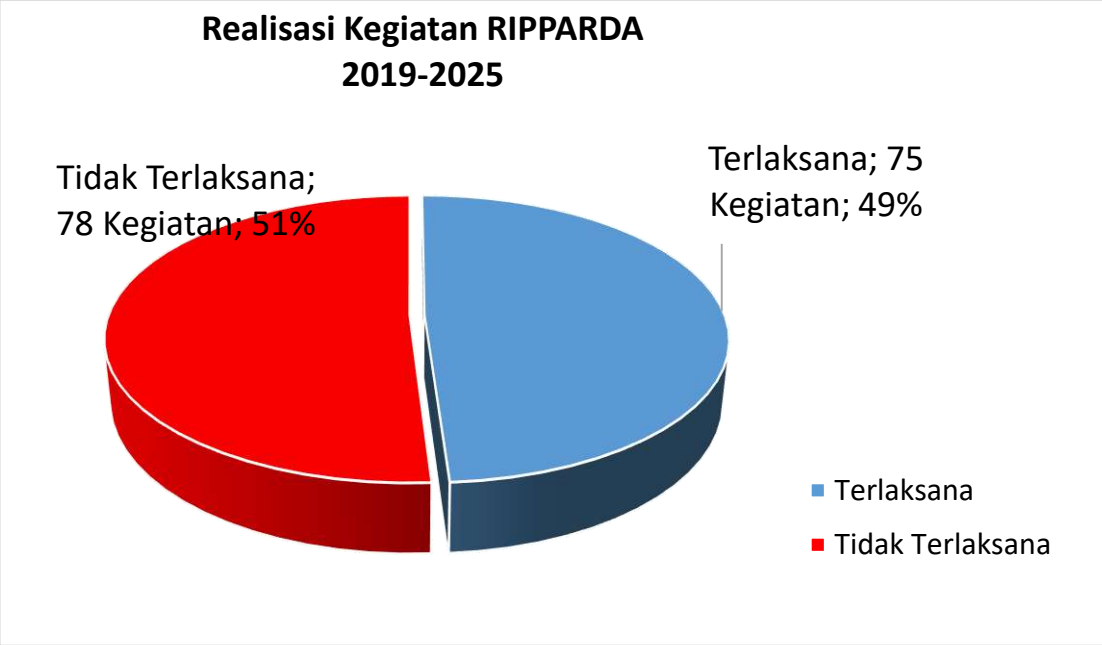

Apabila relisasi kegiatan dirinci berdasarkan ruang lingkup pembangunan kepariwisataan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

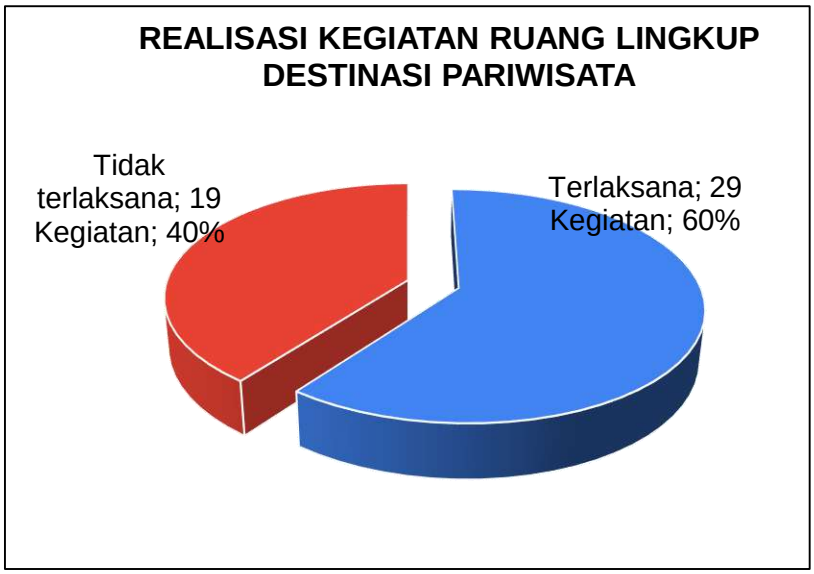

- Realisasi kegiatan ruang lingkup Destinasi Pariwisata 29 kegiatan atau 60%, termasuk kategori CUKUP BERHASIL. Kegiatan tidak terlaksana sebanyak 40% atau 19

Gambar 5. 10 Realisasi kegiatan ruang lingkup Desinasi Pariwisata

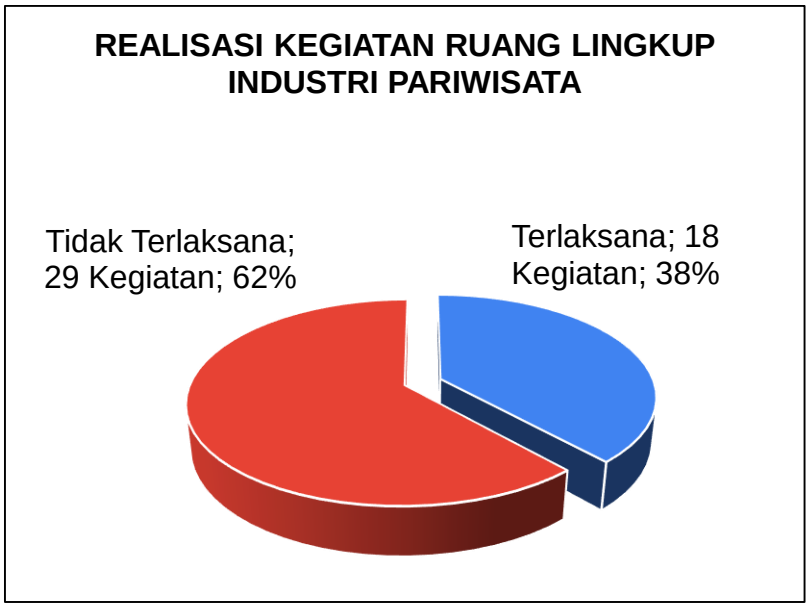

- Realisasi kegiatan ruang lingkup Industri Pariwisata 18 kegiatan atau 38 %, termasuk kategori TIDAK BERHASIL. Kegiatan tidak terlaksana sebanyak 69% atau 29 kegiatan.

Gambar 5. 11 Realisasi kegiatan ruang lingkup Industri Pariwisata

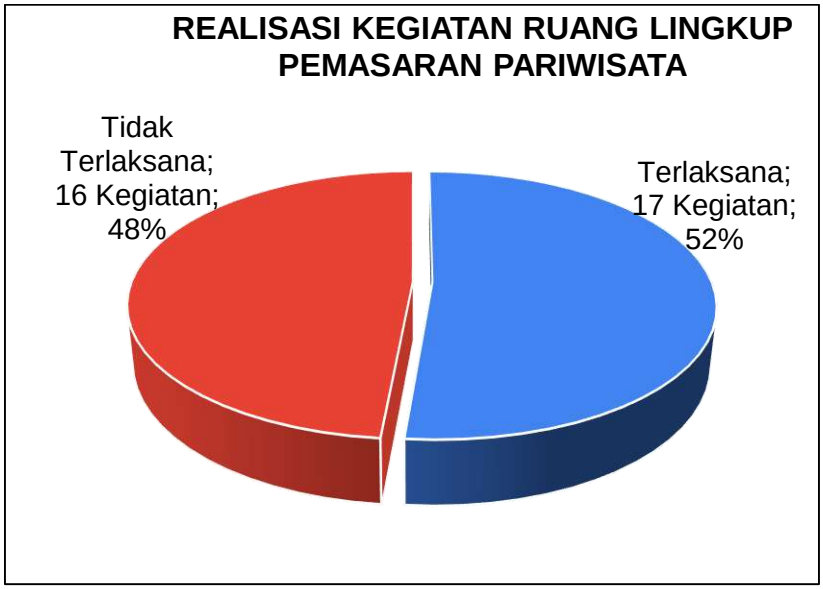

- Realisasi kegiatan ruang lingkup Pemasaran Pariwisata 17 kegiatan atau 52% termasuk kategori TIDAK BERHASIL. Kegiatan tidak terlaksana sebanyak 48% atau 16 kegiatan.

Gambar 5. 12 Realisasi kegiatan ruang lingkup Pemasaran Pariwisata

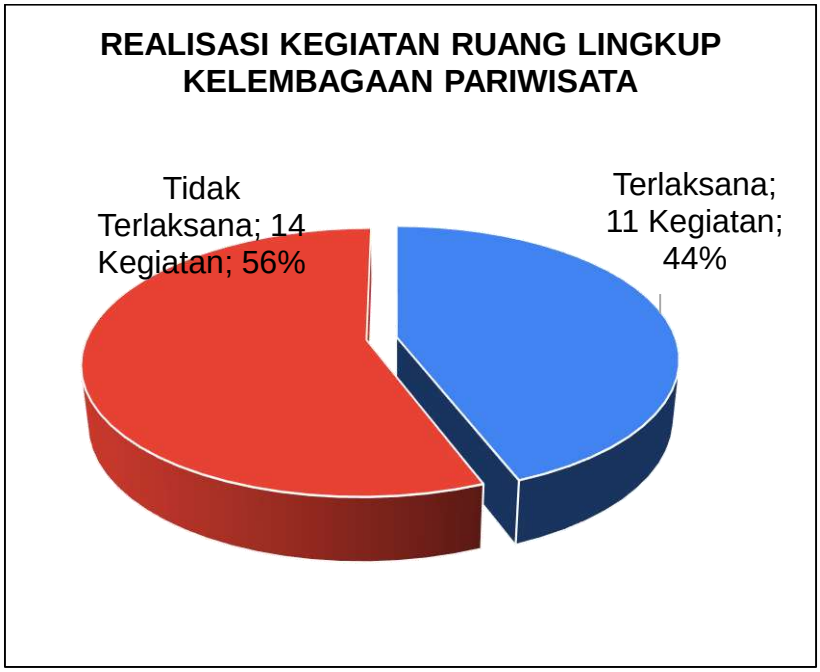

- Realisasi kegiatan ruang lingkup Kelembagaan Pariwisata 11 kegiatan atau 44% termasuk kategori TIDAK BERHASIL. Kegiatan tidak terlaksana sebanyak 56% atau 14 kegiatan.

Gambar 5. 13 Realisasi kegiatan ruang lingkup Kelembagaan Pariwisata

Bila dilihat dari implementasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan peran penanggung jawab utama pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Tahun 2019-2025 dapat disimpulkan bahwa:

1. Masih ada indikasi kegiatan yang tertuang dalam Ripparda dimana perangkat daerah tertentu sebagai penanggung jawab, belum dilaksanakan/tidak ada bentuk kegiatan dalam kurun waktu 2019-2024;
2. Terdapat satu indikasi kegiatan yang tertuang dalam Ripparda dimana perangkat daerah tertentu sebagai penanggung jawab telah melaksanakan lebih dari satu bentuk kegiatan dalam kurun waktu 2019-2024;
3. Alasan tidak dilaksanakannya kegiatan adalah berkaitan dengan tupoksi perangkat daerah yang tidak sesuai;
4. Adanya kebijakan *refocusing* dan efisiensi anggaran kegiatan pada perencanaan kurun waktu 2019-2024, sehingga memprioritaskan program kegiatan pelayanan minimal Masyarakat maupun program prioritas daerah Kota Cirebon.
5. Terdapat perangkat daerah yang tidak mengetahui kedudukannya sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam RIPPARDA.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam kajian Analisis Situasi dan Evaluasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon Tahun 2019-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon Tahun 2019 – 2025 belum dijadikan acuan referensi utama dalam pembangunan kepariwisataan di Kota Cirebon. Hal ini terekam dalam pelaksanaan pada setiap ruang lingkup kepariwisataan yang hanya dilaksanakan sebesar 38 % - 60% dari semua kegiatan yang diamanatkan untk dilaksanakan dalam dokumen tersebut;
2. Masih minimnya sinkronisasi dan harmonisasi dalam perencanaan kegiatan antar perangkat daerah selaku pengampu kegiatan utama dalam Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon Tahun 2019 – 2025;
3. Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kota Cirebon yang sebagian besar diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang belum mengacu sepenuhnya pada Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon Tahun 2019 – 2025.
4. Kota Cirebon memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata. Berbagai upaya yang telah dilakukan, sehingga magnet dan daya tarik Kota Cirebon masih besar, salah satunya urban lifestyle yang optimis dapat terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.
5. Obyek wisata sejarah yang tidak dimiliki oleh banyak daerah lainnya, sehingga masih menjadi obyek wisata yang dapat diunggulkan Kota Cirebon, namun masih perlu memperbaiki dalam hal pengelolaan dan kelembagaan.

Hasil analisis dari pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cirebon Tahun 2019 – 2025 diperoleh beberapa permasalahan pokok untuk setiap ruang lingkup kepariwisataan yaitu:

A. Ruang Lingkup Destinasi Pariwisata
   1. Masih belum optimalnya pengembangan daya tarik obyek wisata;

2. Tata kelola obyek wisata yang belum dijalankan secara professional menghambat perkembangan dan kemajuan wisata pada destinasi wisata tersebut;
3. Fasilitas pendukung pada destinasi wisata saat ini masih kurang memuaskan.

B. Ruang Lingkup Industri Pariwisata
1. Pendanaan untuk pengembangan pariwisata di Kota Cirebon masih menjadi permasalahan, dan tingkat investasi pada sector pariwisata pun masih rendah;
2. Infrastruktur dan jalan perkotaan yang mendukung pariwisata masih kurang sehingga atmosfer kota wisata budaya belum diperoleh;
3. Preservasi obyek wisata bersejarah masih terbaikan.

C. Ruang Lingkup Pemasaran Pariwisata
1. Media promosi masih belum optimal, masih mengandalkan media mainstream yang belum menjangkau seluruh segmen pasar;
2. Kurangnya produk-produk wisata termasuk event yang dapat dipasarkan / marketable;
3. Belum adanya brand image yang kuat dan mengakar.

D. Ruang Lingkup Kelembagaan Pariwisata
1. Sinergitas antar lembaga internal instansi pemerintah masih belum optimal;
2. Sumber daya manusia yang begerak di bidang kepariwisataan belum professional dan kesadaran masyarakat akan sapta pesona belum terlihat; dan
3. Belum terjalinnya kemitraan yang baik antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan pariwisata di Kota Cirebon.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil kajian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka rekomendasi kebijakan pembangunan kepariwisataan Kota Cirebon di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan daya tarik destinasi wisata yang telah ada (Keraton, Gua Sunyaragi, Wisata Bahari) dan mengembangkan destinasi wisata baru (wisata urban lifestyle Cipto, dan lain-lain);

2. Pengelolaan pengembangan wisata di kawasan yang berkualitas dan terintegrasi, seperti kawasan kota tua yang lengkap dengan objek wisata, event wisata, amenitas pendukung, dan transportasi yang terhubung;
3. Peningkatan keamanan dan kenyamanan di kawasan wisata, dengan kelibatan trantibumlinmas, sehingga wisatawan tidak "kapok" berwisata di Kota Cirebon;
4. Meningkatkan pagu anggaran dari pemerintah daerah untuk sektor pariwisata, mengelola ticketing dengan baik untuk obyek wisata tertentu, dan memudahkan perizinan untuk menarik investor;
5. Mengembangkan penanda kawasan, jalan akses yang baik, kantong parkir yang mencukupi dan terkelola baik, menyediakan amenitas seperti toilet yang bersih, dan lain-lain;
6. Menetapkan perda perlindungan cagar budaya terbaru agar dobyek wisata bersejarah dapat terlindungi dan terkelola dengan baik;
7. Meningkatkan social media marketing, merangkul content creator, dan bekerja sama dengan travel agent untuk menawarkan paket wisata untuk korporasi dan sekolah;
8. Menyebarluaskan *Calendar of Events* yang dapat diakses masyarakat umu, memperbanyak event yang berskala nasional dan internasional;
9. Memperbaiki dan memperkuat *city branding* Kota Cirebon sehingga mudah diingat oleh masyarakat;
10. Ketersinambungan berbagai perangkat daerah untuk mengembangkan pariwisata terpadu;
11. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata, kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; dan
12. Meningkatkan pemasaran terpadu dengan para pelaku wisata di dalam kota, serta kota dan kabupaten sekitar

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Kota Cirebon di masa mendatang dapat dilakukan pula dengan melanjutkan program dan kegiatan yang telah berjalan dan dianggap memiliki dampak dan manfaat dalam kepariwisataan saat ini, mengingat kegiatan yang telah berjalan dalam RIPPARDA Tahun 2019-2025 tentunya sudah tersinkronisasi dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang sedang sedang berjalan.

Kesimpulan dan rekomendasi tersebut, bila diindentifikasi dapat dibuat matrik analisis berdasarkan evaluasi pembangunan kepariwisataan Kota Cirebon berdasarkan RIPPARDA Tahun 2019-2025 sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Matrik Analisis Rekomendasi dan Strategi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan di Kota Cirebon

No.	Permasalahn Kepariwisataan	Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Masukan Pemangku Kebijakan	Landasan Kebijakan
1	Masih belum optimalnya pengembangan daya tarik obyek wisata	Meningkatkan daya tarik destinasi wisata yang telah ada (Keraton, Gua Sunyaragi, Wisata Bahari) dan mengembangkan destinasi wisata baru (wisata urban lifestyle Cipto, dan lain-lain)	• Perda No. 7 Tahun 2019 tentang RIPPARDA 2019-2025 • Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kota Cirebon
2	Tata kelola obyek wisata yang belum dijalankan secara professional menghambat perkembangan dan kemajuan wisata pada destinasi wisata tersebut	Pengelolaan pengembanga wisata di kawasan yang berkualitas dan terintegrasi, seperti kawasan kota tua yang lengkap dengan objek wisata, event wisata, amenitas pendukung, dan transportasi yang terhubung	
3	Fasilitas pendukung pada destinasi wisata saat ini masih kurang memuaskan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan di kawasan wisata, dengan kelibatan trantibumlinmas, sehingga wisatawan tidak “kapok” beriwsata di Kota Cirebon	
4	Pendanaan untuk pengembangan pariwisata di Kota	Meningkatkan pagu anggaran dari pemerintah daerah untuk sektor pariwisata, mengelola ticketing	

No.	Permasalahn Kepariwisataan	Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Masukan Pemangku Kebijakan	Landasan Kebijakan
	Cirebon masih menjadi permasalahan, dan tingkat investasi pada sector pariwisata pun masih rendah	dengan baik untuk obyek wisata tertentu, dan memudahkan perizinan untuk menarik investor	
5	Infrastruktur dan jalan perkotaan yang mendukung pariwisata masih kurang sehingga atmosfer kota wisata budaya belum diperoleh	Mengembangkan penanda kawasan, jalan akses yang baik, kantong parkir yang mencukupi dan terkelola baik, menyediakan amenitas seperti toilet yang bersih, dan lain-lain	
6	Preservasi obyek wisata bersejarah masih terbaikan	Menetapkan Peraturan Daerah perlindungan cagar budaya terbaru agar dobyek wisata bersejarah dapat terlindungi dan terkelola dengan baik	
7	Media promosi masih belum optimal, masih mengandalkan media mainstream yang belum menjangkau seluruh segmen pasar	Meningkatkan social media marketing, merangkul content creator, dan bekerja sama dengan travel agent untuk menawarkan paket wisata untuk korporasi dan sekolah	
8	Kurangnya produk-produk wisata	Menyebarluaskan Calendar of Events yang dapat diakses	

No.	Permasalahn Kepariwisataan	Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Masukan Pemangku Kebijakan	Landasan Kebijakan
	termasuk event yang dapat dipasarkan / marketable	masyarakat umu, memperbanyak event yang berskala nasional dan internasional	
9	Belum adanya brand image yang kuat dan mengakar	Memperbaiki dan memperkuat city branding Kota Cirebon sehingga mudah diingat oleh masyarakat	
10	Sinergitas antar lembaga internal instansi pemerintah masih belum optimal	Ketersinambungan berbagai perangkat daerah untuk mengembangkan pariwisata terpadu	
11	Sumber daya manusia yang begerak di bidang kepariwisataan belum professional dan kesadaran masyarakat akan sapta pesona belum terlihat	Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata, kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan	
12	Belum terjalinnya kemitraan yang baik antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan	Meningkatkan pemasaran terpadu dengan para pelaku wisata di dalam kota, serta kota dan kabupaten sekitar	

No.	Permasalahn Kepariwisataan	Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Masukan Pemangku Kebijakan	Landasan Kebijakan
	pariwisata di Kota Cirebon		

DAFTAR PUSTAKA

Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2019). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving* (7th Editio). CQ Press. https://justicepolicynetwork.com/wp-content/uploads/2021/03/Bardachs-Eightfold-Path-1.pdf

Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2018). *Cost-Benefit Analysis: Concept and Practice* (Fifth Edit). Cambridge University Press. https://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/E5V5H3_Cost-benefit analysis _ 2018.pdf

Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). *Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys* (4th Editio). John Wiley & Sons Inc. https://doi.org/10.1002/9781394260645

Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315181226

Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. *Public Administration Review*, *66*(SUPPL. 1), 66–75. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x

Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. *Journal of International Social Research*, *10*(51), 994–1006. https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1832

Healey, P. (1997). *Collaborative Planning*. Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25538-2

Hoefer, R. (2022). The Multiple Streams Framework: Understanding and Applying the Problems, Policies, and Politics Approach. *Journal of Policy Practice and Research*, *3*(1), 1–5. https://doi.org/10.1007/s42972-022-00049-2

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Principles and Processes* (4th Editio). Oxford University Press. https://global.oup.com/academic/product/studying-public-policy-9780199026142?cc=us&lang=en&#

Jetha, Q. (2017). *Introduction to Cost-Effectiveness Analysis*. J-PAL South Asia and CLEAR South Asia. https://dmeo.gov.in/sites/default/files/2021-09/Introduction_to_Cost_Effectiveness_Analysis.pdf

Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (2nd Editio). Pearson. https://elibrary.pearson.de/book/99.150005/9781292053875

Krueger, R. A., & Casey, M. . (2014). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. SAGE Publications.

Martin, W., Pauly, B., & MacDonald, M. (2016). Situational Analysis for Complex Systems: Methodological Development in Public Health Research. *AIMS Public Health*, *3*(1), 94–109. https://doi.org/10.3934/publichealth.2016.1.94

Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems*. Chelsea Green Publishing.

Patton, C., Sawicki, D., & Clark, J. (2015). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning* (3rd Editio). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315664736

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (2020). https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1037/peraturan-presiden-nomor-18-tahun-2020

Peters, B. G. (2015a). *Advanced Introduction to Public Policy*. Edward Elgar Publishing.

Peters, B. G. (2015b). Policy Capacity in Public Administration. *Policy and Society*, *34*(3–4), 219–228. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.005

Pissourios, I. A. (2014). Top-down and Bottom-up Urban and Regional Planning: Towards a Framework for the Use of Planning Standards. *European Spatial Research and Policy*, *21*(1), 83–99. https://doi.org/10.2478/esrp-2014-0007

Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.

Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model). In *Tahta Media Group*. http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733

Rodríguez-Pose, A., & Krøijer, A. (2009). Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. *Growth and Change*, *40*(3), 387–417. https://doi.org/10.1111/j.1468-2257.2009.00488.x

Rondinelli, D. A. (1983). Implementing Decentralization Programmes in Asia: A Comparative Analysis. *Public Administration and Development*, *3*(3), 181–207. https://doi.org/10.1002/pad.4230030302

Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/sach17314

Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation Theory, Models, and Applications* (2nd ed.). Josey-Bass.

Swords, J. (2013). Michael Porter's Cluster Theory as a Local And Regional Development Tool: The Rise and Fall of Cluster Policy in the UK. *Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit*, *28*(4), 369–383. https://doi.org/10.1177/0269094213475855

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (Issue 13th Edition). Pearson Education. https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th Edition).

DOKUMENTASI KEGIATAN

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD)
dengan Perangkat Daerah

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD)
dengan Stakeholder Pengelola Obyek Wisata dan Pelaku Usaha Pariwisata

Wawancara (*in-dept interview*)
dengan Pihak Keraton Kacirebonan

Wawancara (*in-dept interview*)
dengan Pihak Keraton Kasepuhan, 6 Maret 2025

Wawancara (*in-dept interview*)
dengan Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon

Wawancara (*in-dept interview*)
dengan Kepala Disbudpar Kota Cirebon

Wawancara (*in-dept interview*)
dengan Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon